

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM

# Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

09



Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM

# **Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**



PB

353.040.9

SEJ

S

# Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa



PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DAPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Jakarta  
1984**

Hak cipta pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi	No. Induk : 665
	Tgl. : 2/10/2007
	Ttd. : _____

Naskah buku ini semula merupakan hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah 1977/1978, disunting dan diterbitkan dengan dana Proyek Penelitian Pusat.

Staf inti Proyek Pusat: Dra. Sri Sukezi Adiwimarta (Pemimpin), Drs. Hasjmi Dini (Bendaharawan), Drs. Lukman Hakim (Sekretaris), Prof. Dr. Haryati Soebadio, Prof. Dr. Amran Halim dan Dr. Astrid Susanto (konsultan).

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit kecuali dalam hal kutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Alamat penerbit: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun  
Jakarta Timur.



## PENGANTAR

*Sejarah dan Perkembangan Pusat dan Pengembangan Bahasa* ini merupakan edisi kedua dan perbaikan terhadap edisi pertama dengan judul yang sama yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1978.

Naskah edisi kedua ini pun selesai disusun pada tahun 1978. Sejak masa itu sampai terbitnya sekarang tentu saja cukup banyak perkembangan yang dialami oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Beberapa hal yang tercantum di dalam buku ini sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan masa kini. Namun, itulah sebagian sejarah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Atas dasar pendapat umum bahwa sejarah adalah rangkaian peristiwa dan masa lalu, meskipun sudah agak terlambat, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah — Jakarta tetap merasa gembira dapat membantu penerbitan buku ini.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapatlah tumbuh sikap yang wajar mengenai sejarah dan perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada diri para ahli dan peminat bahasa dan sastra.

Jakarta, Agustus 1983

Dra. Sri Sukei Adiwimarta  
Pemimpin Proyek Penelitian  
Bahasa dan Sastra Indonesia  
dan Daerah — Jakarta

## PRAKATA

Buku ini memuat sejarah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan segala kegiatannya yang dilakukan selama ini.

Penyusunan buku ini dilakukan oleh Panitia Kerja Pengolahan Data Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan surat keputusannya tanggal 3 Mei 1977, No. 036/Kep/PB/77, sedang penerbitannya diusahakan oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam penulisan sejarah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, telah dimanfaatkan naskah "Sejarah Lembaga Bahasa Nasional" yang disusun oleh Sdr. Hermanu Maulana sebagai sumber bahan penyusunan di samping sumber-sumber lain.

Oleh karena penulisan buku ini tidak hanya dilakukan oleh satu tangan, maka Panitia Kerja Pengolahan Data memandang perlu untuk membentuk satu tim editor yang bertugas menyunting naskah buku ini. Tim editor ini terdiri dari Maman Sunantri (penanggung jawab), Dendy Sugono (ketua), Hariayanti E.Y. (sekretaris), Adi Sunaryo (anggota), Junaiyah H.M. (anggota), dan Atang Amsyahdi (anggota/ilustrator).

Berbagai pihak telah membantu lahirnya buku *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* ini. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para konsultan, terutama Prof.Dr.Amran Halim yang senantiasa memberikan dorongan dan petunjuk kepada Panitia Kerja, dan kepada Peminpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang telah menerbitkan buku ini. Demikian juga kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para Kepala Bidang, Sdr. Hermanu Maulana, dan berbagai pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini. Karena itu kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan buku ini sangat kami harapkan.

Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat kepada para peminat sesuai dengan tujuan penyusunan buku ini.

Jakarta, Juli 1978

Panitia Kerja Pengolahan Data  
Pusat Pembinaan dan  
Pengembangan Bahasa

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Pasal 948, Pasal 949, dan Pasal 950 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975, No.079/0 Tahun 1975 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertugas menangani masalah kebahasaan dan kesastraan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masalah ini merupakan masalah nasional karena ia menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ia perlu ditangani secara nasional pula.

Tugas yang dipercayakan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu mencerminkan betapa besarnya perhatian pemerintah terhadap masalah kebahasaan dan kesastraan itu. Namun, karena masalah ini menyangkut baik kepentingan perseorangan sebagai warga masyarakat Indonesia maupun kepentingan segenap lapisan masyarakat Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya, pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu menghendaki adanya kerja sama yang sungguh-sungguh antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada satu pihak dan segenap lapisan masyarakat Indonesia pada pihak lain. Dalam hubungan ini, masyarakat luas itu perlu mengenal Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Penerbitan buku *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* ini merupakan salah satu usaha memperkenalkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada masyarakat ramai serta memperlihatkan betapa peliknya masalah kebahasaan dan kesastraan yang kita hadapi *itu*. Mudah-mudahan penerbitan buku ini mendatangkan manfaat bagi kita semua sedemikian rupa sehingga masalah kebahasaan dan kesas-



traan kita itu dapat kita tangani dengan sebaik-baiknya demi keberhasilan pembangunan bangsa kita.

Kepada semua pihak yang telah memungkinkan penerbitan buku ini, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Amran Halim  
Kepala Pusat Pembinaan  
dan Pengembangan Bahasa

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Dipandang dari segi strukturnya, kebudayaan merupakan suatu sistem yang bulat, terpadu, dan dinamis. Ia merupakan suatu sistem yang bulat dalam pengertian bahwa ia adalah kesatuan yang utuh, yang merupakan kesatuan sistem nilai sosial budaya serta pandangan hidup bangsa yang mendukungnya. Kebudayaan sebagai suatu sistem yang terpadu ditandai oleh kenyataan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang menjalin sistem itu memiliki hubungan isi-mengisi, hubungan timbal-balik sedemikian rupa sehingga unsur yang satu tidak dapat dipisahkan dari unsur yang lain. Kebudayaan sebagai sistem yang dinamis mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat yang mendukungnya. Kedinamisan sistem itu berarti bahwa kebudayaan itu senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Salah satu arah perkembangan itu adalah arah yang menuju kepada peradaban sesuai dengan perkembangan peradaban dunia modern.

Di dalam hubungan dengan kebudayaan sebagai suatu sistem yang bulat, terpadu, dan dinamis itu, bahasa menempati kedudukan yang tersendiri. Bahasa adalah salah satu unsur di dalam jaringan sistem itu. Dalam kedudukan ini, bahasa memiliki hubungan timbal-balik dengan unsur-unsur kebudayaan yang lain; ia tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur yang lain itu. Namun, pada waktu yang sama, bahasa merupakan sarana ekspresi kebudayaan, sarana ekspresi nilai-nilai sosial budaya dan pandangan hidup yang terkandung di dalamnya. Bahasa adalah sarana yang memungkinkan terjaminnya kebulatan, keterpaduan, dan kedinamisan kebudayaan sebagai suatu sistem. Dengan demikian, jelaslah betapa pentingnya kedudukan bahasa di dalam hubungan dengan kehidupan kebudayaan kita sebagai bangsa.

Pentingnya peranan bahasa di dalam hubungan dengan kebudayaan itulah yang mendorong pemerintah mendirikan lembaga resmi yang bertugas menangani segala masalah kebahasaan dan kesastraan yang kita hadapi. Setelah mengalami perkembangan selama hampir tiga puluh tahun, lembaga resmi ini menjelma sebagai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sejak tahun 1975.

Sejarah dan perkembangan lembaga resmi yang diberikan tugas menangani masalah kebahasaan kita itu sampai akhirnya menjelma sebagai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti yang kita miliki sekarang pada dasarnya mencerminkan sejarah dan perkembangan kesadaran nasional kita mengenai peranan bahasa baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah di dalam hubungan dengan kehidupan kebudayaan kita. Oleh karena itu, penerbitan buku *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* ini saya sambut dengan sangat gembira.

Mudah-mudahan buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh segenap lapisan masyarakat kita.

Prof. Dr. Ida Bagus Mantra



## **Sumpah Pemuda 1928 \***

### **Pertama :**

Kami putra dan putri Indonesia  
mengaku bertumpah darah yang  
satu, tanah Indonesia

### **Kedua :**

Kami putra dan putri Indonesia  
mengaku berbangsa satu,  
bangsa Indonesia

### **Ketiga :**

Kami putra dan putri Indonesia  
menjunjung bahasa persatuan,  
bahasa Indonesia

Jakarta, 28 Oktober 1928

---

\* Ejaan disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

## DAFTAR ISI

Buku I	HALAMAN
PRAKATA .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .....	iv
SUMPAH PEMUDA .....	vi
 1. Pendahuluan .....	 1
2. Dari Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan hingga Menjadi Lembaga Bahasa Nasional .....	4
2.1. Pendahuluan .....	5
2.2. Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO) .....	5
2.3. Panitia Pekerja .....	7
2.4. Balai Bahasa .....	7
2.5. Lembaga Bahasa dan Budaya .....	8
2.6. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan .....	11
2.7. Direktorat Bahasa dan Kesusastraan .....	13
2.8. Lembaga Bahasa Nasional .....	16
 3. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa .....	 22
3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	23
3.1.1 Bagian Tata Usaha .....	26
3.1.2 Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah .....	27
3.1.3 Bidang Sastra Indonesia dan Sastra Daerah .....	28

3.1.4	Bidang Perkamusan dan Peristilahan . . . . .	28
3.1.5	Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra . . . . .	30
3.1.6	Balai Penelitian Bahasa . . . . .	31
3.2	Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan . . . . .	33
3.2.1	Kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . . . . .	34
3.2.2	Kegiatan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah . . . . .	37
3.2.3	Kegiatan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah . . . . .	56
3.3	Perpustakaan, Laboratorium Fonetik, dan Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . . . . .	58
3.3.1	Perpustakaan . . . . .	58
3.3.2	Laboratorium Fonetik . . . . .	62
3.3.3	Gedung . . . . .	63

## LAMPIRAN

I.	Susunan Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . . . . .	68
II.	Bagan Organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . . . . .	69
III.	Pejabat-pejabat Pimpinan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa . . . . .	70
IV.	Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Bahasa . . . . .	71
V.	Bagan Organisasi dan Tugas Pokok Bidang Bahasa . . . . .	72
VI.	Bagan Organisasi dan Tugas Pokok Bidang Sastra . . . . .	73
VII.	Bagan Organisasi dan Tugas Pokok Bidang Perkamusan dan Peristilahan . . . . .	74
VIII.	Bagan Organisasi dan Tugas Pokok Bidang Pengem- bangan Bahasa dan Sastra . . . . .	75
IX.	Tabel A Surat Masuk Keluar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Tahun 1977 . . . . .	76
	Tabel D Dokumentasi Perpustakaan Tahun 1974 - 1977 . . . . .	76
X.	Tabel B Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah . . . . .	77
XI.	Tabel G Penerbitan Bahan Informasi Tahun 1974-1977 . . . . .	78



XII.	Tabel E Pengunjung Perpustakaan Tahun 1974—1977 .....	79
XIII.	Grafik A Surat Masuk Keluar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Tahun 1977 .....	80
XIV.	Grafik B Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Tahun 1974/1975 — 1977/1978 .....	81
XV.	Grafik C Penerbitan Bahan Informasi Tahun 1974—1977 .....	82
XVI.	Grafik D Dokumentasi Perpustakaan Tahun 1974—1977 .....	83
XVII.	Grafik E Pengunjung Perpustakaan Tahun 1974—1977 .....	84
XVIII.	Grafik F Keadaan Pegawai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Tahun 1974—1978 .....	85
XIX.	Grafik G Realisasi Biaya Tahun 1974—1978 .....	86
XX.	Lokasi Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa .....	87
XXI.	Denah Kantor Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Diponegoro 82, Jakarta Pusat .....	88
XXII.	Denah Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur .....	89

## Buku II

### Halaman

Pengantar .....	98
1. Tujuan dan Sejarah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (S. Takdir Alisjahbana) .....	99
2. Beberapa Pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dan Daerah (S. Effendi) .....	111
3. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Kewajiban dan Tanggung Jawab Seluruh Rakyat (Ki Soeratan) .....	119

4. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam Ilmu dan Teknologi (Samsuri) . . . . .	127
5. Bahasa sebagai Sarana Komunikasi Sosial suatu Bangsa (Astrid S. Susanto) . . . . .	139
6. Pengambilan Keputusan dalam Pembinaan Bahasa (Harimurti Kridalaksana) . . . . .	151
7. Kebijakan Pengembangan Sastra Indonesia (Lukman Ali) . . . . .	157
8. Dokumentasi Kesusastraan Indonesia (H.B. Jassin) . . . . .	169
9. Beberapa Masalah Prasarana Sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Maman Sumantri) . . . . .	173
10. Dua Pedoman Pelengkap Pembentukan Istilah (Anton M. Moeliono) . . . . .	187
11. Pedoman ISO-R 704—1969 tentang Asas-asas Penanaman (Saduran Ringkas) . . . . .	196

# 1

## Pendahuluan

## 1. PENDAHULUAN

Bahasa dan sastra sebagai unsur kebudayaan nasional dan sarana budaya bangsa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan berdasarkan kebijaksanaan nasional tentang bahasa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dan penjelasannya, yaitu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, dan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dilindungi dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.

Pemakaian dan pengajaran bahasa asing yang lazim dipakai dalam hubungan antarbangsa pada umumnya, terutama dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam lingkungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, serta dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi modern perlu diarahkan untuk kepentingan nasional dan dimanfaatkan sebagai satu sumber untuk pengembangan bahasa nasional.

Sejalan dengan kebijaksanaan nasional tentang bahasa tersebut, pada tahun 1946 Pemerintah telah membentuk lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa. Lembaga tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa yang akhirnya pada tahun 1975 menjadi "Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa." Hal ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa seluruh permasalahan bahasa di Indonesia yang mencakup (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pengajaran bahasa asing yang merupakan masalah nasional perlu diolah dan digarap secara teliti, menyeluruh, berkesinambungan, dan terarah, serta dilakukan sejak kurang lebih setengah abad yang lalu melalui kegiatan-kegiatan :

- a. Pertemuan-pertemuan resmi yang bersifat nasional seperti :
  - 1) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Jakarta;
  - 2) Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Surakarta;
  - 3) Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan;
  - 4) Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia tahun 1966 di Jakarta;
  - 5) Seminar Bahasa Indonesia tahun 1968 di Jakarta;
  - 6) Seminar Bahasa Indonesia tahun 1972 di Puncak Pass;
  - 7) Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 di Jakarta;
  - 8) Seminar Pengembangan Sastra Indonesia tahun 1976 di Jakarta;
  - 9) Seminar Pengembangan Sastra Daerah tahun 1975 di Jakarta;
  - 10) Seminar Bahasa Daerah tahun 1976 di Yogyakarta;
  - 11) Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah tahun 1977 di Jakarta; dan
  - 12) Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 1978 di Jakarta;
- b. Pelaksanaan program kerja lima tahun pengembangan bahasa dan sastra dalam Repelita II (1974–1978) melalui Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah serta Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- c. Penyusunan rencana induk pengembangan bahasa dan sastra dalam Repelita III.

Semua usaha penggarapan masalah (1) bahasa nasional, (2) bahasa daerah, dan (3) pengajaran bahasa asing tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia luar pada umumnya. Di samping itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa belum begitu dikenal oleh masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka disusunlah buku *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada masyarakat luas tentang (1) lembaga resmi yang menangani permasalahan bahasa pada masa lampau dan (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan segala bidang garapannya.

**2**

**Dari Lembaga Penyelidikan Bahasa  
dan Kebudayaan hingga Menjadi  
Lembaga Bahasa Nasional**

## **2. DARI LEMBAGA PENYELIDIKAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN HINGGA MENJADI LEMBAGA BAHASA NASIONAL**

### **2.1 Pendahuluan**

Sumpah Pemuda, yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika bangsa Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah Belanda, membuktikan bahwa masalah kebahasaan telah menjadi perhatian orang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Hal itu merupakan satu tanda bahwa bahasa Indonesia sebagai sarana persatuan sudah sejak lama mempunyai kedudukan penting di Indonesia ini.

Bagi bangsa asing, bahasa Indonesia merupakan sarana yang sangat penting untuk mengenal bangsa dan kebudayaan Indonesia. Hal ini terbukti dari usaha penelitian dalam bidang bahasa dan kebudayaan yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Belanda baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Sejarah telah mencatat bahwa di sekitar tahun 30-an pihak pemerintah Belanda sudah mulai mengadakan penelitian tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Penelitian-penelitian ini disalurkan melalui Lembaga Pendidikan Universiter, *Kantoor voor Inlandsche Zaken, en Oudheidkundige Dienst*.

Usaha swasta sejak tahun 1930 diwakili oleh Yayasan Matthes, yang pada tahun 1955 berubah namanya menjadi Yayasan Sulawesi Selatan Tenggara yang berkedudukan di Makasar (sekarang: Ujungpandang). Yayasan ini bertujuan mengadakan penelitian mengenai bahasa dan kebudayaan daerah Makasar. Selain Yayasan Matthes, ada lagi yayasan yang mem-

punya tujuan sama, yaitu Yayasan Kirtya Lieftrinck van der Tuuk yang berkedudukan di Singaraja, Bali, di bawah pimpinan Dr. R. Goris.

Kedua yayasan ini akhirnya bekerja sama dengan cabang-cabang lembaga yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## 2.2 Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek (ITCO).

Dari masa ke masa, peristiwa bahasa dan kebudayaan Indonesia ini menarik perhatian para sarjana sehingga pada tahun 1947 Fakultas Sastra dan Filsafat — yang pada saat itu berada di bawah naungan *Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen* (Kementerian Pengajaran, Kesenian dan Ilmu Pengetahuan) — meresmikan pembentukan suatu lembaga yang disebut *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) yang bertujuan menampung kegiatan ilmiah suatu universitas, terutama dalam bidang bahasa dan kebudayaan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang promotor, yaitu Prof. Dr. G.J. Held. Kemudian beliau menjadi pemimpin umum.

Lembaga ini mempunyai tiga bagian, yaitu: (1) Bagian Ilmu Kebudayaan, dipimpin oleh Prof. Dr. G.J. Held, (2) Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan, dipimpin oleh Prof. Dr. C. Hooykaas, dan (3) Bagian Leksikografi yang dipimpin oleh W.J.S. Poerwadarminta.

Dalam Bagian Ilmu Kebudayaan tercatat Mr.H.Th. Chabot yang bertugas menyelidiki adat dan Dr. F.A.E. van Wouden sebagai petugas bahasa. Sebagai petugas dalam Bagian Ilmu Bahasa dan Kesusastraan tercatat Dr. R. Goris yang terus menyumbangkan tenaganya sampai masa pensiun. Petugas lain yang cukup besar sumbangannya dalam dunia bahasa dan sastra Indonesia hingga masa kini adalah Prof. Dr. A. Teeuw, Prof.Dr.P.Voorhoeve, dan Prof.Dr.R.Roolvink. Dalam bagian leksikografi diperbantukan para ahli penyelidik seperti Prof. Dr. P. Voorhoeve, Dr.R.Goris, Dr.F.A.E. Van Wouden, Mr.H.Th. Chabot, Prof.Dr.H. Uhlenbeck Prof. Dr. A. Teeuw, dan Prof. Dr. R. Roolvink.

Kegiatan yang dilakukan ITCO selain penelitian bahasa dan kebudayaan, juga penyalinan kembali naskah yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari Yayasan Kirtya Lieftrinck van der Tuuk, naskah yang berasal dari Sono Budoyo, Yogyakarta, dan naskah-naskah dari Yayasan Matthes, Makasar. Di samping itu ITCO juga membuat film tentang tulisan-tulisan sastra daerah, seperti Aceh, Batak Simalungun, Melayu, Makasar, dan Bugis. Selanjutnya ITCO melakukan tukar-menukar film dengan beberapa





diharapkan. Baru beberapa bulan setelah Pemerintah Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Santoso menugasi R.T. Amin Singgih Tjitrosomo untuk menyiapkan pembentukan lembaga bahasa secara lengkap. Beberapa bulan setelah itu, dibentuklah suatu lembaga otonom yang berada langsung di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Lembaga tersebut bernama Balai Bahasa, yang diresmikan pada bulan Maret 1948 di Yogyakarta atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Ali Sastroamidjojo, tanggal 26 Februari 1948 No. 1532/A. Pimpinan umum Balai Bahasa ini mula-mula adalah P.F. Dahler alias Amin Dahlan. Karena ia meninggal dunia, ia diganti oleh Prof. Dr. Prijana setelah didahului oleh R.T. Amin Singgih Tjitrosomo sebagai pejabat sementara. Sekretaris Balai Bahasa tersebut adalah I.P. Simandjuntak. Balai Bahasa ini mempunyai empat seksi, yaitu (1) Seksi Bahasa Indonesia, dipimpin oleh St. Moh. Zain; (2) Seksi Bahasa Jawa, dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja; (3) Seksi Bahasa Sunda, dipimpin oleh R. Iskak Adiwidjaja; dan (4) Seksi Bahasa Madura, yang dipimpin oleh Suro Widjojo.

Pada saat itu Balai Bahasa sudah mempunyai kantor cabang yang berkedudukan di Bukittinggi.

Tugas dan kegiatan Balai Bahasa ialah (1) meneliti bahasa Indonesia dan daerah, baik lisan maupun tulisan, baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak dipergunakan lagi; (2) memberi petunjuk dan pertimbangan mengenai kebahasaan kepada masyarakat; dan (3) membina bahasa. Kegiatan lain yang perlu dicatat ialah penerbitan majalah yang berjudul *Medan Bahasa* yang memuat hal-hal tentang bahasa Indonesia dan Daerah.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua tanggal 28 Oktober 1954 di Medan, Prof. Dr. Prijana selaku pemimpin umum Balai Bahasa memberikan prasaran tentang rencana perubahan ejaan bahasa Indonesia, yang menghasilkan kesimpulan bahwa "perlu dibentuk oleh pemerintah suatu panitia ejaan yang akan menyusun ejaan bahasa Indonesia."

## 2.5 Lembaga Bahasa dan Budaya

Seperti telah disebutkan di muka, Balai Bahasa adalah salah satu bagian Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Akan tetapi, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ke-

budayaan tanggal 1 Agustus 1952, Balai Bahasa ini dijadikan bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Tugas Balai Bahasa yang sudah menjadi bagian Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa dan Budaya, yang merupakan gabungan dari Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan (ITCO) dan Bagian Penyelidikan Bahasa, Balai Bahasa, Jawatan Kebudayaan.

Pimpinan Lembaga Bahasa dan Budaya ialah Prof.Dr. Prijana yang merangkap sebagai Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Akan tetapi, sejak tanggal 1 Mei 1957—berhubung beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan—jabatan pimpinan Lembaga dipegang oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat yang juga merangkap sebagai guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jabatan sekretaris umum dipegang oleh Darsan Martadarsana yang pada tahun 1956 diganti oleh Sjair. Pada tahun 1958 Sjair diganti oleh Dra. Lukijati Gandasubrata karena masa pensiunnya sudah tiba.

Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai struktur organisasi yang lebih baik daripada Balai Bahasa. Lembaga Bahasa dan Budaya mempunyai tujuh bagian dengan tiga cabang. Bagian-bagian tersebut yaitu : (1) Bagian Penyelidikan Bahasa dan Penyusunan Tata Bahasa, dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana; (2) Bagian Leksikografi, dipimpin oleh W.J.S. Poerwadarminta; (3) Bagian Penyelidikan Kebudayaan, dipimpin oleh Prof.Dr.G.J. Held; (4) Bagian Komisi Istilah, dipimpin oleh Prof.Dr.Prijana dengan wakil Nur Sutan Iskandar (5) Bagian Penyelidikan Kesusastraan, dipimpin oleh Drs. H.B. Jassin; (6) Bagian Perpustakaan, dipimpin oleh Dr. E.M.A.A.J.A. Allard; (7) Bagian Terjemahan, dipimpin oleh M. Rasjad St. Suleman, S.H. yang bertindak sebagai koordinator. Cabang-cabangnya berkedudukan di tiga kota, yaitu : (1) Cabang Yogyakarta, yang dipimpin oleh Tardjan Hadidjaja; (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Dr. R. Goris (yang sudah menjadi pemimpin penelitian bahasa dan kebudayaan di Bali sejak tahun 1947, yaitu ketika instansi itu masih merupakan cabang (ITCO)); dan (3) Cabang Makasar — sekarang bernama Ujungpandang — dipimpin oleh Abdurrachim yang bertindak sebagai koordinator.

Tugas Lembaga Bahasa dan Budaya meliputi (1) penyelidikan dan penelitian bahasa persatuan, bahasa daerah, dan kebudayaan-kebudayaan di Indonesia; (2) penyusunan tata bahasa; (3) penyusunan kamus bahasa Indonesia dan daerah; (4) pengumpulan dan penetapan istilah berbagai ilmu pengetahuan; (5) penyelenggaraan terjemahan buku-buku untuk

perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan umum; dan (6) penyebaran hasil penelitian.

Di samping kegiatan penelitian dan pengembangan, Lembaga Bahasa dan Budaya juga menerbitkan sebuah majalah dua bulanan yang berjudul *Bahasa dan Budaya*. Dewan redaksinya terdiri dari sebelas orang yang dipimpin oleh Prof. Dr. Prijana. Majalah ini terbit atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 27 Desember 1952, No. 49032/Kab. Isinya bersifat ilmiah populer dan memuat hasil penelitian tentang bahasa Indonesia dan daerah, serta kebudayaan Indonesia baik yang dihasilkan pusat maupun cabang-cabang. Di samping itu, majalah itu juga memuat istilah-istilah yang telah disahkan oleh Komisi Istilah. Adapun tujuan lembaga menerbitkan majalah ini ialah (1) mewujudkan hubungan nyata antara Universitas Indonesia dengan masyarakat; (2) menanamkan rasa cinta dan minat terhadap bahasa persatuan dan kebudayaan Indonesia; (3) membantu para peminat bahasa dan kebudayaan mendapatkan bacaan ilmiah populer tentang bahasa dan budaya; (4) merangsang masyarakat peminat bahasa dan kebudayaan untuk menulis dan memuat tulisan-tulisan mereka, baik berupa tulisan asli, saduran, maupun terjemahan; ke dalam majalah tersebut; (5) memberi kesempatan tanya jawab mengenai soal-soal kebudayaan dan kebahasaan; dan (6) menyebarkan hasil penelitian.

Penerbitan hasil-hasil kegiatan kebahasaan meliputi: *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Poerwadarminta cetakan I (1952) dan II (1954); majalah dua bulanan *Bahasa dan Budaya* (1952); *Prasasti Bali I dan II* oleh Dr. R. Goris (1954); *Kamus Istilah Kedokteran* oleh Komisi Istilah (1954); *Kamus Istilah Kehewanian* oleh Komisi Istilah (1956); *Kamus Istilah Teknik* oleh Komisi Istilah (1956); *Kamus Istilah Pelayaran* oleh Komisi Istilah (1956); *Intisari Tatanama Kimia Anorganik dan Kimia Organik beserta Kamus Istilah Kimia* oleh Komisi Istilah (1956); *Kamus Istilah Kerajinan Wanita* oleh Komisi Istilah (1957); *Kamus Istilah Hukum* oleh Komisi Istilah (1958); *Kamus Istilah Pendidikan, Pengajaran, dan Ilmu Jiwa* oleh Komisi Istilah (1958); *Pedoman Pembentukan Istilah Kimia* oleh Komisi Istilah (1958).

Jika diperhatikan penerbitan di atas, tampak sekali bahwa hasil kerja Komisi Istilah cukup banyak. Pada saat itu memang Komisi Istilah — sejak tanggal 1 Juni 1951 sudah digabungkan dengan Balai Bahasa Jawatan Kebudayaan, dan tahun 1952 dimasukkan ke dalam Lembaga Bahasa dan Budaya — bekerja sangat aktif.

Komisi Istilah mempunyai 16 seksi yang masing-masing seksi terdiri dari 3 sampai 12 orang ahli. Komisi ini langsung diketuai oleh Prof. Dr. Prijana (1950–1957) yang kemudian diganti oleh Prof. Dr. P.A. Hoesein Djajadiningrat (1957–1960). Pada tahun 1960–1962 jabatan pimpinan dipegang oleh Dra. Lukijati Gandasubrata. Jabatan wakil ketua Komisi Istilah dipegang oleh Nur Sutan Iskandar yang aktif bekerja sejak tahun 1950 sampai tahun 1960. Jabatan sekretaris umum berturut-turut dipegang oleh St. Muh. Said, A.W. Djumena, R.A. Datuk Besar, dan Dra. Moliar Achmad.

## 2.6. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, tanggal 1 Juni 1959 No. 69626/B/S, Lembaga Bahasa dan Budaya diganti namanya menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Sejak itu Lembaga tersebut beserta cabang-cabangnya terlepas dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan langsung berada di bawah Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Bagian Bahasa, Jawatan Kebudayaan dilebur dan pegawainya dimasukkan ke dalam Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Demikian pula sejak bulan Juni 1964, Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah, Jawatan Pendidikan Umum juga dimasukkan ke dalam Lembaga itu. Dengan demikian, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan itu merupakan gabungan dari Lembaga Bahasa dan Budaya dan Kesusastraan itu merupakan gabungan dari Lembaga Bahasa dan Budaya yang berada di bawah Fakultas Sastra, Bagian Bahasa dari Jawatan Kebudayaan, dan Urusan Pengajaran Bahasa Indonesia dan Daerah dari Jawatan Pendidikan Umum.

Pimpinan pertama Lembaga Bahasa dan Kesusastraan ini adalah Prof. Dr. P.A. Husein Djajadiningrat, dengan sekretaris Umum Dra. Lukijati Gandasubrata. Pada tahun 1960 jabatan pimpinan umum dipegang oleh sekretaris umum, karena pimpinan umum meninggal dunia. Pada tahun 1962 Dra. Moliar Achmad menjabat kepala lembaga karena Dra. Lukijati Gandasubrata pindah ke Semarang. Pada tahun 1966, pimpinan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan itu diganti oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi.

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan terdiri atas delapan urusan, yakni sebagai berikut.

- a. Urusan Tata Bahasa, dipimpin berturut-turut oleh Drs. Slamet Muljana, T.W. Kamil, M.A., Drs. Nurdin Achmad, dan Drs. Basuki Suhardi.

- b. Urusan Peristilahan, dipimpin oleh Dra. Moliar Achmad, dan kemudian oleh Dra. Sri Timur Suratman.
- c. Urusan Kesusastraan Indonesia Modern, dipimpin oleh Drs. H. B. Jassin, kemudian oleh Drs. Lukman Ali.
- d. Urusan Kesusastraan Indonesia Lama, berturut-turut dipimpin oleh Dra.S.W. Rujati Mulyadi, Drs. Sardanto Tjokrowinoto, dan Soelastri Soerjoatmojo.
- e. Urusan Bahasa Daerah, dipimpin berturut-turut oleh Dra.S.W. Rujati Mulyadi, Drs. Husein Widjajkusumah, Dra. Sri Sukesi Adiwimarta, Drs. Djajuli, dan Drs. Ramli Harun.
- f. Urusan Perkamusan, dipimpin oleh Drs.A.M. Moeliono, M.A. kemudian oleh Drs. Koentamadi.
- g. Urusan dokumentasi dan Penerbitan, dipimpin oleh Drs.Husein Widjajakusumah, kemudian oleh Soelastri Soerjoatmodjo, dan terakhir oleh Drs. Munawar.
- h. Urusan Terjemahan, dipimpin berturut-turut oleh Dra. Lukijati Gandasubrata, Hoedi B.A., dan Suntari Suntoro.

Cabang-cabang Lembaga Bahasa dan Kesusastraan tetap berjumlah tiga buah, yaitu (1) Cabang Yogyakarta, dipimpin oleh Drs. Mudjanattistomo, (2) Cabang Singaraja, dipimpin oleh Drs. Suwito Santoso, kemudian diganti oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, dan (3) Cabang Makasar, dipimpin berturut-turut oleh A. Tenriadji, Moh. Nur dan Ahmad Rahman.

Lembaga Bahasa dan Kesusastraan mempunyai tugas yang hampir tidak berbeda dengan tugas Lembaga Bahasa dan Budaya. Lembaga ini bertugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penelitian dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; (3) mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi lain di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan; (4) mengadakan simposium, seminar, dan diskusi tentang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; (5) memberi penerangan, pertimbangan, dan saran kepada masyarakat dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; dan (6) menyelenggarakan penerbitan.

Setelah berubah menjadi Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, kegiatan lembaga ini tampak lebih maju daripada sebelumnya. Pada tanggal 7 Mei 1966 dibentuklah sebuah Panitia *Crash Program* Ejaan Bahasa Indonesia, yang anggotanya adalah ahli-ahli bahasa di Lembaga Bahasa dan Kesusas-

traan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Drs. Anton M. Moeliono, M.A. bertindak sebagai ketua dan Dra. S.W. Rujiati Mulyadi sebagai wakil ketua. Jabatan sekretaris I dipegang oleh Dra. Sri Timur Suratman, sedangkan jabatan sekretaris II dipegang oleh Drs. Basuki Suhardi. Anggota-anggotanya adalah Djoko Kentjono, M.A., Drs. Harimurti Kridalaksana, Drs. Lukman Ali, Drs. S. Effendi menggantikan Drs. Sardanto Tjokrowinoto. Panitia ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan tanggal 19 September 1967, No. 062/1967. Panitia ini telah menyusun konsep ejaan yang kemudian diterbitkan oleh Dian Rakyat dengan judul *Ejaan Baru Bahasa Indonesia*, 1967.

Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-36, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan bekerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta menyelenggarakan simposium bahasa dan kesusastraan dengan tema "Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru." Yang dibahas dalam simposium ini meliputi bidang kebahasaan dan pengajaran bahasa dan sastra. Dalam kesempatan simposium itu diadakan pula kegiatan pameran dokumentasi bahasa dan sastra. Hasil simposium itu berupa buku yang pada tahun 1967 diterbitkan oleh Gunung Agung dengan judul *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* dengan editor Drs. Lukman Ali. Sebelum itu, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan telah menerbitkan 2 buah buku yaitu *Syair Putri Akal* (1965) yang disusun oleh Urusan Penelitian dan Penyusunan Kesusastraan Lama, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan *Studi Bidang Kehidupan Desa di Pinggiran Jakarta* (1965) yang disusun oleh Tim Kerja Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Penerbitan hasil-hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan meliputi: *Kamus Istilah Pertanian, dan Perikanan* oleh Komisi Istilah (1960); *Kamus Istilah Ekonomi/Ketuangan* oleh Komisi Istilah (1960); *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cetakan III oleh W.J.S. Poerwadarminta (1961); *Kamus Istilah Kimia/Farmasi Inggris-Indonesia-Jerman-Belanda* oleh Komisi Istilah (1965); *Syair Putri Akal* oleh Urusan Kesusastraan Lama LBK (1965); *Studi Bidang Kehidupan Desa di Pinggiran Jakarta* oleh Tim Kerja LBK dan Fakultas Sastra UI (1966); *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia, sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru* oleh LBK bersama Fakultas Sastra UI, IKIP Jakarta, dan KASI Jaya (1966); *Ejaan Baru Bahasa Indonesia* oleh Panitia Ejaan LBK (1966); *Kamus Istilah Bahasa dan Kesusastraan* oleh Komisi Istilah (1966).

## 2.7 Direktorat Bahasa dan Kesusastraan

Setelah tiga tahun Lembaga Bahasa dan Kesusastraan diresmikan, atas dasar Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 November 1966 No. 75/V/kep/ii/1966, lembaga tersebut diubah lagi namanya menjadi **Direktorat Bahasa dan Kesusastraan** di bawah pimpinan Dra. S.W. Rujati Mulyadi.

Direktorat Bahasa dan Kesusastraan ini berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Struktur organisasi yang ada pada direktorat ini lebih sederhana daripada yang ada pada Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Direktorat Bahasa dan Kesusastraan mempunyai bagian-bagian sebagai berikut.

- a. Dinas Bahasa Indonesia, dikepalai oleh Drs. S. Effendi.
- b. Dinas Kesusastraan Indonesia, dikepalai oleh Drs. Lukman Ali.
- c. <sup>a</sup>Dinas Bahasa dan Kesusastraan Daerah, dikepalai oleh Drs. Koen-tamadi.
- d. Dinas Bahasa dan Kesusastraan Asing, dikepalai oleh Chusaeri.
- e. Dinas Peristilahan dan Perkamusan, berturut-turut dikepalai oleh Dra. Sri Timur Suratman (November 1966 – Mei 1967), oleh Dra. Sri Sukesu Adiwimarta (Juni 1967 – Mei 1969).
- f. Sekretariat, berturut-turut dikepalai oleh Hermanu Maulana (November 1966 – Mei 1967), Dra. S.W. Rujati Mulyadi (Mei – Juli 1967) ketika jabatan pimpinan Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dipegang oleh Chusaeri; dan Hermanu Maulana.

Masing-masing dinas tersebut terdiri dari lima seksi yang membantu di dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas itu.

Tugas Direktorat Bahasa dan Kesusastraan meliputi: (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang-bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan kepustakaan; (2) mengadakan penyelidikan dan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah sebagai bahan untuk memperlancar tugas, yang dapat diselenggarakan bersama-sama dengan instansi-instansi di dalam lingkungan departemen dan badan-badan/organisasi-organisasi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri; (3) membantu mempertinggi mutu pengetahuan dan penguasaan bahasa asing, menerjemahkan hasil-hasil sastra dan unsur-unsur kebudayaan lainnya, baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa daerah ke dalam bahasa asing atau sebaliknya; (4) memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang masalah yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah



serta asing kepada instansi-instansi di dalam lingkungan departemen dan badan-badan, atau organisasi-organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (5) menyelenggarakan penerbitan dan mengabadikan hasil-hasil penyelidikan dan penelitian untuk kepentingan usaha-usaha pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan pada khususnya untuk kepentingan bangsa dan negara umumnya.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, terutama kegiatan dalam penyebaran informasi tentang ejaan. Pada bulan Juni 1967 Panitia Ejaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berkunjung ke Malaysia atas undangan Pemerintah Malaysia dalam rangka penyebaran dan pengembangan ejaan baru bahasa Indonesia. Pada tanggal 27 September 1967 Panitia ini juga turut serta dalam diskusi mengenai ejaan yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Pada tanggal 29 Oktober 1967 diselenggarakan ceramah mengenai ejaan yang dihadiri guru-guru SMP dan SMA di Yogyakarta. Pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1969, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan ikut dalam diskusi ejaan baru bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Peningkatan informasi mengenai ejaan bahasa Indonesia ini tidak hanya berlangsung di pusat saja. Di daerah pun dilaksanakan simposium ejaan (tanggal 13–15 Mei 1969) yang diselenggarakan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan Cabang Ujungpandang atas prakarsa Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Di samping itu, diselenggarakan pula pameran dokumentasi bahasa dan sastra pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 5 November 1967. Dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-40, pada tanggal 11 sampai dengan 18 Nopember 1968 – bersamaan dengan pembukaan Taman Ismail Marzuki – Direktorat Bahasa dan Kesusastraan juga menyelenggarakan pameran dokumentasi sastra Indonesia modern.

Bersamaan dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Ikatan Linguistik Indonesia, dan IKIP Jakarta, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan Seminar Bahasa Indonesia pada tanggal 26 – 28 Oktober 1968 di Jakarta. Seminar ini membicarakan masalah standardisasi, tata bahasa, dan penggunaan bahasa. Pembawa kertas kerja ialah Prof. S. Takdir Alisjahbana, S.H., Drs. Anton M. Moeliono, M.A., A. Latief, M.A., Dr. Samsuri, Drs. M. Ramlan, Djoko Kentjono, M.A., Drs. Umar Junus, Drs. A.M. Affandi, Hassan Ahmad (Malaysia), Drs. M.S. Hutagalung, dan Drs. Harimurti Kridalaksana. Hasil seminar ini telah diterbitkan oleh Nussa Indah, Ende, 1971, dengan judul *Seminar Bahasa Indonesia 1968*.

Beriringan dengan diselenggarakannya seminar itu, diadakan pula diskusi tentang kritik sastra pada tanggal 31 Oktober 1968 di Balai Budaya, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Bahasa dan Kesusastraan atas dasar kerja sama dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan Dewan Kesenian Jakarta. Kertas kerja yang berjudul "Tentang Kritik Sastra: Sebuah Pendirian Lagi" dari Direktorat Bahasa dan Kesusastraan dibawakan oleh Drs. S. Effendi. Kertas kerja dari Dewan Kesenian Jakarta dibawakan oleh Arief Budiman dan Goenawan Mohamad berjudul "Tentang Kritik Sastra." Kertas kerja dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang berjudul "Pendirian atas Pendirian tentang Kritik Sastra" dibawakan oleh Drs. J.U. Nasution.

Dalam usaha peningkatan mutu pengetahuan para pegawainya, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan menyelenggarakan kursus-kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Arab dengan memanfaatkan tenaga-tenaga Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, yaitu A.M. Almatsier, A. Latief, M.A., Dra. Saodah Nasution, Dra. S.W. Rujati Mulyadi, Hermanu Maulana, dan Drs. Muhadjir. Majalah Bahasa dan Budaya yang terhenti terbit sejak tahun 1963, mulai diterbitkan lagi tahun 1967 dalam bentuk stensilan dengan nama baru *Bahasa dan Kesusastraan*.

Penerbitan hasil-hasil kegiatan kebahasaan dan kesastraan meliputi: *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cetakan IV oleh W.J.S. Poerwadarminta (1966) majalah dua bulanan *Bahasa dan Kesusastraan* (1967); *Bahasa dan Kesusastraan Seri Khusus* [ No. I *Pagar Kawat Berduri* oleh Drs. M. Saleh Saad (1968); "Drama Usmar Ismail Api" oleh Drs. S. Effendi (1968); No. II *Memahami dan Menikmati Puisi* oleh Drs. E. Hutagalung (1968); No. III *Hikayat Bulan Berbelah* oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi (1968) ]; *Kritik Sastra* oleh DBK bersama Dewan Kesenian Jakarta (1968); *Pameran Dokumentasi Indonesia Modern* oleh DBK dan Dewan Kesenian Jakarta dengan bantuan IKAPI (1968); *Prasasti Baru Radja Ragadja* oleh Ktut Ginarsa (1968); *Arti Dongeng Bali dalam Pendidikan* oleh I Gusti Ngurah Bagus (1968); *Sumbangan Bahasa Bugis dan Makassar terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia* oleh Tim Riset Cabang DBK Makassar (1968); *Tembang Matjapat, Timbulnya, Daerah Pemakaiannya serta Penyebarannya* oleh Drs. Sardjono H.A. (1968).

## 2.8. Lembaga Bahasa Nasional

Atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mashuri, S.H. tahun 1969 No. 034/1969, mulai tanggal 27 Mei 1969 Direk-

torat Bahasa dan Kesusastraan namanya diganti dengan Lembaga Bahasa Nasional. Secara struktural, lembaga ini berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dra. S.W. Rujianti Mulyadi diangkat sebagai Kepala Lembaga Bahasa Nasional dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 035/1969. Selama bertugas di luar negeri (Leiden) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1970, Kepala Lembaga Bahasa Nasional dijabat oleh Drs. Lukman Ali.

Lembaga Bahasa Nasional mempunyai tugas (1) membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan daerah dalam bidang tata bahasa, peristilahan, perkamusan, sastra, dialek, terjemahan, dan keputakaan; (2) mengadakan penelitian setempat, seminar, simposium, dan musyawarah bersama-sama instansi-instansi lain dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan badan-badan dan organisasi-organisasi masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri; (3) memberikan bantuan, keterangan, pertimbangan dan nasihat mengenai masalah bahasa dan sastra Indonesia dan daerah kepada instansi-instansi dalam lingkungan Departemen dan badan-badan atau organisasi-organisasi masyarakat atau perorangan baik di dalam maupun di luar negeri; (4) menyelenggarakan penerbitan dan penyebaran hasil penelitian, untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan khususnya, bangsa dan negara Indonesia umumnya; (5) menyelenggarakan ketatausahaan selengkapnyanya; serta (6) memberi saran dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan demi kesempurnaan tugas pokok.

Tugas-tugas tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan ruang lingkup masalahnya. Bidang-bidang itu ialah :

- a. Bidang Bahasa Indonesia, dikepalai oleh Drs. S. Effendi;
- b. Bidang Sastra Indonesia, dikepalai oleh Drs. Lukman Ali;
- c. Bidang Bahasa dan Sastra Daerah, dikepalai oleh Drs. Koentamadi;
- d. Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dikepalai oleh Dra. Sri Timur Suratman;
- e. Bidang Penerjemahan, dikepalai oleh A.M. Almatsier; dan
- f. Sekretariat, dikepalai oleh Dra. Sri Sukesu Adiwimarta.

Kelima bidang dan sekretariat tersebut masing-masing mempunyai lima seksi yang dikepalai oleh seorang kepala seksi.

Menimbang bahwa tugas pembinaan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra nasional semakin meluas, maka dengan surat keputusan

an tanggal 1 Mei 1970, No. 038/1970, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan membentuk kembali cabang-cabang Lembaga Bahasa Nasional. Cabang-cabang tersebut ialah Cabang I di Singaraja, Cabang II di Yogyakarta, dan Cabang III di Makasar, Cabang I Singaraja dikepalai oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, Cabang II Yogyakarta dikepalai oleh Drs. Mudjanattistomo dan Cabang III Makasar dikepalai oleh Ahmad Rahman.

Kegiatan-kegiatan Lembaga Bahasa Nasional di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Seminar Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Dasar, Prasekolah, dan Pendidikan Luar Biasa di Jakarta pada bulan Maret 1970, dengan membawakan kertas kerja "Apresiasi Sastra Indonesia di Sekolah Dasar" oleh Drs. S. Effendi.
- b. Penyusunan antologi yang berisi sejumlah sajak perjuangan yang dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari Dr H.B. Jassin, Dra.S.W.Rujiati Mulyadi, Drs. Lukman Ali, Drs. Anita K. Rustapa, Drs. Djajanto Supraba, dan Lukman Hakim.  
Antologi ini diberi judul "Aku" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Trisno Sumardjo, 'Bibsy' Sunharjo, dan Moh. H. Salleh, M.A.
- c. Penerbitan majalah dalam bentuk stensil berjudul *Lembaga* untuk disebarikan kepada para guru. Majalah tersebut khusus berisi tulisan-tulisan mengenai pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pimpinan umum majalah ini adalah Drs. Lukman Ali, dengan Drs. S. Effendi sebagai pemimpin redaksinya.
- d. Penyelenggaraan ceramah Ajip Rosidi yang berjudul "Penelitian Kesusastraan Daerah" bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-42, 28 Oktober 1970.
- e. Penelitian tentang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di SMP dan SMA Jakarta pada bulan Februari – Mei 1970 sebagai tindak lanjut penandatanganan naskah kerja sama antara Lembaga Bahasa Nasional (diwakili oleh Drs. Lukman Ali) dengan Direktorat Pendidikan Menengah Umum (diwakili oleh Drs. Waskito T.S.) pada tanggal 29 Januari 1970. Penelitian dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas Drs. Lukman Ali (Ketua Umum), Drs.S.Effendi (Ketua Pelaksana), Lukman Hakim (Sekretaris), Dra.Ipon Sukarsih Purawidjaja, Drs.Djajanto Supraba, Drs.Muhadjir, dan Drs.Farid Hadi (para anggota), dibantu oleh tenaga-tenaga antara lain Djumariam, B.A. dan Dra. Atidjah Hamid.

- f. Penyelenggaraan ceramah pada tanggal 29 Oktober 1970 dengan pokok masalah "Bahasa Indonesia dalam Pendidikan dan Pengajaran," disampaikan oleh Drs. S. Effendi, yang pada waktu itu menjabat Ketua Bidang Bahasa Indonesia.
- g. Bekerja sama dengan Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Jakarta Raya dan Institut Agama Islam Negeri Jakarta, menyelenggarakan diskusi bahasa untuk guru-guru SMP dan SMA di Jakarta pada bulan Oktober 1971. Dalam diskusi dibahas kertas kerja "Tentang Mengarang dan Apresiasi Puisi di SMP dan SMA" oleh Drs. S. Effendi dari Lembaga Bahasa Nasional, "Kata-kata Bahasa Indonesia yang Berasal dari Bahasa Arab," oleh Drs. Sudarno dari Institut Agama Islam Negeri Jakarta, dan dua kertas kerja tanggapan masing-masing oleh Drs. Bakran Jacob dan Drs. Ramli Harun.
- h. Lokakarya penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (sekarang Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, BP3K) pada tahun 1971-1973 dalam rangka pelaksanaan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan di delapan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam kegiatan ini Drs. S. Effendi mewakili Lembaga Bahasa Nasional.
- i. Pembentukan Kelompok Teknis Bahasa yang diketuai oleh Drs. Lukman, Ali dalam kegiatan Panitia Pelaksana Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 No.03/A.I/72.
- j. Penyelenggaraan Seminar Bahasa Indonesia di Puncak Pass pada tanggal 2-3 Maret 1972 yang menghasilkan kesimpulan bahwa pembakuan bahasa perlu dilaksanakan guna mengatasi kekurangan-kekurangan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kebudayaan, ilmu, dan teknologi modern. Atas dasar seminar ini pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1972 menetapkan bahwa mulai tanggal 17 Agustus 1972 berlaku tata cara penulisan bahasa Indonesia menurut EYD. Kebijakan ini di-tuangkan dalam Surat Keputusan Presiden No. 57, tahun 1972.
- k. Penyelenggaraan Simposium Peristilahan di Jakarta pada tanggal 2-3 Desember 1972. Simposium ini diselenggarakan bersama oleh Lembaga Bahasa Nasional, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, IKIP Jakarta, LIPI, dan Dewan Kesenian Jakarta dengan bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Penyelenggaraan Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 26-30 Desember 1972. Sidang Majelis Bahasa

Indonesia—Malaysia ini selanjutnya diselenggarakan setahun dua kali dengan tempat persidangan berganti-ganti di Indonesia dan Malaysia.

- m. Penyelenggaraan Sarasehan Ejaan Bahasa Jawa di Yogyakarta, Bahasa Sunda di Bandung, dan Bahasa Bali di Singaraja.
- n. Bekerja sama dengan Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Pertama Jakarta, menyelenggarakan diskusi pengajaran bahasa Indonesia untuk guru-guru SMP Jakarta pada bulan Mei 1972. Diskusi ini membahas kertas kerja "Identifikasi Tujuan Kurikuler Pengajaran Bahasa Indonesia di SMP" oleh Drs. S. Effendi.
- c. Penelitian tentang soal-soal ujian bahasa Indonesia SMP dan SMA tahun 1950—1967 untuk mengetahui isi, organisasi, dan ragam bentuk ujian. Penelitian ini dilakukan oleh Drs. S. Effendi dan Drs. Farid Hadi pada tahun 1972. Hasilnya diterbitkan sebagai nomor khusus majalah *Bahasa dan Kesusastraan*.
- p. Penyusunan naskah "Daftar Pustaka" yang memuat informasi tentang buku dan artikel yang membicarakan atau bertalian dengan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Penyusunan dilakukan oleh sebuah tim pada tahun 1972/1975 dalam rangka memperlengkap daftar pustaka yang telah ada.
- q. Penyelenggaraan Seminar Pengajaran Bahasa Daerah (Bali, Sunda, Jawa) di Yogyakarta, pada tanggal 1—5 November 1973.
- r. Penelitian tentang imbuhan dalam bahasa Indonesia tertulis untuk memperoleh deskripsi tentang bentuk, distribusi, fungsi, dan maknanya melalui telaah data imbuhan yang terdapat dalam 6721 kalimat dari 12 sumber (buku cerita sastra, kumpulan puisi, pepatah, majalah ilmu sastra, dan surat kabar). Penelitian dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas Drs. S. Effendi (Ketua), Drs. Zulkarnain (Sekretaris/anggota), Djoko Kentjono, M.A., Drs. Sjahrul Sjarif, Drs. Farid Hadi, dan Dra. Ria Djuhariah (para anggota) dalam rangka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, tahun 1973/1974.
- s. Penyusunan naskah "Pedoman Pengajaran Bahasa Indonesia" yang berusaha menjelaskan antara lain perspektif pengajaran bahasa, cara pengorganisasi komponen pengajaran kemampuan bahasa, pengalaman belajar yang diperlukan anak didik, dan cara mengevaluasi hasil belajar anak didik. Penyusunan dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Drs. S. Effendi, dengan anggota Dr. Mulyanto Sumardi, Djoko Kentjono,

M.A., Drs. Muhadjir, Drs. Basuki Suhardi, Abdul Latief M.A., Drs. Djajanto Supraba, dan Dra. Yayah B. Lumintintang pada tahun 1973/1974.

- t. Penyelenggaraan Seminar Tata Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia di Pacet, Cipanas pada tanggal 18–22 Februari 1974.
- u. Penataran Leksikografi di Tugu, Bogor pada tanggal 9 Juni – 4 Agustus 1974; lima orang peserta penataran terbaik dipilih untuk melanjutkan belajar linguistik dan leksikografi di negara Belanda selama 8 bulan.
- v. Praseminar Politik Bahasa Nasional I di Jakarta, pada tanggal 29 – 31 Oktober 1974; Seminar Politik Bahasa -Nasional II di Jakarta, pada tanggal 25 – 28 Februari 1975.
- w. Pemberian kesempatan kepada para karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang profesinya masing-masing, dengan memberikan kesempatan belajar/mengajar, baik di dalam maupun di luar negeri, ikut secara aktif dalam kegiatan-kegiatan seminar, baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Nasional maupun oleh instansi-instansi lain.

Lembaga Bahasa Nasional ini kemudian terhitung mulai April tahun 1975 berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam rangka pelaksanaan reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 tahun 1974, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 tahun 1975.

### **3**

## **Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**



### 3. PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

#### 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 dan 45 tahun 1974, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk merumuskan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit-unit organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan di Wilayah. Atas dasar pertimbangan inilah maka lahirilah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 070/0 Tahun 1975 yang mengatur masalah susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan surat keputusan tersebut — Bab XI — maka secara resmi pada tanggal 1 April 1975 berdirilah instansi resmi pemerintah, instansi yang merupakan perubahan dan sekaligus penyempurnaan instansi-instansi Lembaga Bahasa Nasional, yang menangani masalah kebahasaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan nama *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berkedudukan sebagai unit pelaksana tugas dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra dan berada langsung di bawah Menteri. Tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala Pusat. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Masing-

masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Berdasarkan surat keputusan Menteri, No. 05/C/1975 dan No. 0216/C/1975, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipimpin oleh Dr. Amran Halim. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Maman Sumantri, B.A. Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah dipimpin oleh Drs. S. Effendi. Bidang Sastra Indonesia dan Sastra Daerah dipimpin oleh Drs. Lukman Ali. Bidang Perkamusan dan Peristilahan dipimpin oleh Dra. Sri Sukei Adiwimarta. Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dipimpin oleh Dra. S.W. Rujati Mulyadi.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai fungsi :

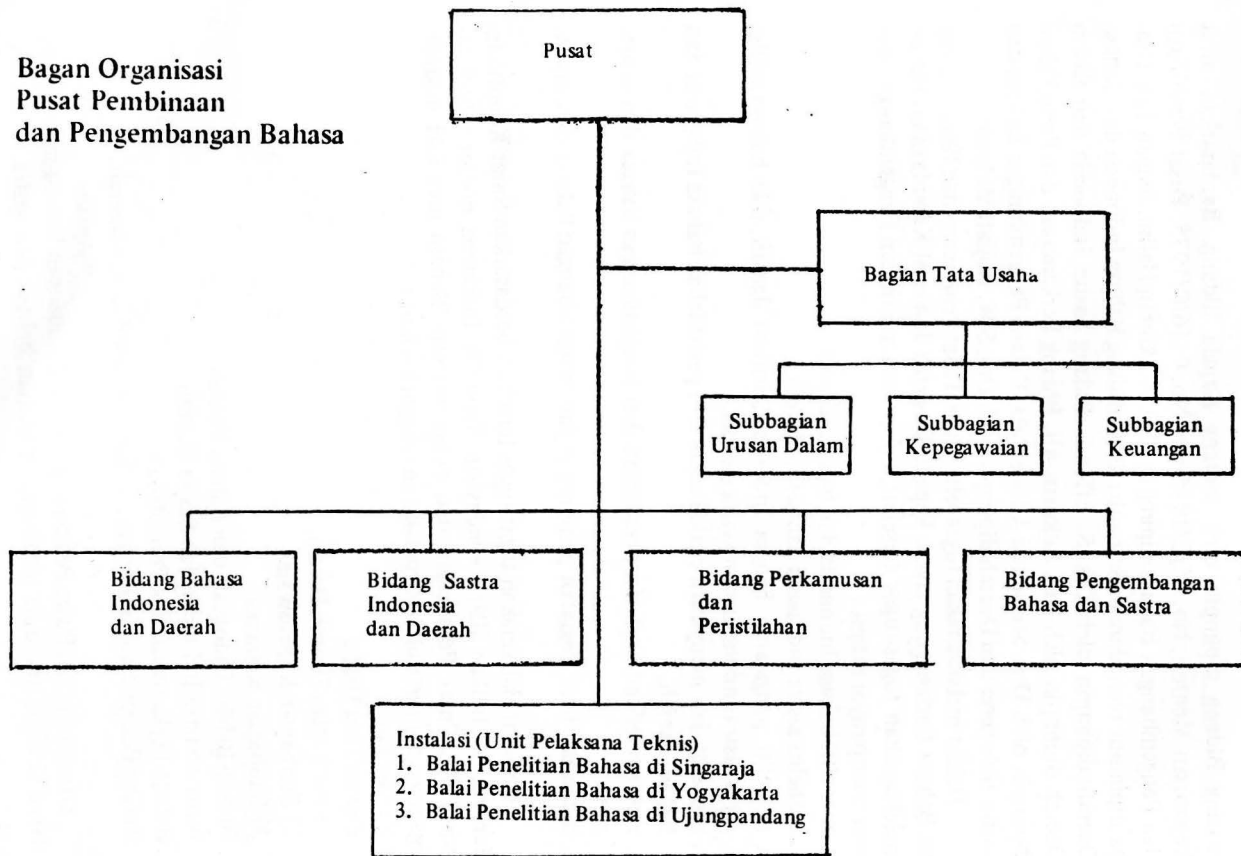
- a. meneliti bahasa Indonesia dan bahasa daerah,
- b. meneliti sastra Indonesia dan sastra daerah,
- c. meneliti pengajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, serta sastra Indonesia dan sastra daerah,
- d. meneliti dan menyusun perkamusan dan peristilahan bahasa Indonesia dan bahasa daerah,
- e. mengendalikan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, serta
- f. menelaah hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 079/9 tahun 1975, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memiliki susunan organisasi dengan unit-unit pelaksana sebagai berikut :

- a. Kepala Pusat
- b. Bagian Tata Usaha
  - 1) Subbagian Urusan Dalam
  - 2) Subbagian Kepegawaian
  - 3) Subbagian Keuangan
- c. Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
- d. Bidang Sastra Indonesia dan Sastra Daerah
- e. Bidang Perkamusan dan Peristilahan
- f. Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Di samping itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai instalasi sebagai unit-unit pelaksana penelitian bahasa dan sastra di daerah, yaitu :

**Bagan Organisasi  
Pusat Pembinaan  
dan Pengembangan Bahasa**



- a. Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta
- b. Balai Penelitian Bahasa di Singaraja
- c. Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang

Apabila dibagikan, susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah sebagai berikut.

#### Instalasi (Unit Pelaksana Teknis)

- 1. Balai Penelitian Bahasa di Singaraja
- 2. Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta
- 3. Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang

#### 3.1.1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat-menyurat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan menyiapkan laporan,
- b. melaksanakan pengurusan rumah tangga,
- c. melaksanakan pengurusan kepegawaian di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan
- d. melaksanakan pengurusan keuangan di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Bagian Tata Usaha itu memiliki tiga subbagian dengan masing-masing tugas sebagai berikut.

- a. Subbagian Urusan Dalam yang mempunyai tugas memberi pelayanan surat-menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor sesuai dengan kebutuhan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- b. Subbagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sesuai dengan kebijaksanaan Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan keuangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0216/C/1975, Subbagian Urusan Dalam dipimpin oleh Ny. Sukadariah Wahjudin, Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh Drs. Hasjmi Dini, dan Subbagian Keuangan dipimpin oleh Dewan M.S.

### **3.1.2. Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah**

Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah mempunyai tugas mengadakan penelitian guna pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah termasuk pembakuan serta pengajaran bahasa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah mempunyai fungsi :

- a. meneliti perkembangan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah,
- b. meneliti aspek bahasa Indonesia dan bahasa daerah termasuk dialek,
- c. meneliti pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah, dan
- d. membakukan bahasa Indonesia dan daerah.

Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi Bidang tersebut, dibentuklah satuan-satuan kerja berikut yang bersifat nonstruktural berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang digarap.

- a. Satuan Kerja Bahasa Indonesia yang menggarap (1) penelitian struktur, (2) penelitian kosakata, (3) penelitian perkembangan, (4) penelitian ragam bahasa/dialek, (5) penyusunan peta bahasa, dan (6) pengolahan hasil penelitian bahasa Indonesia.
- b. Satuan Kerja Bahasa Daerah yang menggarap (1) penelitian struktur, (2) penelitian kosakata, (3) penelitian perkembangan, (4) penelitian ragam bahasa/dialek, (5) penyusunan peta bahasa, dan (6) pengolahan hasil penelitian bahasa daerah.
- c. Satuan Kerja Pengajaran Bahasa Indonesia yang menggarap (1) penelitian kemampuan bahasa, (2) penelitian bahan/alat pengajaran/penyuluhan, (3) penelitian kurikulum/silabus, (4) penelitian sistem evaluasi dan pengukuran, (5) penelitian perkembangan, dan (6) pengolahan hasil penelitian pengajaran bahasa Indonesia.
- d. Satuan Kerja Pengajaran Bahasa Daerah yang menggarap (1) penelitian kemampuan bahasa, (2) penelitian bahan/alat-alat pengajaran, (3) penelitian kurikulum/silabus, (4) penelitian sistem evaluasi dan pengukuran, (5) penelitian perkembangan, dan (6) pengolahan hasil penelitian pengajaran bahasa daerah.

- e. Satuan Kerja Sarana Penelitian yang bertugas mengatur (1) pustaka/bahan kerja penelitian, (2) inventaris Bidang, (3) penyajian data statistik, dan (4) pencatatan kegiatan/laporan Bidang.

Satuan-satuan kerja dan bidang permasalahan yang digarap tersebut tampak jelas pada bagan organisasi dan tugas pokok Bidang pada lampiran V (halaman 72).

### 3.1.3 Bidang Sastra Indonesia dan Sastra Daerah

Bidang Sastra Indonesia dan Sastra Daerah mempunyai tugas mengadakan penelitian guna pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia dan daerah serta pengajaran sastra. Guna melaksanakan tugasnya, Bidang tersebut mempunyai fungsi :

- a. meneliti perkembangan sastra Indonesia dan sastra daerah,
- b. meneliti pengajaran sastra Indonesia dan sastra daerah, dan
- c. membina sastra Indonesia dan sastra daerah.

Untuk memperlancar pelaksanaan fungsi Bidang, dibentuklah satuan-satuan kerja yang bersifat nonstruktural berdasarkan cakupan permasalahannya yang digarap. Satuan-satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Satuan Kerja Sastra Indonesia Lama yang menangani masalah penelitian (1) naskah sastra Indonesia, (2) teori filologi, (3) sejarah sastra Indonesia lama, dan (4) isi dan bentuk karya sastra Indonesia lama.
- b. Satuan Kerja Sastra Indonesia Modern yang menggarap masalah penelitian (1) teori sastra Indonesia, (2) kritik sastra Indonesia, (3) sejarah sastra Indonesia modern, (4) sosiologi sastra Indonesia, serta (5) karya sastra Indonesia modern.
- c. Satuan Kerja Sastra Daerah yang mempunyai tugas meneliti (1) teori sastra daerah, (2) kritik sastra daerah, (3) sejarah sastra daerah, dan (4) karya-karya sastra daerah terbaik.
- d. Satuan Kerja Sastra Bandingan yang menggarap masalah penelitian (1) perbandingan sastra Indonesia-daerah, (2) sastra Indonesia-daerah, dan (3) bahan sastra daerah yang harus diterjemahkan.
- e. Satuan Kerja Pengajaran Sastra yang menggarap masalah penelitian (1) kemampuan apresiasi sastra, (2) bahan pengajaran sastra, (3) kurikulum pengajaran sastra, dan (4) evaluasi pengajaran sastra.
- f. Satuan Kerja Sarana Penelitian yang menggarap masalah pengaturan (1) bahan pustaka pegangan kerja penelitian, (2) inventaris Bidang, (3) Surat menyurat Bidang dan (4) pelaporan Bidang.

Jalanan kerja satuan-satuan kerja tersebut secara nyata tampak pada bagan organisasi dan tugas pokok Bidang pada lampiran VI (halaman . . . . 73)

### 3.1.4 Bidang Perkamusan dan Peristilahan

Bidang Perkamusan dan Peristilahan mempunyai tugas mengadakan pengumpulan dan penelitian kosa kata dan istilah untuk kepentingan penyusunan perkamusan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perkamusan dan Peristilahan mempunyai fungsi :

- a. meneliti dan menyusun istilah berbagai bidang ilmu dalam bahasa Indonesia;
- b. meneliti dan menyusun kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, dan kamus istilah; dan
- c. meneliti dan menyusun ensiklopedi bahasa Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah satuan-satuan kerja yang bersifat nonstruktural berdasarkan cakupan garapan yang menjadi tugas Bidang. Satuan-satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Satuan Kerja Perkamusan Indonesia yang mempunyai tugas meneliti (1) pustaka Indonesia untuk sumber bahan kamus Indonesia, (2) kosa kata bahasa Indonesia, (3) mengolah data untuk bahan naskah kamus Indonesia, (4) menyunting dan menyusun naskah kamus Indonesia, (5) mengerjakan kartotek perkamusan Indonesia, dan (6) merevisi kamus bahasa Indonesia.
- b. Satuan Kerja Perkamusan Daerah yang mempunyai tugas (1) meneliti pustaka daerah untuk sumber bahan kamus Indonesia, (2) meneliti kosa kata bahasa daerah, (3) mengolah data untuk bahan naskah kamus daerah, (4) menyunting dan menyusun naskah kamus bahasa daerah, dan (5) mengerjakan kartotek perkamusan daerah.
- c. Satuan Kerja Perkamusan Khusus yang mempunyai tugas (1) meneliti pustaka Indonesia dan asing untuk sumber bahan kamus khusus, (2) meneliti kosa kata bahasa Indonesia dan gambar-gambar, (3) mengolah data untuk bahan naskah kamus khusus, (4) menyunting dan menyiapkan naskah kamus khusus, dan (5) mengerjakan kartotek perkamusan khusus.
- d. Satuan Kerja Peristilahan yang mempunyai tugas (1) meneliti pustaka Indonesia, daerah, dan asing untuk sumber bahan istilah, (2) meneliti kosa kata dan istilah bahasa Indonesia, daerah, dan asing, (3) mengolah data istilah, (4) menyunting dan menyusun naskah kamus/daftar istilah, dan (5) mengerjakan kartotek peristilahan.

- e. Satuan Kerja Sarana Kerja Bidang yang mempunyai tugas mengatur (1) pustaka sarana kerja Bidang, (2) inventaris Bidang, (3) surat-menyurat, dan (4) pelaporan Bidang.

Hubungan kerja satuan-satuan kerja tersebut tampak pada bagan organisasi dan tugas pokok bidang pada lampiran VII ( halaman 74).

### **3.1.5 Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah**

Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas mengadakan usaha pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, pengembangan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, serta pengadaan perpustakaan sebagai sarana pengembangan kebahasaan dan kesastraan. Guna menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi :

- a. menyusun perumusan kebijaksanaan dalam pengembangan bahasa dan sastra,
- b. menyusun saran-saran dan pertimbangan mengenai pengajaran bahasa dan sastra di lembaga pendidikan,
- c. memilih karya sastra dan karya bahasa untuk diterjemahkan,
- d. menyusun bahan informasi mengenai pengembangan bahasa dan sastra,
- e. mengadakan perpustakaan dan dokumentasi kebahasaan, serta
- f. menerbitkan hasil penelitian dan penyusunan.

Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, dibentuklah satuan-satuan kerja yang bersifat nonstruktural. Satuan-satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Satuan Kerja Penyuluhan yang mempunyai tugas (1) mengolah penyelenggaraan penyuluhan bahasa dan sastra, (2) mengolah penyediaan bahan pertimbangan pengajaran bahasa dan sastra, dan (3) meneliti perkembangan penyuluhan bahasa.
- b. Satuan Kerja Penerbitan yang mempunyai tugas mengolah penyelenggaraan dan pengembangan penerbitan.
- c. Satuan Kerja Perpustakaan dan Dokumentasi yang mempunyai tugas (1) mengolah penyediaan bahan perpustakaan dan dokumentasi, (2) mengolah penyediaan bahan informasi, (3) mengolah pengembangan perpustakaan dan dokumentasi.
- d. Satuan Kerja Penerjemahan yang mempunyai tugas (1) mengolah bahan



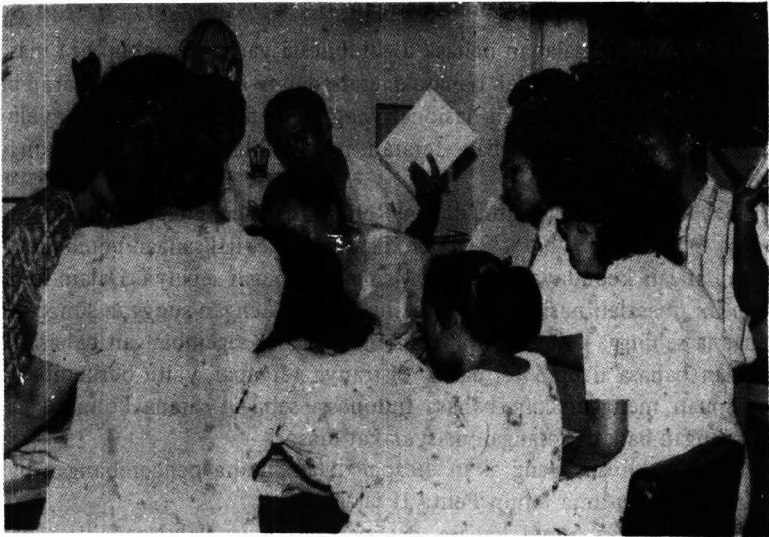
- untuk diterjemahkan, (2) meneliti perkembangan hasil terjemahan, dan (3) melakukan penerjemahan dalam bidang bahasa dan sastra.
- e. Satuan Kerja Pengajaran Bahasa Asing yang mempunyai tugas meneliti (1) motivasi belajar bahasa asing, (2) bahan dan alat pengajaran bahasa asing, (3) kurikulum pengajaran bahasa asing, (4) sistem evaluasi/pengukuran pengajaran bahasa asing, dan (5) sistem pendidikan dan pengajaran bahasa asing.
  - f. Satuan Kerja Pengembangan Kebijaksanaan yang mempunyai tugas (1) mengolah bahan informasi bagi pengembangan kebijaksanaan, dan (2) meneliti perkembangan pengembangan kebijaksanaan.

Hubungan kerja satuan-satuan kerja tersebut tampak jelas pada bagan organisasi dan tugas pokok pada lampiran VIII (halaman 75).

### 3.1.6 Balai Penelitian Bahasa

Menurut Pasal 964 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975, apabila dipandang perlu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat membentuk unit-unit penelitian bahasa dan sastra di daerah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara. Karena itu untuk pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra di daerah, dibentuklah unit-unit pelaksana penelitian yang merupakan instalasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, (2) Balai Penelitian Bahasa di Singaraja, dan (3) Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang. Balai Penelitian Bahasa tersebut bertugas membantu pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Jakarta dalam meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di daerahnya masing-masing.

Masing-masing Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0216/C/1975, Balai penelitian Bahasa di Yogyakarta dipimpin oleh Drs. Mudjanattistomo, Balai Penelitian Bahasa di Singaraja dipimpin oleh Drs. I Gusti Ngurah Bagus, dan Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang dipimpin oleh A. Rahman.



Rombongan peserta Kursus Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan mengunjungi Percetakan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.



Pameran Buku Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia di Wisma Tanah Air, wang, Jakarta; berlangsung pada tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 1978.

### 3.2 Kegiatan Kebahasaan dan Kesastraan

Seluruh permasalahan bahasa di Indonesia yang mencakup (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pengajaran bahasa asing, merupakan masalah nasional yang perlu digarap secara menyeluruh, teliti, berkesinambungan, dan terarah, serta dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berencana.

Sehubungan dengan itu, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/1975 – 1978/1979), telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah nasional yang perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah termasuk sastranya tercapai, yaitu berkembangnya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masyarakat luas.

Sasaran khusus yang akan dicapai dalam usaha pengembangan bahasa dan sastra selama lima tahun Pelita II ialah:

- a. pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan daerah, dan penyusunan istilah berbagai bidang ilmu dan teknologi;
- b. penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media massa;
- c. penerjemahan karya kesusasteraan daerah, kesusasteraan dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia;
- d. pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian, inventarisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan informasi; dan
- e. pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui pgnataran, sayembara mengarang, dan pemberian bea siswa serta hadiah penghargaan.

Di samping kegiatan-kegiatan khusus tersebut, dilakukan pula pengumpulan bahan-bahan tentang bahasa dan sastra serta kerja sama kebahasaan dengan instansi lain dan dengan luar negeri.

Mengingat begitu besar jangkauan dan sasaran yang akan dicapai, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk memanfaatkan dana pembangunan melalui proyek-proyek bahasa, yaitu Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indone-

sia dan Daerah. Jadi, di dalam pelaksanaan operasionalnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa beserta kedua proyek tersebut berusaha menurunkan pokok-pokok kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran yang di-tuangkan dalam Repelita II.

### 3.2.1 Kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, telah dilakukan serangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra. Serangkaian kegiatan itu dapat dikelompokkan dalam tiga kegiatan utama, yaitu (1) inventarisasi dan penelitian, (2) penulisan dan penyusunan, dan (3) penyuluhan bahasa Indonesia. Kegiatan lain yang tak kalah pentingnya dalam pembinaan dan pengembangan bahasa adalah kerja sama kebahasaan dengan instansi lain dan dengan luar negeri.

Uraian kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

#### a. Inventarisasi dan Penelitian

Kegiatan inventarisasi dan penelitian bertujuan mengumpulkan bahan, dana, dan informasi dalam bidang bahasa dan sastra untuk kepentingan pembakuan, penyuluhan, dan pengembangan informasi kebahasaan dan kesastraan.

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi :

- 1) pengumpulan bahan untuk penulisan tentang perkembangan bahasa Indonesia,
- 2) pengumpulan bahan untuk penyusunan antologi sosiolinguistik bahasa Indonesia,
- 3) pengumpulan bahan pelajaran, metode, kurikulum, dan evaluasi dalam pengajaran bahasa,
- 4) pengumpulan bahan untuk penyusunan daftar pustaka acuan tentang pengajaran bahasa,
- 5) pengumpulan kosa kata baru bahasa Indonesia,
- 6) pengumpulan naskah-naskah sastra berharga untuk kepentingan penyelamatan,
- 7) pengumpulan hasil-hasil sastra untuk pengembangan dokumentasi,
- 8) penelitian pemakaian bahasa Indonesia dan daerah di sekolah dasar,
- 9) penelitian kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar,
- 10) penelitian bahan pengajaran bahasa asing di Indonesia,

- 11) penelitian minat sastra Indonesia dan sastra daerah di sekolah dasar dan sekolah menengah,
- 12) penelitian sosiologi sastra Indonesia,
- 13) penelitian sejarah sastra Indonesia, dan
- 14) penelitian kurikulum pengajaran sastra Indonesia di sekolah dasar dan sekolah menengah.

#### **b. Penulisan dan Penyusunan**

Kegiatan penulisan dan penyusunan bertujuan menyediakan sarana pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra yang ditulis dan disusun berdasarkan bahan, data, atau informasi dari hasil inventarisasi dan penelitian.

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- 1) penulisan tata bahasa Indonesia,
- 2) penulisan perkembangan bahasa Indonesia,
- 3) transkripsi naskah sastra berharga,
- 4) penyusunan kamus bahasa Indonesia,
- 5) penyusunan kamus dwibahasa, bahasa daerah—Indonesia,
- 6) penyusunan kamus dan daftar istilah,
- 7) Penyusunan daftar kosa kata bahasa Jawa, Sunda, Bali, Madura, Sasak, Melayu Jakarta, dan Melayu Riau,
- 8) penyusunan antologi karangan berharga tentang pengajaran bahasa Indonesia,
- 9) penyusunan antologi karangan berharga tentang sosiolinguistik,
- 10) penyusunan daftar pustaka bahasa Indonesia,
- 11) penyusunan daftar pustaka sastra Indonesia,
- 12) penyusunan pedoman pengajaran bahasa Indonesia,
- 13) penyusunan bahan ujian bahasa Indonesia sekolah menengah atas, dan
- 14) penyusunan peta bahasa-bahasa di Indonesia.

#### **c. Penyuluhan Bahasa Indonesia**

Dalam usaha peningkatan kemampuan pemakaian bahasa Indonesia, diadakan penyuluhan melalui kegiatan :

- 1) siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui RRI sejak tahun 1970, sekali dalam seminggu,
- 2) siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui TVRI sejak tahun 1975, sekali dalam seminggu,

- 3) pertemuan dengan para wartawan dan beberapa ahli bahasa, sekali dalam satu bulan,
- 4) surat-menyurat yang berhubungan dengan siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui RRI dan TVRI ataupun dengan masalah-masalah lain tentang pemakaian bahasa Indonesia, dan
- 5) ceramah di berbagai instansi pemerintah dan swasta.

Seperti yang telah disebut pada uraian terdahulu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga mengadakan kerja sama kebahasaan dengan luar negeri. Kerja sama tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kerja sama kebahasaan Indonesia-Malaysia berdasarkan komunike bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Menteri Pelajaran Kerajaan Malaysia tahun 1972.
- 2) Kerja sama dengan *Ford Foundation*. Dalam hal ini, *Ford Foundation* memberikan bantuan berupa dana untuk perlengkapan, buku, alat laboratorium, serta untuk menyelenggarakan penataran kebahasaan baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- 3) Kerja sama dengan ILDEP (*Indonesian Linguistics Development Project*) yaitu kerja sama kebahasaan dengan pemerintah Belanda/Universitas Leiden dalam hal dana, pendidikan, dan pengembangan tenaga.
- 4) Kerja sama dengan *British Council* mengenai buku-buku ilmiah, tenaga konsultan, dan pendidikan, baik di luar maupun di dalam negeri.
- 5) Kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu SEAMEO RELC (*South East Asian Ministry Education Organization Regional Language Centre*) mengenai pendidikan dan tenaga konsultan.
- 6) Kerja sama dengan Kedutaan Besar Prancis mengenai tenaga konsultan
- 7) Kerja sama dengan *Goethe Institute* mengenai tenaga konsultan.

Untuk menunjang semua kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa baik rutin maupun proyek, Bagian Tata Usaha selalu memberikan pelayanan berupa: penyelenggaraan surat-menyurat dan pengurusan rumah tangga kantor, menyelenggarakan kepegawaian, dan pengelolaan keuangan. Selain daripada itu, pada tahun 1977 dibentuklah suatu Panitia Kerja Pengolahan Data. Panitia tersebut bertugas mencatat data, mengumpulkan data, mengorganisasikan data, menganalisis data, dan menyajikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan, dan mengolah tanggapan-tanggapan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan pengolahan data selanjutnya.

Susunan personalia Panitia tersebut adalah: Maman Sumantri, B.A. (Kepala Bagian Tata Usaha) sebagai ketua merangkap anggota; Hariyanti E.Y., B.A., dari Bagian Tata Usaha sebagai sekretaris merangkap anggota; anggota: Drs. Dendy Sugono, dari Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Dra. Atika Syarani, dari Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, Dra. Anita K. Rustapa, dari Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, Drs. Adi Sunaryo, dari Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Dra. Junaiyah H.M., dari Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Atang Amsyahdi, B.A., dari Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, dan Dra. Atidjah Hamid, dari Bagian Tata Usaha.

Pada kenyataannya, Panitia tersebut telah benar-benar membantu pimpinan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pengambilan keputusan. Hasil kerja Panitia tersebut antara lain :

- a. *Pedoman Kerja* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
- b. *Program Kerja* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
- c. *Program Kerja* masing-masing Bidang dan Bagian Tata Usaha,
- d. *Uraian Kegiatan* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
- e. *Laporan Tahunan* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
- f. *Laporan Tengah Tahunan I dan II*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan
- g. bahan-bahan informasi lainnya.

Hasil-hasil kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat dilihat pada tabel-tabel dan grafik-grafik pada lampiran dalam buku ini.

### 3.2.2 Kegiatan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian bahasa dan sastra Indonesia

dan daerah oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah bertugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, mengingat luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu digarap dan luasnya daerah penelitian yang perlu dijangkau, mulai tahun 1976 proyek ini ditunjang oleh 9 proyek yang berlokasi di 9 propinsi, yaitu

- 1) Daerah Istimewa Aceh yang dikelola oleh Universitas Syiah Kuala,
- 2) Sumatra Barat yang dikelola oleh IKIP Padang,
- 3) Sumatra Selatan yang dikelola oleh Universitas Sriwijaya,
- 4) Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Universitas Lambung Mangkurat,
- 5) Sulawesi Selatan yang dikelola oleh IKIP dan Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang,
- 6) Sulawesi Utara yang dikelola oleh Universitas Sam Ratulangi,
- 7) Jawa Barat yang dikelola oleh IKIP Bandung,
- 8) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta,
- 9) Jawa Timur yang dikelola oleh IKIP Malang, dan
- 10) Bali yang dikelola oleh Universitas Udayana.

Kegiatan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dilaksanakan berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) yang disahkan pada tiap awal tahun anggaran pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan setelah kedua instansi ini mempelajari dan membahas Usul Kegiatan Operasional Proyek (UKOP) dan pra-DIP dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara garis besar, Kegiatan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1978 adalah sebagai berikut.

#### **a. Kegiatan Tahun 1974/1975**

Pada tahun pertama Pembangunan Lima Tahun Kedua ini, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu penelitian dan pengembangan perencanaan penelitian.



## Penelitian

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan meliputi :

- 1) Penelitian bahasa Indonesia dan daerah yang mencakup
  - (1) kata tugas I,
  - (2) karangan berharga tentang bahasa Indonesia,
  - (3) struktur bahasa Sunda,
  - (4) struktur bahasa Jawa,
  - (5) struktur bahasa Bali,
  - (6) struktur bahasa Makasar,
  - (7) struktur bahasa Minangkabau,
  - (8) struktur bahasa Sunda dialek Banten.
  - (9) struktur bahasa Tamaholot,
  - (10) struktur bahasa Karo,
  - (11) struktur bahasa Kutai,
  - (12) struktur bahasa Tolaki,
  - (13) struktur bahasa Jamu Aceh,
  - (14) struktur bahasa Bugis,
  - (15) *Olohe* dan *anggone* dalam bahasa Jawa, dan
  - (16) latar belakang sosial budaya bahasa Melayu Bangka.
- 2) Penelitian sastra Indonesia dan sastra daerah yang mencakup
  - (1) kritik sastra mutakhir dan
  - (2) karangan berharga tentang sastra Indonesia.
- 3) Penelitian pengajaran bahasa dan sastra mencakup
  - (1) kosa kata bahasa Indonesia murid kelas I SD di Jawa Barat,
  - (2) kosa kata bahasa Indonesia dalam buku pelajaran SD kelas III,
  - (3) interferensi leksikal bahasa Jawa murid SD Yogyakarta,
  - (4) interferensi leksikal bahasa Indonesia—bahasa Sunda murid SD di Jawa Barat,
  - (5) peminjaman kata bahasa Sunda dalam tuturan bahasa Indonesia murid SD Jawa Barat, dan
  - (6) bahan pelajaran sastra dalam buku pelajaran SMP.
- 4) Penelitian istilah mencakup
  - (1) biologi,
  - (2) geografi,
  - (3) ilmu pengetahuan sosial,

- (4) linguistik,
- (5) pengajaran bahasa,
- (6) mikologi,
- (7) matematika,
- (8) kimia umum, dan
- (9) daftar kata perkamusan.

### **Pengembangan Perencanaan Penelitian**

Pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Maret 1975 telah diselenggarakan Sanggar Kerja Penelitian Bahasa dan Sastra yang pertama. Sanggar kerja tersebut telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) petunjuk penelitian bahasa dan sastra dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, kosa kata, sosiolinguistik, dialek geografi, kemampuan bahasa, lisan, dan struktur bahasa daerah, serta salah satu bentuk kerangka laporan penelitian deskriptif;
- 2) penyempurnaan laporan penelitian berdasarkan tanggapan dan saran peserta sanggar kerja; serta
- 3) rumusan beberapa pokok pikiran tentang penelitian bahasa dan sastra dalam hubungannya dengan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa. Peserta sanggar kerja tersebut adalah tenaga-tenaga dari perguruan tinggi yang berada di daerah.

Staf ini yang mengelola pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Drs.S.Effendi (Pemimpin Proyek); Dewan M.S. (Bendaharawan); Drs.Djajanto Supraba (Sekretaris); Dra. Sri Sukesu Adiwimarta, Drs. Lukman Ali, Drs. Muhadjir, dan Djoko Kenctjono, M.A. (Asisten).

### **b. Kegiatan Tahun Anggaran 1975/1976**

Pada tahun kedua Pembangunan Lima Tahun Kedua, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah melaksanakan tiga kegiatan utama, yaitu penelitian, pengembangan perencanaan penelitian, dan penilaian hasil penelitian.

### **Penelitian**

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan meliputi

- 1) Penelitian bahasa Indonesia dan daerah yang mencakup

- (1) kata tugas II,
- (2) fonologi bahasa Indonesia I,
- (3) morfologi bahasa Indonesia I,
- (4) sintaksis bahasa Indonesia I,
- (5) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD DKI Jakarta,
- (6) penilaian bahasa Indonesia dalam buku pelajaran SD,
- (7) fungsi dan pemakaian bahasa Indonesia dan dialek Jakarta di SMA Jakarta,
- (8) inventarisasi karangan berharga tentang bahasa Indonesia,
- (9) struktur bahasa Aceh,
- (10) struktur bahasa Jawa,
- (11) struktur bahasa Madura,
- (12) struktur bahasa Batak Toba,
- (13) struktur bahasa Batak Mandailing,
- (14) struktur dialek Riau,
- (15) struktur dialek Deli Medan,
- (16) latar belakang sosial budaya bahasa Sunda,
- (17) latar belakang sosial budaya bahasa Bali,
- (18) latar belakang sosial budaya bahasa Bugis,
- (19) latar belakang sosial budaya bahasa Makasar,
- (20) dialek Jakarta,
- (21) sintaksis bahasa Minangkabau,
- (22) inventarisasi karangan berharga tentang bahasa Jawa, dan
- (23) struktur bahasa Tehet.

2) Penelitian sastra Indonesia dan daerah yang mencakup

- (1) aspek humor dalam sastra Indonesia lama,
- (2) sosiologi sastra,
- (3) kritik sastra Indonesia,
- (4) tokoh angkatan 66 (Taufiq Ismail dan Gunawan Mohammad),
- (5) tokoh angkatan Pujangga Baru (Ali Hasjmi dan J.E. Tatengkeng),
- (6) sastra Melayu abad XIX,
- (7) sastra lisan Bali,
- (8) sastra lisan Jawa di Jawa Timur,
- (9) sastra lisan Sunda,
- (10) sastra lisan Madura,
- (11) sastra lisan (Kaba) Minangkabau,

- (12) sastra lisan Makasar,
- (13) pengarang sastra Jawa modern,
- (14) sastra utama Jawa modern,
- (15) tokoh sastra Sunda Raden Memed Sastrahadiprawira,
- (16) tokoh sastra Sunda Daeng Kanduruan Ardiwinata,
- (17) tema karya sastra mutakhir,
- (18) antologi sastra Sunda,
- (19) inventarisasi karangan berharga tentang sastra,
- (20) inventarisasi karangan berharga tentang sastra daerah Jawa, dan
- (21) inventarisasi karangan berharga tentang sastra Sunda.

3) Penelitian pengajaran bahasa dan sastra mencakup

- (1) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SPG DKI Jakarta,
- (2) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SPG Jawa Barat,
- (3) kemampuan menulis murid kelas III SPG di Jawa Tengah/Jawa Timur,
- (4) kosa kata bahasa Indonesia murid kelas III di lima kota Jawa Barat,
- (5) Kosa kata bahasa Indonesia murid kelas I di Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta,
- (6) Kosa kata bahasa Indonesia dalam buku pelajaran kelas VI,
- (7) pola kalimat bahasa Indonesia murid SD di Jawa Barat, dan
- (8) tes prestasi belajar bahasa Indonesia murid SD DKI Jakarta.

4) Penelitian istilah mencakup

- (1) biologi II (lanjutan),
- (2) geografi II (lanjutan),
- (3) kimia organik,
- (4) kimia umum,
- (5) psikologi,
- (6) administrasi I,
- (7) pertanian I,
- (8) kesenian I,
- (9) hukum,
- (10) sejarah I,
- (11) transformasi,
- (12) pengajaran bahasa II (lanjutan),

- (13) keluarga berencana,
- (14) ilmu pengetahuan sosial II (lanjutan),
- (15) sastra II (lanjutan), dan
- (16) pendidikan.

### **Pengembangan Perencanaan Penelitian**

Pada tanggal 18 sampai dengan 25 Oktober 1975 telah diselenggarakan Sanggar Kerja Pengembangan Perencanaan Penelitian Bahasa dan Sastra di Wisma Arga Mulya, Tugu, Bogor. Sanggar kerja tersebut telah membahas

- 1) rancangan induk penelitian bahasa dan sastra dan penyempurnaannya serta
- 2) petunjuk-petunjuk penelitian yang dihasilkan dalam sanggar kerja penelitian bulan Maret 1975 dan menuliskan kembali petunjuk-petunjuk tersebut dalam sistematik, isi, dan cara penyajian yang dianggap peserta sanggar lebih baik.

Dengan demikian, sanggar kerja pengembangan perencanaan penelitian tersebut telah menghasilkan naskah "Rancangan Induk Penelitian Bahasa dan Sastra" dan naskah revisi "Petunjuk Penelitian Bahasa dan Sastra". Peserta sanggar kerja tersebut adalah tenaga-tenaga dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan tenaga-tenaga ahli dari perguruan tinggi baik di Jakarta maupun di daerah.

### **Penilaian Hasil Penelitian**

Dalam usaha meningkatkan mutu hasil penelitian dan keefisienan serta keefektifan pengelolaan penelitian telah dilakukan serangkaian sanggar kerja yang membahas laporan-laporan penelitian dan petunjuk-petunjuk penelitian.

Sanggar Kerja Penelitian Bahasa Indonesia diselenggarakan di Bandung pada tanggal 15 hingga 20 Maret 1976 dengan hasil sebagai berikut :

1. naskah laporan penelitian (ringkasan) kosa kata bahasa Indonesia murid kelas I SD Yogyakarta dan kelas III SD Jawa Barat, kemampuan menulis murid kelas III SPG Jawa Tengah/Jawa Timur, kemampuan membaca dan menulis murid kelas II SPG Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemakaian bahasa Indonesia dalam surat kabar, tes prestasi belajar bahasa Indonesia SD Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. naskah petunjuk-petunjuk penelitian kosa kata murid, kemampuan membaca dan menulis murid SPG, tes prestasi belajar bahasa Indonesia SD, pemakaian bahasa Indonesia; dan

3. kertas kerja pedoman penilaian penelitian dan petunjuk penulisan laporan penelitian.

Sanggar kerja Penelitian Bahasa Daerah diselenggarakan di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta. Pada tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 4 April 1976 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) naskah laporan penelitian (ringkasan) bahasa Bugis, Bali, Makasar, Sunda, Jawa, Madura, Minangkabau dan
- 2) naskah petunjuk penelitian bahasa daerah.

Sanggar kerja Penelitian Sastra Indonesia dan Daerah diselenggarakan di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta, pada tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 4 April 1976 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) naskah laporan penelitian (ringkasan) kritik dan tema sastra Indonesia modern, aspek humor dalam sastra Indonesia lama, beberapa tokoh sastra Indonesia, sastra lisan Bali, Bugis, Makasar, Sunda, Jawa, Madura, Minangkabau, tokoh sastra Jawa dan Sunda, karangan berharga tentang sastra Sunda serta
- 2) naskah petunjuk penelitian kritik sastra, sastra lama, tokoh sastra, dan sastra lisan.

Sanggar Kerja Penelitian Istilah diselenggarakan di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta, pada tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 4 April 1976 dengan hasil sebagai berikut :

- 1) naskah laporan penelitian (ringkasan) istilah biologi, kimia organik, pertanian, psikologi, pendidikan, geografi, ilmu pengetahuan sosial, hukum, linguistik, kesenian, serta
- 2) naskah petunjuk penelitian istilah.

Peserta sanggar-sanggar kerja tersebut adalah tenaga-tenaga dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan para peneliti serta tenaga-tenaga ahli dari perguruan tinggi di Jakarta ataupun di daerah.

Staf inti yang mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah Drs. S. Effendi (Pemimpin Proyek); Drs. ZulKanain (Bendaharawan); Drs. Farid Hadi (Sekretaris); Drs. Basukj Suhardi, M.A., Drs. Muhadjir, Drs. Lukman Ali, Dra. Sri Sukesu Adiwimarta, dan Drs. Djajanto Supraba (Asisten); dan Dr. Amran Halim dan Dr. Muljanto Sumardi (Konsultan).

### c. Kegiatan Tahun Anggaran 1976/1977

Sebagaimana telah dikemukakan, sejak tahun anggaran 1976/1977 Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah telah mengalami perkembangan tidak hanya di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya saja tetapi telah diperluas ke sembilan propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itulah, pada tahun tersebut Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah baik di Jakarta maupun di sembilan propinsi tersebut telah melakukan penelitian bahasa dan sastra yang jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Proyek-proyek yang berkedudukan di daerah pada umumnya hanya melakukan kegiatan penelitian sedangkan perencanaan dan pengolahan lebih lanjut – dari naskah sampai menjadi buku cetak – digarap oleh Proyek Penelitian Pusat. Pada tahun anggaran ini, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah melaksanakan tiga kegiatan utama yaitu penelitian, pengembangan perencanaan penelitian, dan penilaian hasil penelitian.

#### Penelitian

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan baik oleh Proyek Penelitian Pusat maupun Proyek Penelitian di sembilan propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut.

#### Penelitian

Kegiatan penelitian yang telah dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

##### 1) Penelitian bahasa Indonesia dan daerah yang mencakup

- (1) fonologi bahasa Indonesia II (lanjutan),
- (2) morfologi bahasa Indonesia II (lanjutan),
- (3) sintaksis bahasa Indonesia II (lanjutan),
- (4) karangan berharga tentang bahasa Indonesia,
- (5) morfologi bahasa Bali,
- (6) struktur dialek Melayu Riau,
- (7) struktur bahasa Gayo,
- (8) struktur bahasa Mentawai,
- (9) struktur bahasa Basemah,
- (10) struktur bahasa Basemah,
- (11) struktur bahasa Sunda dialek Priangan,

- (12) struktur bahasa Sunda pesisir utara Jawa Barat,
- (13) struktur bahasa Jawa bagian barat (Banyumas),
- (14) struktur bahasa Mualang,
- (15) struktur bahasa Bukit,
- (16) struktur bahasa Banjar Hulu,
- (17) struktur bahasa Wuna,
- (18) struktur bahasa Mandar,
- (19) struktur bahasa Melayu Menado,
- (20) struktur bahasa Talaud,
- (21) struktur bahasa Tontemboan,
- (22) sintaksis bahasa Gorontalo,
- (23) struktur bahasa Melayu Makasar,
- (24) struktur bahasa Serawai,
- (25) struktur dialek Melayu Bali,
- (26) struktur bahasa Bima,
- (27) struktur bahasa Melayu Bangka,
- (28) struktur bahasa Batak Dairi/Pakpak,
- (29) struktur bahasa Batak Simalungun,
- (30) struktur bahasa Jawa di Jawa Timur,
- (31) undak-usuk bahasa Jawa,
- (32) undak-usuk bahasa Sunda,
- (33) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD Jawa Barat,
- (34) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD Jawa Tengah,
- (35) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD Jawa Timur/Madura,
- (36) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD Bali,
- (37) pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD Sulawesi Selatan,
- (38) pemakaian bahasa Indonesia dalam surat kabar,
- (39) pemakaian bahasa Indonesia dalam surat-menyurat,
- (40) perkembangan bahasa Indonesia pada zaman pergerakan,
- (41) pemakaian bahasa Indonesia dalam buku SMP DKI Jakarta,
- (42) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan,
- (43) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Aceh,
- (44) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Jawa Barat,
- (45) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di Jawa Timur,



- (46) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di SD DKI Jakarta,
- (47) kedudukan dan fungsi dialek Jakarta,
- (48) kedudukan dan fungsi bahasa Madura di Madura,
- (49) kedudukan dan fungsi bahasa Minangkabau di Sumatra Barat, dan
- (50) kedudukan dan fungsi bahasa Aceh di Aceh.

2) Penelitian sastra Indonesia dan daerah mencakup

- (1) cerita berbingkai dalam sastra Indonesia lama,
- (2) sastra Indonesia lama pengaruh Islam,
- (3) syair-syair bertema sejarah,
- (4) perkembangan novel sastra Indonesia modern,
- (5) puisi mbeling,
- (6) tambo Minangkabau,
- (7) cerita pendek Sunda,
- (8) perkembangan studi sastra Indonesia,
- (9) tokoh sastra Ayip Rosidi, Nur Sutan Iskandar, dan Trisno Sumardjo,
- (10) sastra lisan Aceh,
- (11) sastra lisan Batak Toba,
- (12) sastra lisan Mandailing,
- (13) sastra lisan Banjar,
- (14) sastra utama Jawa Modern, dan
- (15) sastra lisan Minangkabau (tradisi pasambahan helat perkawinan).

3) Penelitian pengajaran bahasa dan sastra mencakup

- (1) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD DKI Jakarta,
- (2) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Jawa Barat,
- (3) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) kelas VI SD Jawa Tengah,
- (4) ujian kemampuan berbahasa lisan murid SPG Jawa Barat,
- (5) kemampuan berbahasa Indonesia (mendengarkan dan berbicara) murid SPG DKI Jakarta,
- (6) kosa kata buku pelajaran bahasa Indonesia SD kelas III,
- (7) kosa kata bahasa Indonesia dalam buku SMP,
- (8) pemakaian kosa kata bahasa Indonesia murid kelas III SD Jawa Tengah,

- (9) pemakaian kosa kata bahasa Indonesia murid kelas VI SD Jawa Barat,
- (10) pemakaian kosa kata bahasa Indonesia murid kelas I SD di Sumatra Barat,
- (11) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia di SD Sumatra Barat,
- (12) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia di SD Sumatra Selatan,
- (13) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia dan daerah di SD Jawa Barat,
- (14) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan,
- (15) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia di SD Kalimantan Selatan,
- (16) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia di SD Sulawesi Utara,
- (17) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia dan daerah di SD Jawa Timur/Madura,
- (18) pemakaian buku pelajaran bahasa Indonesia dan daerah di SD Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta,
- (19) tes prestasi belajar bahasa Indonesia di SMP Jawa Timur,
- (20) kemampuan berbahasa Bali (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Bali,
- (21) kemampuan berbahasa Jawa (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Jawa Tengah,
- (22) minat membaca sastra di kalangan pelajar SMA DKI Jakarta,
- (23) bahan pelajaran sastra dalam buku SMA Jawa Timur, dan
- (24) kegiatan apresiasi sastra murid SPG DKI Jakarta.

#### 4) Penelitian istilah mencakup

- (1) pertanian II (lanjutan)
- (2) biologi II (lanjutan)
- (3) teknik arsitektur,
- (4) statistika,
- (5) farmasi I,
- (6) psikologi II (lanjutan),
- (7) pendidikan II (lanjutan),
- (8) geologi/geografi,
- (9) hukum/fiqih,
- (10) fisika,
- (11) publisistik,
- (12) filologi,

- (13) pengajaran bahasa II (lanjutan),
- (14) kedokteran I,
- (15) matematika,
- (16) kesenian II (lanjutan),
- (17) sosiologi,
- (18) arkeologi,
- (19) administrasi II (lanjutan), dan
- (20) perencanaan.

### **Pengembangan Perencanaan Penelitian**

Dalam usaha pengarahan pelaksanaan penelitian, telah dilakukan serangkaian kegiatan rapat kerja di Jakarta.

Rapat Kerja Koordinasi diselenggarakan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 1976 dengan hasil

- 1) naskah yang berisi uraian kegiatan operasional dan
- 2) naskah pegangan kerja Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra: Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Rapat Kerja Perencanaan Penelitian I diselenggarakan di Wisma Sejahtera, Cipete, Jakarta pada tanggal 20 sampai dengan 23 Agustus 1976 dengan hasil

- 1) naskah yang berisi uraian kegiatan operasional,
- 2) naskah pegangan kerja penelitian bahasa, sastra, pengajaran bahasa dan sastra, istilah, dan
- 3) naskah revisi Rencana Induk Penelitian Bahasa dan Sastra.

Rapat Kerja Perencanaan Penelitian II diselenggarakan di Wisma Sejahtera, Cipete, Jakarta pada tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 1976 dengan hasil

- 1) naskah "Pedoman Penulisan Laporan Penelitian," dan
- 2) naskah "Pedoman Penilaian Hasil Penelitian."

Rapat Kerja Perencanaan III diselenggarakan di Wisma Tanah Air Cawang, Jakarta pada tanggal 24 sampai dengan 27 Nopember 1976 dengan hasil naskah yang berisi rencana kegiatan penelitian 1977/1978. Rapat Kerja Perencanaan Penelitian IV diselenggarakan di Wisma Tanah Air, Cawang, Jakarta pada tanggal 22 sampai dengan 25 Desember 1976 dengan hasil

- 1) naskah revisi "Petunjuk Penelitian Bahasa" dan
- 2) naskah revisi "Petunjuk Penelitian Sastra."

### **Penilaian Hasil Penelitian**

Serangkaian kegiatan penelitian bahasa dan sastra selama tiga tahun telah cukup banyak menghasilkan naskah. Pengalaman selama tiga tahun itu pula menunjukkan bahwa kadar ilmiah isi dan kadar kerapian tertib menulis tiap-tiap naskah laporan penelitian perlu dilihat sehingga dapat diketahui dengan pasti naskah laporan penelitian yang dapat diterbitkan, naskah laporan penelitian yang perlu diperbaiki, serta penelitian mana yang perlu dilanjutkan. Untuk keperluan istilah Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah menyelenggarakan serangkaian sanggar kerja penilaian.

Sanggar Kerja Penilaian Hasil Penelitian Bahasa diselenggarakan di Hotel Taman Cibogo, Bogor pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1977 dengan hasil

- 1) naskah yang berisi penilaian, tanggapan, dan saran terhadap laporan penelitian struktur bahasa, sosiolinguistik, pengajaran bahasa dan
- 2) beberapa saran perbaikan "Pedoman Penilaian Hasil Penelitian."

Sanggar Kerja Penilaian Hasil Penelitian Sastra diselenggarakan di Hotel Taman Cibogo, Bogor pada tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 1977 dengan hasil

- 1) naskah yang berisi penilaian, tanggapan, dan saran terhadap laporan penelitian sastra modern, sastra lama, sastra lisan, dan pengajaran sastra serta
- 2) beberapa saran perbaikan "Pedoman Penilaian Hasil Penelitian."

Sanggar Kerja Penilaian Hasil Penelitian/Penyusunan Istilah diselenggarakan di Hotel Taman Cibogo, Bogor pada tanggal 15 hingga 19 Februari 1977 dengan hasil

- 1) sejumlah naskah kamus istilah yang telah diperiksa dan diedit bahasanya dan
- 2) beberapa pokok pikiran tentang penyusunan kamus istilah.

Peserta sanggar kerja tersebut adalah tenaga-tenaga dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan para peneliti serta tenaga-tenaga ahli dari perguruan tinggi di Jakarta dan di daerah.

Staf inti yang mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah Drs. S. Effendi (Pemimpin Proyek); Drs. Zulkarnain (Bendaharawan);

Drs.Farid Hadi (Sekretaris), Drs.Dendy Sugono, Drs.Muhadjir, Drs.Ayatrohaedi, Drs.Basuki Suhardi, M.A., Dra.Sri Sukes Adiwinarta, Maman Sumantri, B. A., (Asisten), dan Prof. Dr. Amran Halim, Dr. Astrid S. Susanto, dan Dr. Mulyanto Sumardi (Konsultan).

Peserta sanggar kerja tersebut adalah tenaga-tenaga dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan para peneliti serta tenaga-tenaga ahli dari perguruan tinggi di Jakarta dan di daerah.

#### **d. Kegiatan Tahun Anggaran 1977/1978**

Perkembangan yang perlu dicatat di sini ialah bertambahnya satu Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang berkedudukan di Propinsi Bali. Dengan demikian pada tahun anggaran tersebut tercatat satu proyek pusat dan sepuluh proyek daerah. Di samping itu, pada tahun anggaran tersebut telah pula dimulai kegiatan-kegiatan perencanaan dan penilaian yang dilakukan di daerah-daerah tempat proyek daerah yang bersangkutan. Pada tahun ini Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah melaksanakan tiga kegiatan utama, yaitu penelitian dan penilaian hasil penelitian.

#### **Penelitian**

Kegiatan yang telah dilakukan – baik oleh proyek pusat maupun oleh proyek daerah – meliputi

1) penelitian bahasa Indonesia dan daerah yang mencakup :

- (1) morfologi bahasa Indonesia (tata bahasa),
- (2) sintaksis bahasa Indonesia (tata bahasa),
- (3) survei bahasa-bahasa di Lombok,
- (4) survei bahasa-bahasa di Sulawesi Tengah,
- (5) survei bahasa Nias,
- (6) etimologi bahasa Indonesia,
- (7) pelaksanaan ejaan yang disempurnakan,
- (8) pemakaian bahasa Indonesia dalam buku Proyek Inpres,
- (9) survei sosiolinguistik,
- (10) perkembangan bahasa Indonesia sejak 1945,
- (11) morfologi dan sintaksis bahasa Aceh,
- (12) struktur bahasa Alas,
- (13) struktur bahasa Minangkabau,
- (14) struktur bahasa Minangkabau dialek Tanah Pesisir dan Tanah Datar,

- (15) struktur bahasa Komerling,
- (16) struktur bahasa Semende,
- (17) struktur bahasa Lembak,
- (18) struktur bahasa Kayu Agung,
- (19) struktur bahasa Sunda dialek Banten,
- (20) morfologi dan sintaksis bahasa Sunda,
- (21) dialek geografi bahasa Sunda di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah,
- (22) struktur bahasa Jawa di pesisir utara Jawa Tengah,
- (23) sintaksis bahasa Jawa,
- (24) unda-usuk bahasa Madura,
- (25) sintaksis bahasa Bali,
- (26) struktur bahasa Bakumpai,
- (27) struktur bahasa Bajau,
- (28) struktur bahasa di pesisir Timur Kalimantan Selatan,
- (29) struktur bahasa Minahasa,
- (30) struktur bahasa Sangir,
- (31) sintaksis bahasa Gorontalo,
- (32) struktur bahasa Bolaang Mongondow,
- (33) struktur bahasa Toraja Sa'dan,
- (34) struktur bahasa Makasar,
- (35) struktur bahasa Bugis,
- (36) struktur bahasa Massenrengpulu,
- (37) perkembangan pemakaian bahasa Indonesia dalam surat kabar,
- (38) kedwibahasaan di pesisir selatan Aceh (Blang Pidie ke Tenggara)

2) Penelitian sastra Indonesia dan daerah mencakup:

- (1) perkembangan novel Indonesia modern,
- (2) perkembangan puisi Indonesia modern,
- (3) tokoh sastra H.B. Jassin dan Armijn Pane,
- (4) struktur sastra lisan Jawa Timur,
- (5) cerita fiktif zaman Islam dalam sastra Indonesia,
- (6) cerita pendek bahasa Sunda sesudah perang,
- (7) tema cerita pendek Indonesia,
- (8) sastra lisan Minangkabau (pepatah, pantun, dan mantra),
- (9) puisi Sunda selepas perang dunia II,
- (10) sastrawan Sunda M.A. Salmun dan Yuhana,
- (11) wawacan dalam sastra Sunda,

- (12) sastra Madura modern (cerkan dan puisi),
- (13) perkembangan kesusastraan Bali modern,
- (14) inventarisasi karangan berharga tentang sastra Jawa modern.

3) Penelitian pengajaran bahasa dan sastra mencakup :

- (1) kemampuan berbahasa Indonesia (mendengarkan dan berbicara) murid kelas VI SD DKI Jakarta,
- (2) kemampuan berbahasa Indonesia (mendengarkan dan berbicara) murid kelas VI SD Jawa Barat,
- (3) kemampuan berbahasa Indonesia (mendengarkan dan berbicara) murid kelas VI SD Jawa tengah,
- (4) kemampuan berbahasa Indonesia (mendengarkan dan berbicara) murid kelas VI SD yang berbahasa Bugis.
- (5) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD yang berbahasa pengantar bahasa Madura,
- (6) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Minahasa,
- (7) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD yang berbahasa ibu bahasa Aceh,
- (8) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Sumatra Barat,
- (9) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Bali,
- (10) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SMP DKI Jakarta,
- (11) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SMP Jawa Barat,
- (12) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SMP Jawa Timur,
- (13) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SMP Sumatra Utara,
- (14) kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) murid kelas III SPG Sumatra Barat,
- (15) interferensi gramatikal bahasa Jawa dalam pemakaian bahasa Indonesia murid SD,
- (16) interferensi gramatikal bahasa Makasar dalam pemakaian bahasa Indonesia murid SD,
- (17) kurikulum SD 1975,

- (18) kurikulum Sekolah Menengah 1975,
- (19) kosakata bahasa Indonesia murid kelas VI SD Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta,
- (20) kosakata bahasa Indonesia murid kelas III SD Sumatra Barat,
- (21) kosakata bahasa Indonesia murid kelas VI SD yang berbahasa ibu bahasa Bugis,
- (22) pemakaian kosakata dalam buku SMA,
- (23) bahan pelajaran bahasa Indonesia SMP Jawa Timur,
- (24) bahan pelajaran bahasa Indonesia SMA,
- (25) tes prestasi belajar bahasa Indonesia SMA Jawa Barat,
- (26) kemampuan berbahasa Sunda (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Jawa Barat,
- (27) kemampuan berbahasa Jawa (mendengarkan dan berbicara) murid kelas VI SD Jawa Tengah,
- (28) kemampuan berbahasa Bali (mendengarkan dan berbicara) murid kelas Bali,
- (29) kemampuan berbahasa Madura (membaca dan menulis) murid kelas VI SD Jawa Timur/Madura,
- (30) kegiatan apresiasi sastra murid SMA DKI Jakarta,
- (31) kegiatan apresiasi sastra murid SMA Jawa Barat,
- (32) apresiasi sastra murid SMA Jawa Timur,
- (33) kemampuan apresiasi prosa murid SPG Jawa Timur.

4) Penelitian istilah mencakup :

- (1) farmasi II (lanjutan),
- (2) pertanian III (lanjutan),
- (3) hukum Agama Islam,
- (4) kimia analitik,
- (5) sejarah II (lanjutan)
- (6) antropologi,
- (7) publisistik (lanjutan),
- (8) kedokteran anatomi,
- (9) arkeologi II (lanjutan)
- (10) olah raga,
- (11) ekonomi,
- (12) perpustakaan,



- (13) sosiologi II (lanjutan),
- (14) perencanaan II (lanjutan), dan
- (15) teknik arsitektur.

### **Pengembangan Perencanaan Penelitian**

Serangkaian rapat kerja perencanaan penelitian diselenggarakan di Jakarta.

Rapat Kerja Koordinasi diselenggarakan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 27 April 1977 dengan hasil:

- (1) naskah yang berisi uraian kegiatan operasional dan
- (2) naskah pegangan kerja penelitian bahasa dan sastra: Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Rapat Kerja Perencanaan Penelitian II diselenggarakan di Wisma Tanah Air, Cawang, Jakarta pada tanggal 30 Mei sampai dengan 3 Juni 1977 dengan hasil

- (1) naskah yang berisi uraian kegiatan operasional dan
- (2) naskah pegangan kerja tiap pokok kegiatan yang mencakup bahasa, sastra, pengajaran bahasa dan sastra, serta istilah.

Rapat Kerja Perencanaan Penelitian III diselenggarakan di Wisma Tanah Air, Cawang, Jakarta pada tanggal 9 sampai dengan 13 Agustus 1977 dengan hasil naskah revisi "Pedoman Penilaian Hasil Penelitian" dan "Pedoman Penilaian Hasil Penyusunan Istilah."

Rapat Kerja Perencanaan Penelitian IV diselenggarakan di Wisma Tanah Air, Cawang, Jakarta pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 1977 dengan hasil naskah revisi "Petunjuk Penelitian Bahasa" dan naskah revisi "Petunjuk Penelitian Sastra."

### **Penilaian Hasil Penelitian**

Pada tahun anggaran ini pun telah dilaksanakan serangkaian sanggar kerja penilaian hasil penelitian oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra dan Indonesia dan Daerah.

Sanggar Kerja Penilaian Hasil Penelitian Bahasa diselenggarakan di Wisma Bina Jahtera, Ciawi, Bogor, pada tanggal 10 sampai dengan 15 Oktober 1977 menghasilkan "Pedoman Penilaian Hasil Penelitian."

Sanggar Kerja Penilaian Hasil Penelitian Sastra diselenggarakan di Wisma Dirga Niaga Cibulan, Bogor, peserta dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan dari perguruan tinggi di Jakarta dan di daerah.

Staf inti yang mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah Drs. S. Effendi (Pemimpin Proyek); Drs. Zulkarnain (Bendaharawan); Drs. Farid Hadi (Sekretaris); Drs. Dendy Sugono, Drs. Muhadjir, Drs. Ayatrohaedi, Drs. Basuki Suhardi, M.A., Dra. Sri Sukesu Adiwimarta, Maman Sumantri, D.A., (Asisten), Prof. Drs. Amran Halim, Dr. Astrid S. Susanto, dan Dr. Mulyanto Sumardi (Konsultan).

Grafik yang menunjukkan target dan hasil yang dicapai oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah selama empat tahun anggaran, dari tahun 1974/1975 sampai dengan tahun 1977/1978 dapat dilihat pada lampiran X (halaman 77).

### **3.2.3 Kegiatan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah**

Proyek Pengembangan bertujuan meningkatkan mutu dan luas pemakaian bahasa Indonesia dan apresiasi sastra Indonesia dengan jalan membina dan mengembangkan tenaga, bahan, dan komunikasi dalam bidang bahasa dan sastra.

Selama Pembangunan Lima Tahun Kedua (1974/75 hingga 1977/78), Proyek Pengembangan telah melakukan sejumlah kegiatan berdasarkan rencana yang tercantum dalam buku *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua*.

Secara garis besar kegiatan Proyek Pengembangan dapat dikelompokkan dalam lima usaha sebagai berikut.

#### **a. Usaha Peningkatan Tenaga**

Dalam hubungan ini telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan jumlah dan mutu tenaga, dengan jalan menyelenggarakan:

- 1) penataran tenaga penyusun kamus (40 orang) pada tahun 1974;
- 2) penataran tenaga peneliti sosiolinguistik (30 orang) pada tahun 1975;
- 3) penataran tenaga peneliti dialektologi (30 orang) pada tahun 1976;
- 4) penataran tenaga penterjemah (40 orang) pada tahun 1977; dan
- 5) penataran tenaga penyuluh (50 orang) pada tahun 1976/1977.

Peserta penataran adalah tenaga dari berbagai lembaga pendidikan dan lembaga bahasa di Indonesia. Kegiatan penataran berlangsung dalam bebe-

rapa tahap. Kecuali penataran penyuluh, kegiatan penataran tersebut mendapat bantuan pemerintah Belanda, dalam bentuk bea siswa penelitian di dalam negeri dan bea siswa pendidikan lanjutan di luar negeri. Khusus mengenai penataran penyuluh, penataran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan berbahasa Indonesia. Secara bertahap kegiatan ini direncanakan dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.

#### **b. Usaha Pembinaan Bakat dan Prestasi**

Sampai akhir tahun Pelita II, pemberian bea siswa kepada mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mencapai jumlah 225 orang.

#### **c. Usaha Peningkatan Penyediaan Bahan**

Dalam hubungan ini telah dilakukan sejumlah kegiatan yang menyangkut penulisan, penyiaran, dan penerbitan. Kegiatan ini meliputi

- 1) penyusunan kamus bahasa Indonesia (belum diterbitkan);
- 2) penyusunan kamus bahasa daerah Indonesia (10 judul, sudah diterbitkan);
- 3) penyusunan pedoman ejaan (sudah diterbitkan);
- 4) penyusunan pedoman istilah (sudah diterbitkan);
- 5) penyusunan pedoman penulisan tata bahasa (sudah diterbitkan);
- 6) penyusunan rencana induk pengembangan bahasa dan sastra (belum diterbitkan);
- 7) penyusunan naskah-naskah apresiasi sastra (belum diterbitkan);
- 8) penyusunan naskah-naskah untuk penyuluhan (sebagian sudah diterbitkan);
- 9) penyusunan perumusan seminar (sudah diterbitkan);
- 10) penyusunan himpunan kertas kerja (sebagian sudah diterbitkan);
- 11) penyusunan pedoman-pedoman kepustakaan (sebagian sudah diterbitkan);
- 12) penerbitan majalah *Bahasa dan Sastra* dan majalah Pengajaran Bahasa dan Sastra masing-masing 36 nomor.

Tenaga-tenaga yang membantu dalam kegiatan ini ialah tenaga-tenaga dari lembaga pendidikan dan lembaga bahasa di Indonesia. Hasil-hasil penerbitan disalurkan ke perpustakaan, pendidikan menengah dan perguruan tinggi serta instansi dan perorangan yang berminat.

#### **d. Usaha Peningkatan Kegairahan Menulis**

Dalam hubungan ini telah diselenggarakan sayembara mengarang bahasa Indonesia untuk belajar sekolah dasar dan menengah, mahasiswa pada tahun 1976 dan untuk guru sekolah dasar pada tahun 1977.

#### **e. Usaha Peningkatan Komunikasi**

Dalam rangka peningkatan komunikasi/tukar pikiran antar tenaga ahli bahasa dan sastra telah diselenggarakan antara lain :

- a) Rapat Kerja Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia (diadakan dua kali setahun) sejak 1972;
- b) Sidang Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (diadakan dua kali setahun) sejak 1972;
- c) Praseminar Politik Bahasa Nasional (1974);
- d) Seminar Politik Bahasa Nasional (1975);
- e) Seminar Bahasa Daerah (1975);
- f) Seminar Pengembangan Sastra Indonesia (1975);
- g) Seminar Pengembangan Sastra Daerah (1975);
- h) Konferensi ASANAL (1975);
- i) Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah (1977);
- j) Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia (1978); dan
- k) Kongres Bahasa Indonesia III (1978).

### **3.3 Perpustakaan, Laboratorium Fonetik, dan Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**

#### **3.3.1 Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.**

##### **a. Sejarah Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**

Pengumpulan dan pendokumentasian bahan-bahan mengenai kebahasaan telah dirintis sejak berdirinya *Instituut voor Taal en Cultuur Onderzoek* (ITCO) pada tahun 1947. Kepala Bagian Dokumentasinya ialah Dr. E.M.A.A.J.A. Allard. Pendokumentasian ini berlangsung terus hingga terbentuknya Lembaga Bahasa dan Budaya pada tahun 1952, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1966, Direktorat Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1968, Lembaga Bahasa Nasional pada tahun 1969, dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1975. Sampai dengan tahun 1968, penyelenggaraan perpustakaan belum dilaksanakan menurut sistem perpustakaan

yang berlaku sekarang. Sistem perpustakaan baru diterapkan pada saat Lembaga Bahasa Nasional terbentuk yaitu pada tahun 1969. Ini terjadi setelah adanya petugas yang mendapat pendidikan dalam ilmu perpustakaan. Penambahan koleksi terutama dilakukan dengan cara pertukaran dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi di dalam dan di luar negeri. Di samping itu diperkaya lagi dengan hadiah-hadiah dari berbagai pihak. Pembelian buku-buku meskipun tidak dengan biaya yang besar, juga merupakan usaha dalam perluasan koleksi.

Adanya perkembangan koleksi dan pelayanan menyebabkan timbulnya tuntutan ruangan yang lebih luas, perlengkapan yang lebih baik dan lebih banyak serta tambahan tenaga. Semula perpustakaan hanya menempati ruangan kecil berukuran 4,5 x 7,5 m, di jalan Diponegoro 82, Jakarta, dengan jumlah pegawai yang hanya terdiri dari 3 orang. Koleksi buku dan majalah pun masih terbatas sekali. Setelah itu ruang perpustakaan pindah ke ruang yang lebih luas, berukuran 8 x 7,5 m, walaupun masih belum memenuhi persyaratan. Jumlah petugasnya juga bertambah 3 orang lagi. Kini perpustakaan menempati ruangan di lantai III gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Rawamangun. Perpustakaan yang sekarang mempunyai ruang seluas 24 x 13 m, dengan peralatan dan perlengkapan yang cukup memadai, jumlah tenaga yang lebih banyak dan jumlah koleksi yang lebih banyak serta lebih bervariasi dalam bidang kebahasaan.

Sejak masa ITCO sampai dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, perpustakaan sudah berganti pimpinan beberapa kali, yaitu pada masa:

- 1) ITCO (1974): Dr. E.M.A.A.J.A. Allard;
- 2) Lembaga Bahasa dan Budaya (1952): Dr. E.M.A.A.J.A. Allard;
- 3) Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (1966) Drs. Husein Widjajakusumah, Sulastri Soeryoatmodjo, dan Drs. Munawar;
- 4) Direktorat Bahasa dan Kesusastraan (1968) Dra. I. Sukarsih Purawijaya;
- 5) Lembaga Bahasa Nasional (1969): Dra. I. Sukarsih Purawijaya;
- 6) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (sejak 1975): Dra. I. Sukarsih Purawijaya.

#### **b. Sifat Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah perpustakaan penelitian. Dalam kelompok perpustakaan termasuk dalam perpustakaan khusus. Perpustakaan ini terutama ditujukan kepada para peneliti, pengajar, dan para peminat bahasa.

### c. Tugas dan Kegiatan

Tugas pokok perpustakaan ialah menginventarisasi semua bahan mengenai bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra. Di samping tugas pokok tersebut, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan ialah:

- 1) mengolah penyediaan bahan perpustakaan dan dokumentasi yang kegiatannya meliputi: (a) penelitian perkembangan kegiatan penulisan/penertiban dan (b) pengolahan perolehan bahan;
- 2) mengolah penyediaan bahan informasi yang kegiatannya meliputi: (a) penelitian isi buku dan dokumen, (b) pengolahan penyusunan katalogisasi, (c) pengolahan penyusunan klasifikasi, (d) pengolahan penyusunan abstrak, (e) pengolahan penyusunan indeks, (f) pengolahan penyusunan bibliografi, (g) pengolahan penyusunan indeks, (f) pengolahan penyusunan bibliografi, (g) pengolahan penyusunan kliping, (h) pengolahan penyusunan buletin perpustakaan, dan (i) pengolahan penyusunan statistik perpustakaan;
- 3) pengolahan pemanfaatan perpustakaan dan dokumentasi yang kegiatannya meliputi: (a) mengolah pemberian informasi kepada pembaca, dan (b) mengolah pemberian informasi mengenai referensi;
- 4) mengolah pengembangan perpustakaan dan dokumentasi yang kegiatannya meliputi: (a) penelitian perkembangan perpustakaan dan dokumentasi, (b) pengolahan pembinaan koleksi dan peralatan teknis perpustakaan, (c) peningkatan hubungan kerja sama dalam rangka pengembangan jaringan informasi, (d) ikut menjadi anggota Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan (e) mengikuti seminar, diskusi, konferensi, dan lokakarya tentang perpustakaan yang diselenggarakan di dalam dan di luar negeri.

### d. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditekankan pada masalah kebahasaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang kebahasaan. Dalam hal ini perpustakaan tidak menutup diri dari koleksi jenis lain yang bukan bidangnya. Perpustakaan juga bersedia menerima hadiah buku-buku yang berisi masalah-masalah lain di luar kebahasaan.

Koleksi perpustakaan saat ini terdiri dari berbagai jenis bahan dokumentasi, yaitu: (1) buku-buku (14.858 judul), (2) majalah (223 judul), (3) mikrofilm (890 gulungan), (4) mikrofis (663 lembar), (5) skripsi (732 judul), (6) disertasi (22 judul), (7) kaset mengenai pelajaran bahasa Inggris (49 judul), (8) slide (103 buah), (9) tape mengenai pelajaran bahasa Inggris (350 buah).

Koleksi Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diperoleh melalui:

- 1) pembelian di toko-toko buku dan penerbit (di dalam dan di luar negeri);
- 2) sumbangan dari lembaga-lembaga dan yayasan-yayasan seperti :
  - (a) Yayasan Asia, (b) Yayasan Ford, (c) The British Council, (d) ILDEP; dan
- 3) hadiah dan hadiah tukar (terutama majalah).

Untuk membantu pengunjung perpustakaan dalam menggunakan koleksi dibuatlah katalog dengan sistem klasifikasi Dewey (*Dewey Decinal Classification*), sedangkan untuk menentukan subyek buku *Sear's List of Subject Heading* sebagai pedoman. Katalog-katalog tersebut disusun dalam empat macam penyusunan sebagai berikut.

- 1) Katalog pengarang (*author catalog*), digunakan bila pengunjung hanya ingat nama pengarangnya,
- 2) Katalog judul (*title catalog*), digunakan bila pengunjung hanya ingat judul bukunya.
- 3) Katalog subyek (*subject catalog*), digunakan jika pengunjung lupa akan nama pengarang dan judul buku yang dicarinya.
- 4) *Shelf list*, katalog yang dipakai oleh petugas perpustakaan dalam pemeriksaan buku-buku perpustakaan.

#### **e. Keadaan Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Sekarang**

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kini sudah semakin dikenal oleh para peminat bahasa dan sastra. Ruangan yang cukup memadai dengan koleksi yang cukup lengkap, ditambah dengan AC yang dilengkapi perpustakaan telah menarik lebih banyak pengunjung. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik pengunjung perpustakaan.

Pengunjung perpustakaan bisa bersifat perorangan, dan dapat pula bersifat rombongan seperti pelajar, mahasiswa, peserta penataran dan peserta kursus perpustakaan. Di samping itu perpustakaan juga menerima petugas dari lembaga lain yang mengadakan latihan kerja.

Pada masa mendatang ruang perpustakaan yang sekarang mungkin tidak cukup lagi menampung arus pengunjung dan jumlah koleksi yang kian meningkat, ditambah pula dengan tugas perpustakaan sebagai depot buku dan majalah terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang juga bertambah jumlahnya.

### 3.3.2 Laboratorium Fonetik

Laboratorium fonetik merupakan sarana yang penting dalam kegiatan penelitian bahasa dan pengembangan ilmu bahasa. Oleh karena itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang salah satu tugas pokoknya mengadakan penelitian kebahasaan di Indonesia, berusaha membangun laboratorium fonetik. Hal itu baru dapat terwujud pada akhir tahun 1975 melalui program kerja sama dengan pihak Ford Foundation. Laboratorium fonetik tersebut mempunyai peralatan yang terdiri dari sebuah sonograf, sebuah palatograf, dan beberapa alat-alat lain sebagai perlengkapan kedua alat pokok tersebut.

Laboratorium Fonetik tersebut mempunyai tugas untuk (1) mengumpulkan data fonetik bahasa-bahasa Nusantara, (2) membuat deskripsi fonetik bahasa-bahasa Nusantara itu untuk mendapatkan deskripsi linguistik (fonologis) yang benar mengenai bahasa-bahasa di Nusantara, (3) mempersiapkan deskripsi fonetik yang praktis mengenai bahasa-bahasa tertentu untuk keperluan membantu orang-orang yang mempelajari bahasa-bahasa itu, (4) mengumpulkan data fonetik untuk keperluan terapi bagi orang-orang yang mengalami kesukaran dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa dan bagi mereka yang mengalami kerusakan/operasi alat-alat bicara, (5) menyebarluaskan data/informasi khususnya yang menyangkut bunyi-bunyi bahasa Nusantara untuk keperluan pengembangan ilmu fonetik dan ilmu bahasa pada umumnya.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan baru meliputi hal-hal berikut.

- 1) Pengumpulan data fonetik (rekaman) bunyi-bunyi bahasa Indonesia dari berbagai daerah (dilakukan dalam rangka kegiatan penelitian prosodi bahasa Indonesia).
- 2) Pengumpulan data fonetik vokal bahasa Indonesia "baku".
- 3) Pembuatan palatogram bunyi-bunyi konsonan bahasa Indonesia.
- 4) Pembuatan sejumlah spektogram bunyi-bunyi (a) bahasa Alor dan (b) vokal bahasa Indonesia, dalam rangka kerja sama kebahasaan dengan pihak luar.

Melalui program *Ford Foundation* Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah mengirimkan dua orang tenaga staf untuk belajar ilmu fonetik di luar negeri. Tenaga tersebut ialah Drs. Hans Lapoliwa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di University of London pada akhir tahun 1977, dan Drs. Lukman Hakim yang telah mengikuti pendidikan dasar dalam bidang fonetik di Bangkok pada tahun 1976 dan bulan September tahun 1978 dikirim lagi ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan lanjutan dalam ilmu fonetik di University of Edinburg.



### 3.3.3 Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ada dua buah yaitu gedung yang terletak di Jalan Diponegoro 82 (lantai atas), Jakarta Pusat sebagai gedung kantor lama (luas 668 m<sup>2</sup>) dan gedung yang terletak di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur sebagai gedung kantor baru (luas 1.275 m<sup>2</sup>). Gedung lama ditempati oleh Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, dan Bagian Tata Usaha. Gedung baru ditempati oleh Bidang Perkamusan dan Peristilahan, Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra, dan sebagian kecil Bagian Tata Usaha. Gedung Balai Penelitian Bahasa Singaraja terletak di Jalan Ngurah Rai 54, Singaraja Bali; gedung Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta terletak di Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta, dan gedung Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang terletak di Kompleks Benteng, Ujungpandang.

#### Daftar Sumber

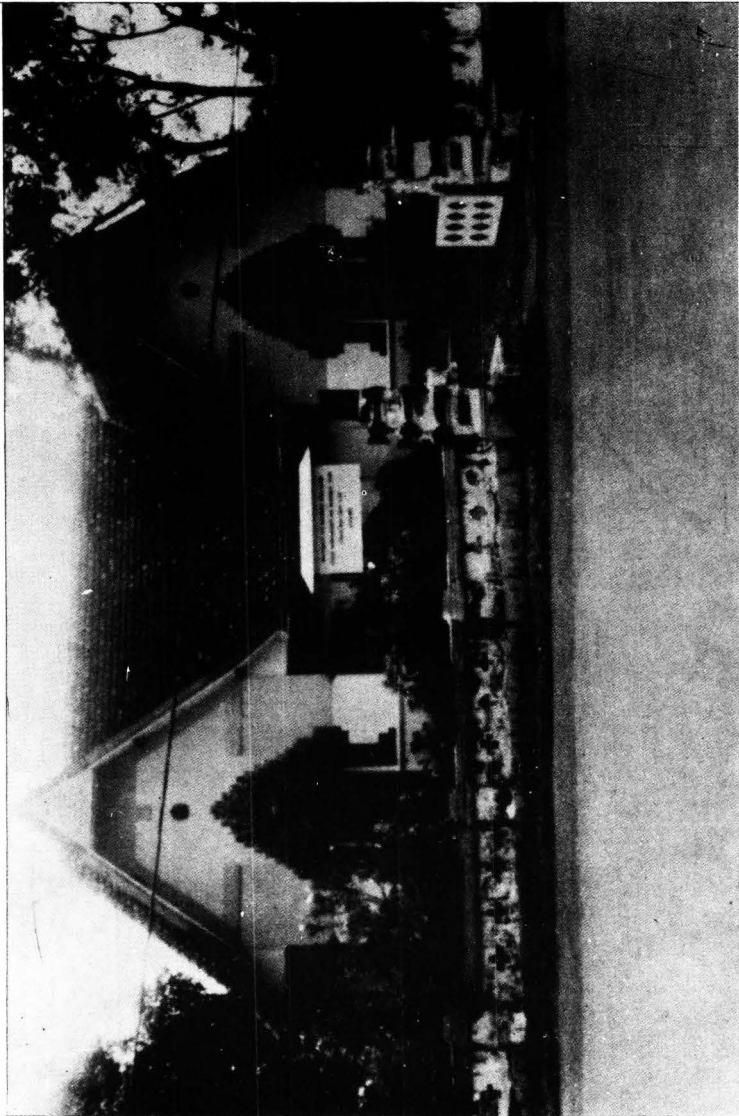
1. Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang "Sejarah dan Perkembangannya."
2. Jassin, HB. *Buku Harian Agustus, 1954*. Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, Bagian Kesusastraan.
3. Jassin, HB. "Laporan Kegiatan Triwulan Tahun 1972."
4. Jassin, HB. *Susunan Balai Bahasa 8-12-1948 (sebuah laporan naskah)*.
5. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/0 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* 1975.
6. "Kongres Bahasa Indonesia Tahun 1954 di Medan."
7. "Laporan Rapat Kerja Pengawas Japu. Puncak, 6-27 April 1961."
8. "Laporan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1974/1975 - 1977/1978."
9. "Laporan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1974/1975 - 1977/1978."
10. "Lembaga Bahasa Nasional dan Kegiatan Bahasa."
11. Maulana, Hermanu. "Lembaga Bahasa Nasional: Sejarah dan Kegiatan-nya."
12. Panitia Penyusun Rancangan Pelita III Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Rancangan Repelita III Kebudayaan Nasional. Darf VII".
13. "Pedoman Kerja Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa."

14. "Rencana Induk Pengembangan Bahasa dan Sastra dalam Repelita III (1979–1984)" (konsep prafinal).
15. "Sejarah Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta."
16. "Sejarah dan Perkembangan Balai Penelitian Bahasa Singaraja."
17. "Senat Mahasiswa Fakultas Sastra."
18. "Surat-surat Keputusan Menteri."

\* \* \*



Gedung Balai Penelitian Bahasa di Jalan I Dewa Nyoman Oka No. 34 Yogyakarta.



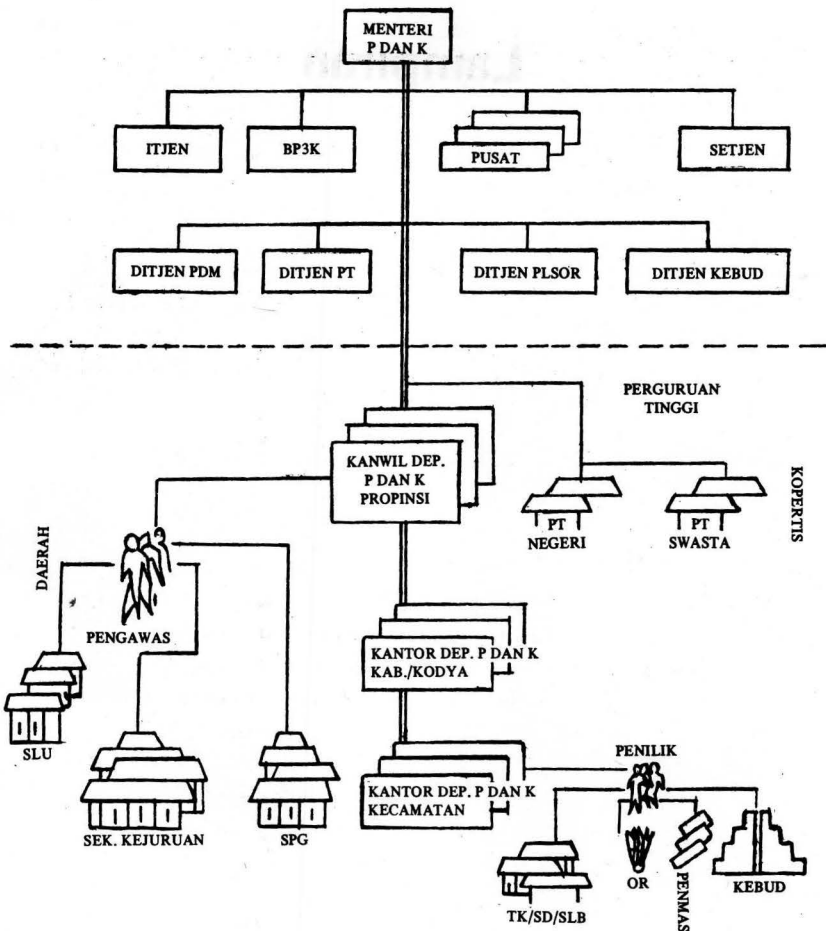
Gedung Balai Penelitian Bahasa di Jalan Kolonel Ngurah Rai No. 54, Singaraja.



## Lampiran

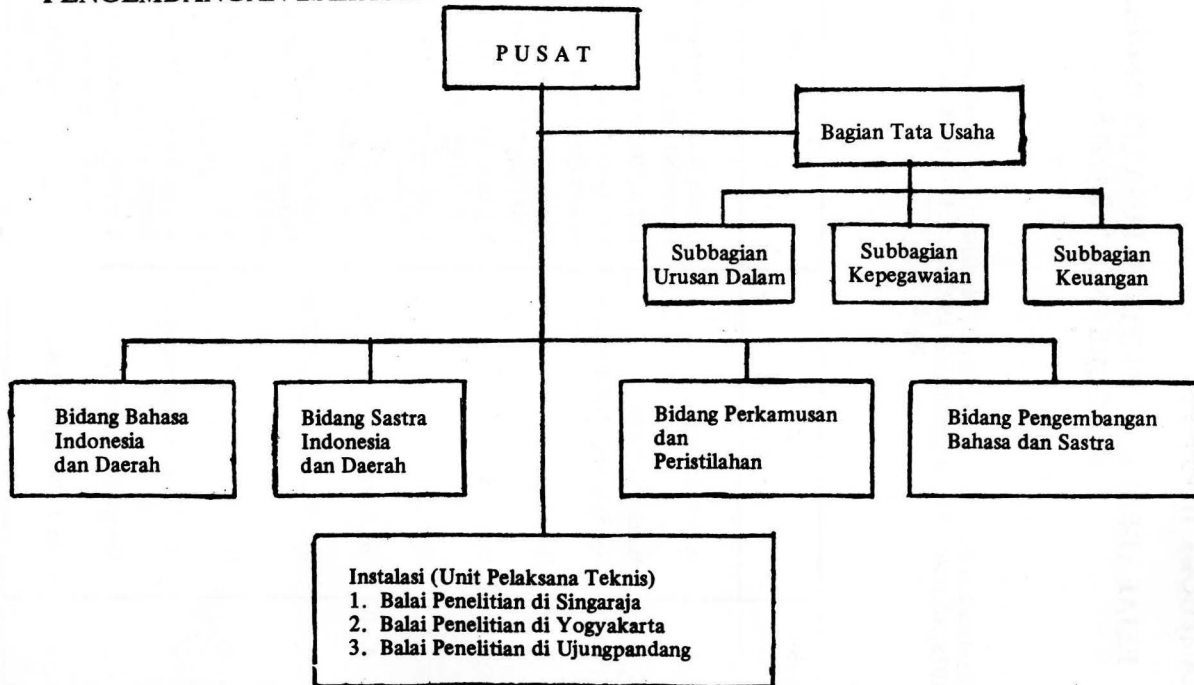
## LAMPIRAN I

## SUSUNAN ORAGANISASI DEPARTEMEN P DAN K



## LAMPIRAN II

### BAGAN ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA



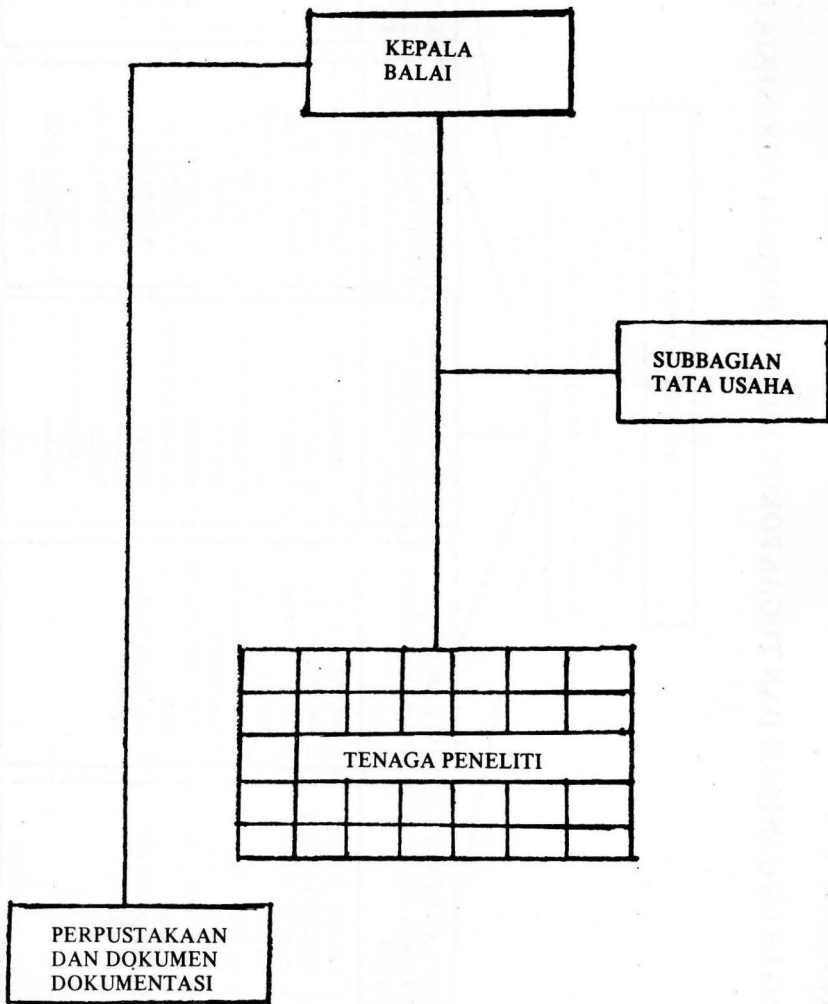


**LAMPIRAN III****PEJABAT-PEJABAT PIMPINAN PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA**

(Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Februari 1975, No. 05/C/1975, tanggal 30 Juni 1975 No. 0216/C/1975, dan tanggal 1 Maret 1977 No. 8139/C/3/77)

No. urut	Nama	Jabatan
1.	Dr. Amran Halim	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
2.	Maman Sumantri	Kepala Bagian Tata Usaha
2.1	Ny. Sukadariyah Wahjudin	Kepala Subbagian Urusan Dalam pada Bagian Tata Usaha
2.2	Drs. Hasjmi Dini	Kepala Subbagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha
2.3	Dewan MS	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha
3.	Drs. S. Effendi	Kepala Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah
4.	Drs. Lukman Ali	Kepala Bidang Sastra Indonesia dan Daerah
5.	Dra. Ny. S.W. Rujati Mulyadi	Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
6.	Dra. Sri Sukesri Adiwirarta	Kepala Bidang Perkamusan dan peristilahan
7.	Drs. I Gusti Ngurah Bagus	Kepala Balai Penelitian Bahasa Singaraja
8.	Drs Mudjanattistomo	Kepala Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta
9.	Drs. F. Pattiasina, M.A.	Kepala Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang

## LAMPIRAN IV

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENELITIAN BAHASA**

## LAMPIRAN V

### BAGAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BIDANG BAHASA INDONESIA DAN DAERAH

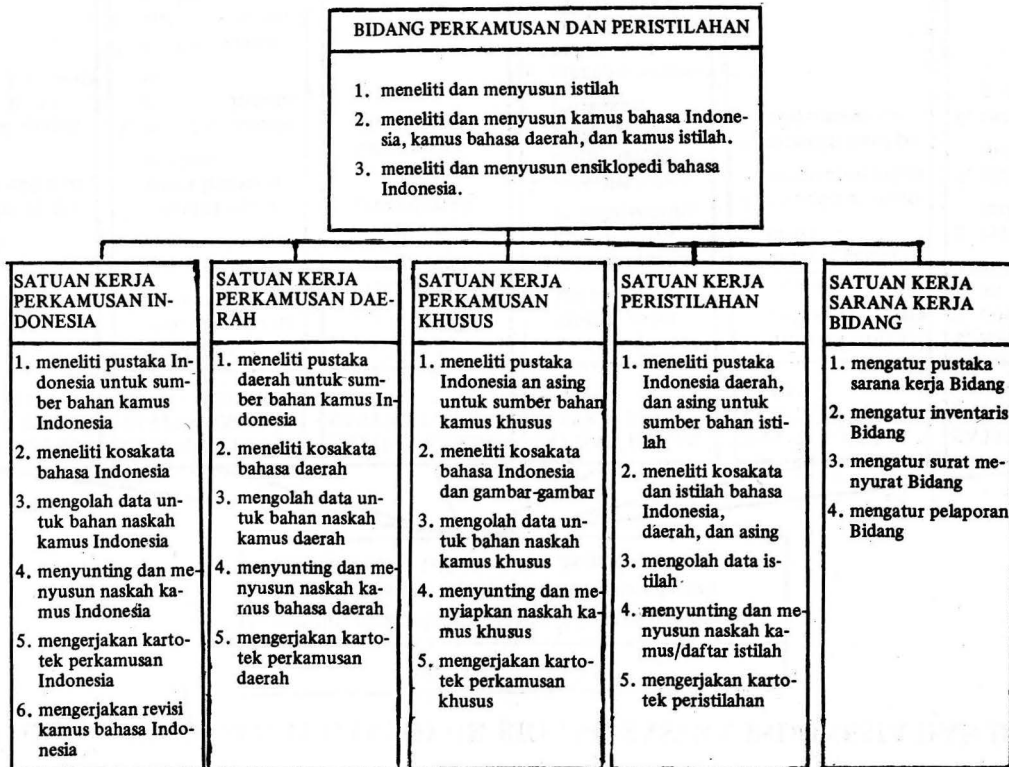


## LAMPIRAN VI

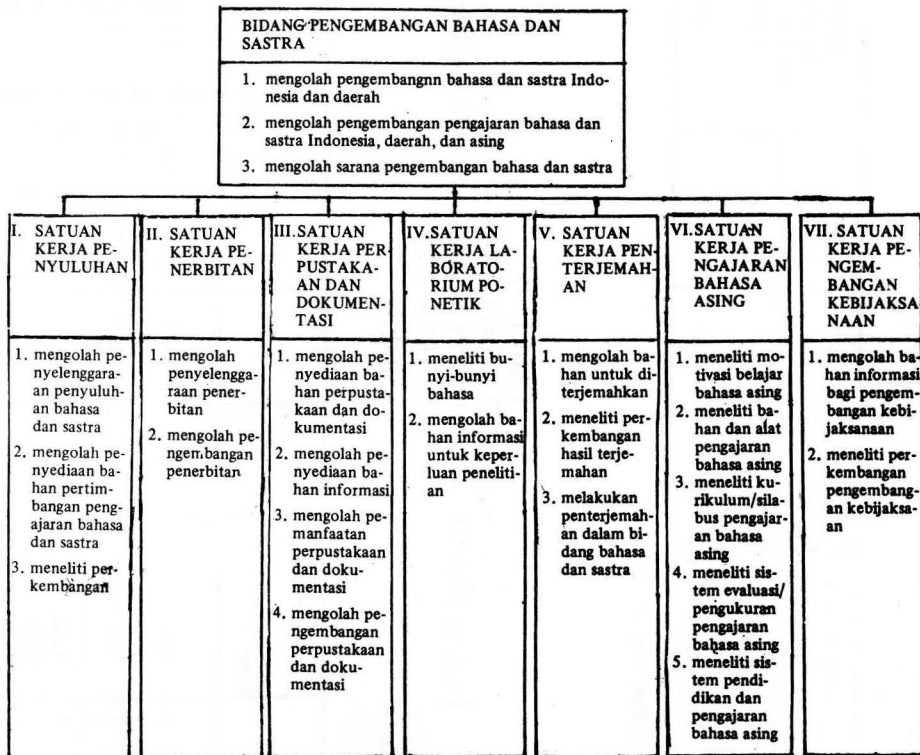
### BAGAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BIDANG SASTRA INDONESIA DAN DAERAH



## BAGAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BIDANG PERKAMUSAN DAN PERISTILAHAN



## BAGAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK BIDANG PENGEMBANGAN BAHASA SASTRA



## LAMPIRAN IX

**TABEL A**  
**SURAT MASUK KELUAR**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1977**  
**(buah)**

Jenis Surat	Januari – Maret	April – Juni	Juli – September	Oktober – Desember
Surat masuk	600	1441	1671	1791
Surat keluar	375	386	632	665

Sumber: Bagian Tata Usaha

**TABEL D**  
**DOKUMEN PERPUSTAKAAN**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1974 – 1977**  
**(judul)**

No.	Jumlah Jenis	1974	1975	1976	1977	1974 – 1977
1.	Buku	5.827	1.781	3.544	3.602	14.754
2.	Majalah	13	34	102	57	206
3.	Mikrofilm	—	177	25	890	1.092
4.	Mikrofis	—	—	663	—	663
5.	Kaset	—	—	18	31	49
6.	Tape	—	—	315	15	350
7.	Slide	—	—	103	—	103

Sumber : Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

## LAMPIRAN X

**TABEL B**  
**HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA**  
**INDONESIA DAN DAERAH**  
**(naskah)**

No.	Penelitian	Hasil					Target				
		1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1974/1978	1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978	1974/1978
1.	Bahasa	16	23	48	29	106 -	18	23	50	38	129
2.	Sastra	2	17	15	10	44	3	21	15	14	53
3.	Pengajaran	6	8	24	27	65	6	8	24	33	71
4.	Istilah	9	16	20	11	56	9	16	20	15	60
	Jumlah	33	64	107	77	271	36	68	109	100	313

Sumber: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.



## LAMPIRAN XI

**TABEL C**  
**PENERBITAN BAHAN INFORMASI**  
**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1974 - 1977**  
**(eksemplar)**

No.	Jenis Penerbitan	1974	1975	1976	1977	1974 - 1977
1.	Majalah <i>Bahasa dan Sastra</i>	3.000	3.000	3.000	4.000	13.000
2.	Majalah <i>Pengajaran Bahasa dan Sastra</i>	3.000	3.000	3.000	4.000	13.000
3.	<i>Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
4.	<i>Pedoman Umum Pembentukan Istilah</i>	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
5.	<i>Intonation</i>	—	2.000	—	—	2.000
6.	<i>Politik Bahasa Nasional I</i>	—	—	3.000	—	3.000
7.	<i>Politik Bahasa Nasional II</i>	—	—	3.000	—	3.000
8.	<i>Pedoman Penulisan Tata Bahasa</i>	—	—	—	3.000	3.000
9.	<i>Kamus Umum Bahasa Indonesia</i>	—	—	10.000	12.000	22.000
10.	<i>Pedoman Ejaan Bahasa Bali yang Disempurnakan</i>	—	—	—	13.000	13.000
11.	<i>Pedoman Ejaan Bahasa Sunda yang Disempurnakan</i>	—	—	—	13.000	13.000
12.	<i>Pedoman Ejaan Bahasa Jawa yang Disempurnakan</i>	—	—	—	13.000	13.000
13.	<i>Kamus Bahasa Angkola Indonesia</i>	—	—	—	2.000	2.000
14.	<i>Kamus Bahasa Banjar Indonesia</i>	—	—	—	2.000	2.000
15.	<i>Kamus Bahasa Biak Indonesia</i>	—	—	—	2.000	2.000
16.	<i>Kamus Bahasa Indonesia Bali</i>	—	—	—	2.000	2.000
17.	<i>Kamus Dialek Jawa Banten Indonesia</i>	—	—	—	2.000	2.000
18.	<i>Kamus Bahasa Madura Indonesia</i>	—	—	—	2.000	2.000
19.	<i>Kamus Bahasa Mandar Indonesia</i>	—	—	—	2.000	2.000
Jumlah		22.000	24.000	38.000	92.000	176.000

**Sumber :** Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah serta Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah

## LAMPIRAN XII

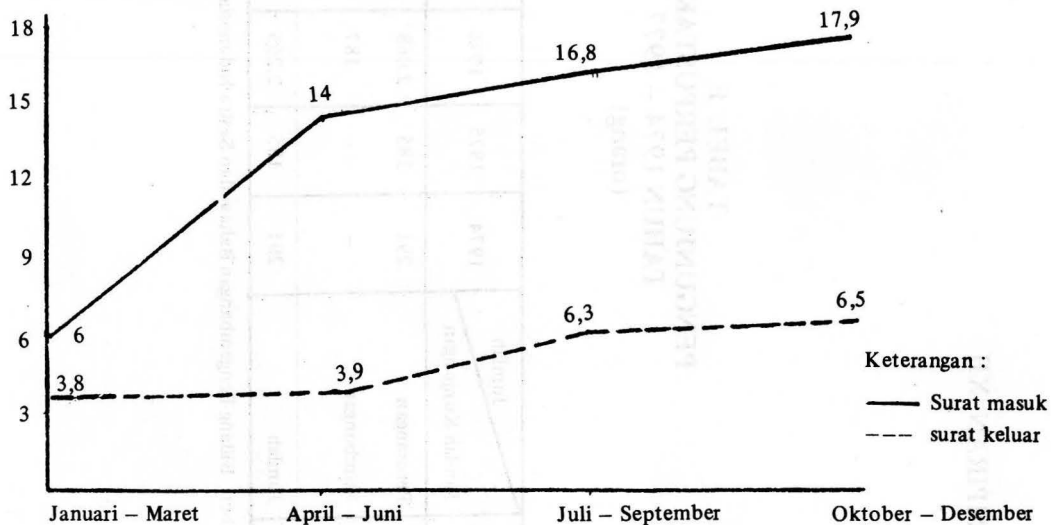
**TABEL E**  
**PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN**  
**TAHUN 1974 – 1977**  
**(orang)**

No.	Jumlah	1974	1975	1976	1977	1974 – 1977
	Jumlah Kunjungan					
1.	Perorangan	291	185	2.068	3.947	6.491
2.	Rombongan	—	—	187	161	798
	Jumlah	291	185	2.255	4.558	7.289

Sumber: Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

### LAMPIRAN XIII

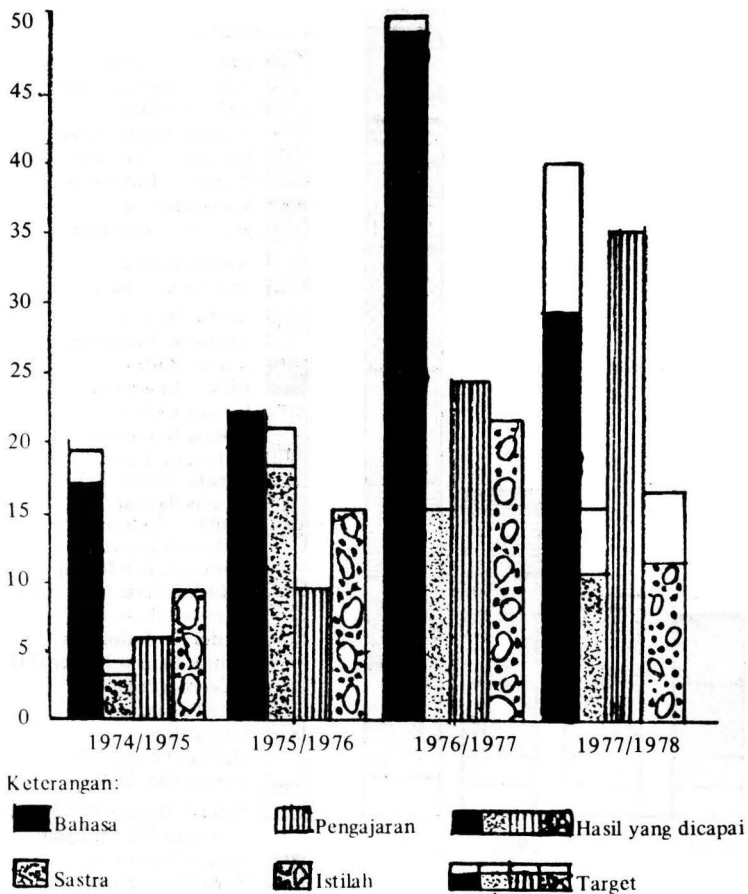
**GRAFIK A**  
**SURAT KELUAR MASUK**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1977**  
(ratusan buah)



Sumber: Bagian Tata Usaha

## LAMPIRAN XIV

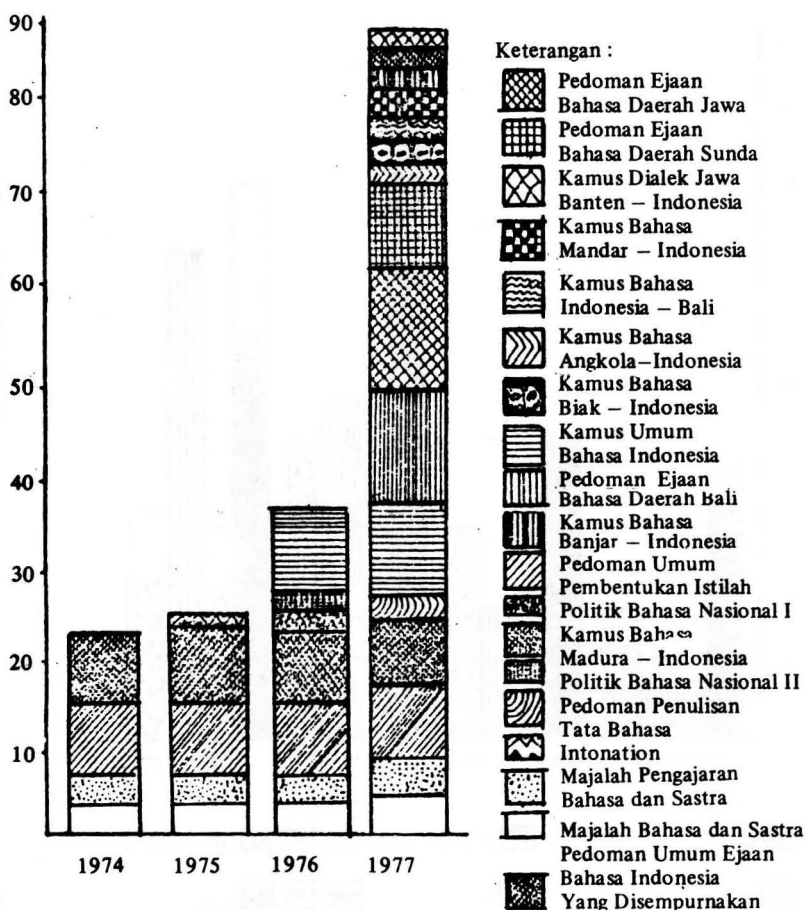
**GRAFIK B**  
**HASIL PENELITIAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**  
**DAN DAERAH TAHUN 1974/1975 – 1977/1978**  
 (naskah)



Sumber: Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah

## LAMPIRAN XV

**GRAFIK C**  
**PENERBITAN BAHAN INFORMASI**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1974 – 1977**  
**(ribuan buah)**

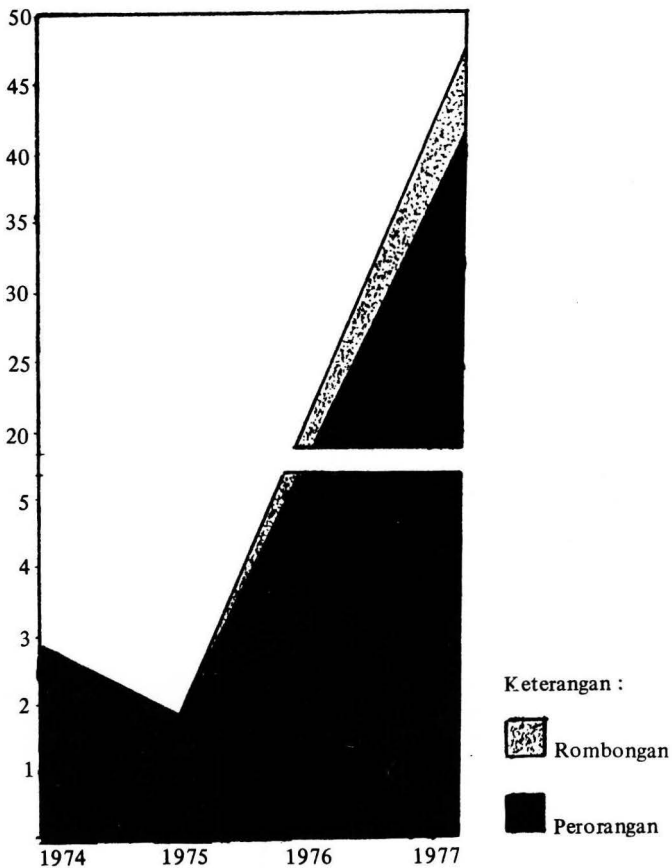


Sumber: Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra.



## LAMPIRAN XVII

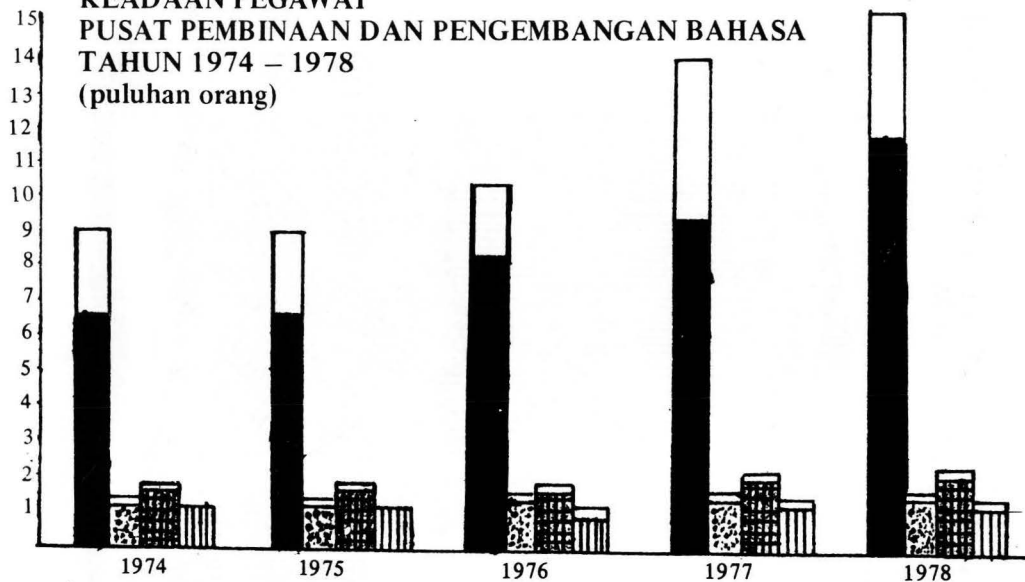
**GRAFIK E**  
**PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1974 – 1977**  
**(ratusan orang)**



Sumber: Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra.

# LAMPIRAN XVIII

**GRAFIK F**  
**KEADAAN PEGAWAI**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**TAHUN 1974 – 1978**  
 (puluhan orang)



Keterangan:

■ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

▨ Balai Penelitian Bahasa Singaraja

■ Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta

▨ Balai Penelitian Bahasa Ujungpandang

■ Pegawai Organik

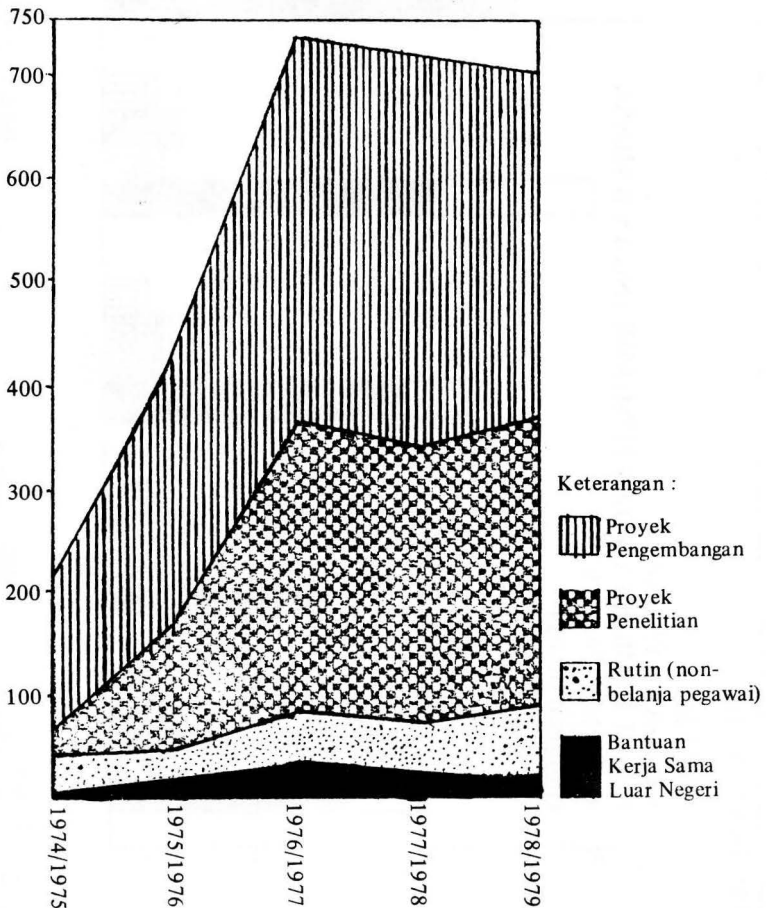
□ Pegawai Non Organik

Sumber: Bagian Tata Usaha



## LAMPIRAN XIX

**GRAFIK G**  
**REALISASI BIAYA**  
**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**  
**DALAM TAHUN 1974 – 1978**  
 (jutaan rupiah)

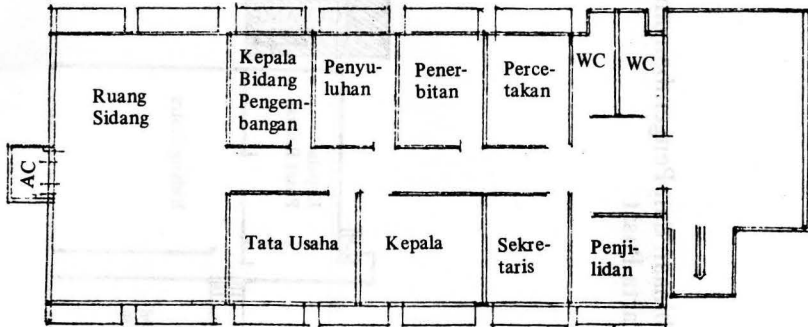


Sumber: Bagian Tata Usaha

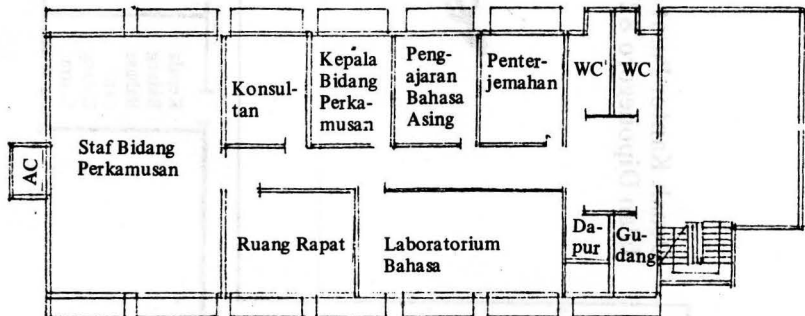
# LAMPIRAN XXI



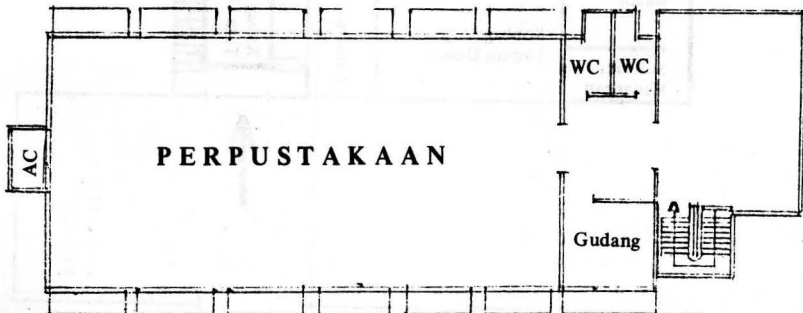
## LAMPIRAN XXII

DENAH GEDUNG PUSAT PEMBINAAN  
DAN PENGEMBANGAN BAHASA RAWAMANGUN

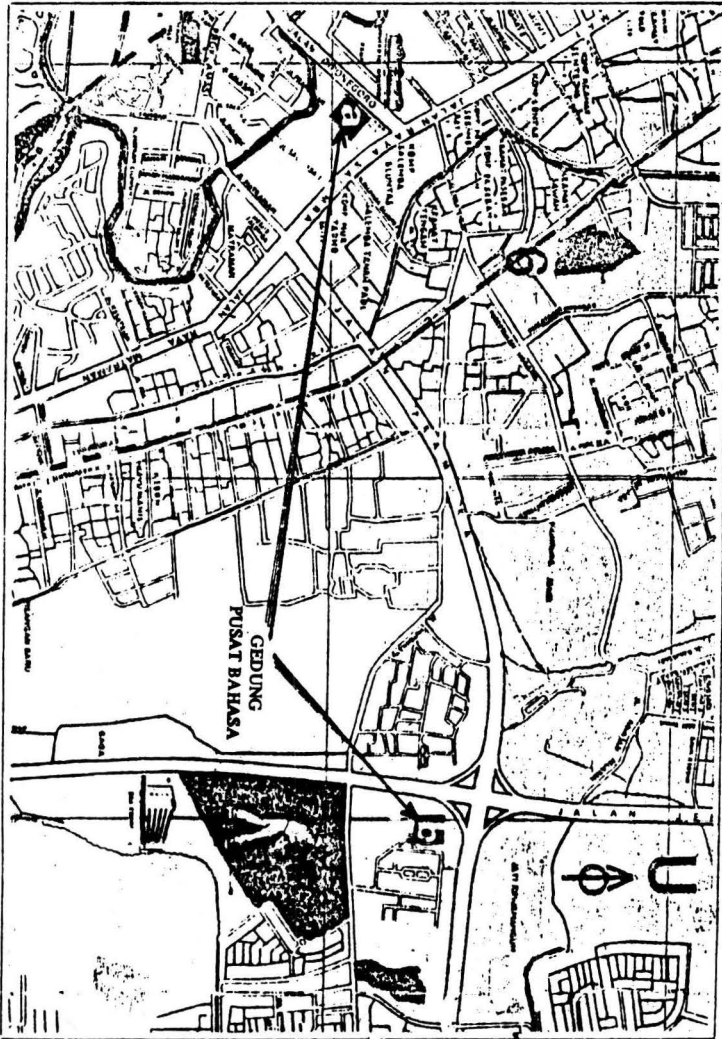
Lantai I



Lantai II



Lantai III



POČASJE GEDIMINOWICZÓW  
LITWA XX



**SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PUSAT  
PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA**

**II**

SELARAH DAN PERKEMBANGAN PUSAT  
PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA

II

**BEBERAPA PANDANGAN  
TERHADAP USAHA  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**

---

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**



BEBERAPA PANDANGAN  
TERHADAP USAHA  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

---

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa

### **Editor**

Panitia Kerja Pengolahan Data  
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Maman Sumantri, ketua
2. Hariyanti, sekretaris
3. Atika Syarani, anggota
4. Dendy Sugono, anggota
5. Anita K. Rustapa, anggota
6. Adi Sunaryo, anggota
7. Junaiyah H.M., anggota
8. Atang Amsyahdi, anggota
9. Atidjah Hamid, anggota

Konsultan:

Prof. Dr. Amran Halim,  
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

diterbitkan oleh  
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra  
Indonesia dan Daerah,  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

## PENGANTAR

*Beberapa Pandangan terhadap Usaha Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* ini merupakan cetakan kedua dan perluasan dari edisi pertama yang terbit tahun 1978. Sebagian besar isinya diterbitkan sebagai *Seri Penyuluhan 12: Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jilid 3* oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Naskah edisi kedua yang disusun oleh suatu tim editor ini telah selesai pada tahun 1978. Meskipun penerbitannya agak terlambat, pandangan yang dikemukakan oleh para ahli ini kiranya tetap perlu menjadi perhatian kita. Sehubungan dengan itu, Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah—Jakarta merasa gembira dapat memberikan bantuannya.

Mudah-mudahan terbitnya buku ini dapat memberi manfaat bagi para ahli dan peminat bahasa dan sastra.

Jakarta, Agustus 1983

Dra. Sri Sukezi Adiwimarta  
Pemimpin Proyek Penelitian  
Bahasa dan Sastra Indonesia  
dan Daerah — Jakarta

## TUJUAN DAN SEJARAH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

S. Takdir Alisjahbana



Pada ketika kita menghadapi perayaan 50 tahun Sumpah Pemuda, yaitu sumpah angkatan muda dari seluruh Indonesia yang bukan hanya menumbuhkan setruk-tur kenegaraan Indonesia, tetapi juga menentukan bahasa yang akan menjadi alat dan penjelmaan kehidupan kebudayaan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan di tengah-tengah dunia moderen. Telah selayaknya kita merenungkan kembali apakah tujuan Sumpah Pemuda tentang bahasa dan hingga manakah tujuan itu

telah tercapai dalam 50 tahun yang segera akan tertinggal di belakang kita

Makin lama makin jelas bagi kita bahwa di antara bermacam-macam kejadian yang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa kita dalam suatu negara kesatuan, kedudukan Sumpah Pemuda jauh mengatasi kejadian-kejadian lain seperti tumbuhnya berbagai himpunan, perkumpulan, pertemuan baik politik maupun kebudayaan karena dalam Sumpah Pemuda itu sekaliannya dirangkum dan disimpulkan sekaligus, jauh lebih luas dari yang dirumuskan oleh bermacam-macam rapat, konferensi, kongres partai-partai politik atau golongan-golongan yang lain, yang masing-masing mempunyai asas dan tujuan. Dengan terbentuknya Indonesia merdeka dan tersusunnya konstitusi untuk seluruh Indonesia pada tahun 1945 selesailah dan terjelmlah isi sumpah pemuda :

1. bertanah air satu, tanah air Indonesia;
2. berbangsa satu, bangsa Indonesia;
3. berbahasa satu, bahasa Indonesia.

Dengan tercapainya itu belumlah berarti bahwa pekerjaan dan usaha bangsa Indonesia telah selesai, sebabnya jelaslah bahwa Sumpah Pemuda itu tidak bermaksud bertanah air satu asal bertanah air satu saja, berbangsa satu asal berbangsa satu saja, dan berbahasa satu asal berbahasa satu saja.

### Catatan penyunting :

Sesuai dengan permintaan penulis, ejaan dalam tulisan ini tidak diubah.

Oleh karena sumpah Pemuda itu diucapkan oleh angkatan muda kita yang duduk di sekolah-sekolah yang paling atas dan termaju ketika itu, telah selakunya kita mesti menafsirkannya bahwa baik tanah air, bangsa maupun bahasa yang dimaksud itu hendaklah sesuatu yang setara dengan negara-negara, bangsa-bangsa, dan bahasa-bahasa yang telah maju pada abad ke-20 ini. Kita sekaliannya tahu bahwa baik tentang tanah air, bangsa, maupun bahasa yang ketiga-tiganya dinamakan Indonesia itu kita dewasa ini belum dapat bergirang hati dan merasa puas oleh karena masih banyak lagi yang harus dibina dan dikembangkan agar tanah air, bangsa, maupun bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang layak di tengah-tengah dunia moderen.

Dalam karangan ini saya akan membatasi diri hanya pada bahasa Indonesia. Untuk melukiskan tujuan dan sejarah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia haruslah kita insaikan bahwa lahirnya gerakan bahasa Indonesia itu pada hakekatnya adalah penjelmaan suatu aliran yang bertentangan sekali dari kenyataan masyarakat dan kebudayaan dewasa itu. Kita sekalian tahu bahwa sejak bagian kedua abad ke-19 sampai abad ke-20 tahun dua puluhan, dalam masyarakat jelas sekali kelihatan orang menghendaki bahasa Belanda oleh karena disadari bahwa dengan bahasa Belanda bukan hanya jabatan dan pekerjaan yang tinggi bayarannya akan terbuka, tetapi bersama itu dunia ilmu yang dalam tiga empat ratus tahun yang akhir ini makin lama makin menguasai kehidupan dunia modern akan dapat dicapai lebih langsung oleh orang yang menguasai bahasa Belanda. Dengan demikian dapatlah kita pahami orang berebut-rebut memasukkan anaknya ke Sekolah Belanda dan kemudian ke Sekolah Bumi Putera Belanda (*Hollandsch-Inlandsche School*). Dengan memasuki kedua jenis sekolah itu, terbuka jalan ke Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya ke Sekolah Menengah Atas sampai ke Universitas. Siapa yang menamatkan pendidikan Belanda yang modern itu dengan sendirinya masuk ke dalam golongan elita penjajahan yang sebagian besar terjadi dari orang Belanda, orang Indo, dan sebagian kecil orang Indonesia. Akan tetapi dengan menyadari ini, segera timbul di pihak Belanda suatu kekhawatiran melihat kegairahan bangsa Indonesia untuk mendapat pendidikan Barat, sebab dari orang-orang yang mendapat pendidikan inilah lambat-laun bukan hanya timbul permintaan akan pangkat dan kedudukan yang makin lama makin tinggi, tetapi juga lahir keritik-keritik dan kemudian malahan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, sehingga pihak Belanda untuk kepentingannya sendiri terpaksa membatasi jumlah sekolah-sekolah yang memberi kesempatan kepada orang Indonesia mencapai pendidikan Barat yang tertinggi. Dengan pembatasan ini, dengan sendirinya terbataslah kemungkinan bangsa Indone-

sia untuk mempelajari bahasa Belanda sedalam-dalamnya sebagai jembatan ke arah kemajuan dunia moderen. Terhadap keadaan inilah bangsa Indonesia lambat-laun merasa kecewa dalam harapannya. Bahasa Belanda yang menjadi jembatan ke arah kemajuan dunia moderen itu amat sempit sehingga bangsa Indonesia yang tidak dapat ditahan lagi dalam gelombang kemajuannya terpaksa mencari jalan dan jembatan-jembatan baru. Dengan demikian, kembalilah bangsa Indonesia kepada dirinya sendiri. Itulah waktunya ketika bahasa Indonesia mendapat perhatian sebagai salah satu bahasa kepulauan Indonesia ini yang telah berabad-abad menjadi *lingua franca*, yaitu bahasa penghubung antargolongan bangsa yang tidak mempunyai bahasa yang sama. Dengan demikian, dalam Sumpah Pemuda, bahasa Melayu yang berabad-abad dipakai sebagai *lingua franca* itu diangkat menjadi bahasa persatuan yang dengan sendirinya di sisi itu mesti juga mempunyai fungsi sebagai bahasa moderen.

Apakah artinya sumpah itu? Bangsa Indonesia hendak menyatakan bahwa rakyat yang mempunyai berpuluh dan beratus bahasa menghendaki satu bahasa sebagai bahasa bersama yang diberi nama bahasa Indonesia, sesuai dengan nama tanah air dan bangsanya yang baru.

Dilihat dari jurusan ini, bahasa Indonesia itu mesti dikembangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya bahasa ini menjadi bahasa perhubungan bersama yang terluas di seluruh Indonesia. Di sini kemungkinan peluasannya sampai ke desa-desa yang paling terpencil adalah tugasnya yang kedua, yang tak kurang pentingnya untuk menjadi bahasa moderen abad ke-20, sekurang-kurangnya sama fungsinya dengan bahasa Belanda sebelumnya.

Dalam zaman penjajahan Belanda modal pergerakan kebangsaan Indonesia hanyalah kecakapan berorganisasi dan mengucapkan keinginan untuk hidup merdeka sebagai suatu bangsa. Tak banyak yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dan membina bahasa Indonesia itu. Bahasa Belanda tetap menjadi bahasa yang berkuasa pada tingkat atas, bukan hanya dalam masyarakat penjajahan tetapi juga dalam masyarakat bangsa Indonesia — meskipun di sana-sini kelihatan ada usaha untuk lebih banyak memakai bahasa Indonesia dalam rapat-rapat perkumpulan, partai ataupun dalam penerbitan-penerbitan. Akan tetapi tentang penerbitan-penerbitan hasil rapat dalam bahasa Indonesia pun ketika itu masih berkuasa usaha yang dijalankan oleh pihak Belanda dengan perantaraan Balai Pustaka dengan memakai nama bahasa Melayu karena pihak Belanda tak menerima nama bahasa Indonesia.

Meskipun demikian, kelihatan kepada kita dewasa itu, terbit karangan-karangan yang berarti dalam perkembangan sastra Indonesia dari tangan penulis-penulis Indonesia di luar Balai Pustaka. Penting disebut di sini karangan-ka-

rangan Rustam Effendi, Yamin, dan Sanusi Pane. Lebih teratur dan lebih nyata tujuannya maupun rumusannya adalah majalah Pujangga Baru yang terbit di bawah pimpinan Armijn Pane, Amir Hamzah, dan Sutan Takdir Alisjahbana pada tahun 1933. Majalah ini, meskipun tidak tersebar luas ketika itu, dengan jelas mengucapkan keinginannya untuk perkembangan bahasa, kesusasteraan, dan kebudayaan Indonesia. Yang sangat menarik hati adalah melihat bagaimana dalam sepuluh tahun hidupnya sebelum perang dunia II tujuan majalah itu beberapa kali diperluas dan dipertegas:

- a. tahun 1933, majalah kesusasteraan dan bahasa serta kebudayaan umum;
- b. tahun 1934, majalah kesusasteraan dan bahasa serta seni dan kebudayaan;
- c. tahun 1935, pembawa semangat baru dalam kesusasteraan, seni, kebudayaan, dan soal-soal masyarakat umum;
- d. tahun 1936, majalah bulanan pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan baru, kebudayaan persatuan Indonesia.

Dalam nomor dua majalah itu dilukiskan oleh Sutan Takdir Alisjahbana sejarah perjuangan bahasa Indonesia, diberinya definisi tentang apa yang dinamakan bahasa Indonesia itu. Menurut Prof. A. Teeuw (*Modern Indonesia Literature*, 1967: 31) hingga sekarang pun belum ada suatu karangan yang lain yang mengatasi karangan itu. Dan taklah mengherankan bahwa dari majalah itulah datang anjuran untuk mengadakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo pada tahun 1938, jadi sepuluh tahun setelah Sumpah Pemuda, atau empat puluh tahun sebelum perayaan lima puluh tahun Sumpah Pemuda tahun ini. Dalam Kongres itu telah mulai jelas bahwa bahasa Indonesia mesti dikembangkan dan dibina ke berbagai penjuru seperti kelihatan dalam rumusan resolusinya seperti di bawah ini.

a. Sesudah mendengarkan dan memperkatakan *prae-advis* tuan Mr. Amir Sjarifoeddin tentang *Menyesuaikan kata dan paham asing ke dalam bahasa Indonesia*, maka Kongres ternyata pada umumnya setuju mengambil kata-kata asing untuk ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan yang sekarang, Kongres setuju kalau kata-kata itu diambil dari perbendaharaan umum. Pekerjaan itu hendaklah dijalankan dengan hati-hati, karena itu, perkara itu patutlah diserahkan kepada suatu badan.

b. Sesudah mendengarkan dan bertukar pikiran tentang *prae-advis* tuan St. Takdir Alisjahbana hal *Pembaharuan bahasa dan usaha mengaturnya*,

maka sepanjang pendapat Kongres, sudah ada pembaruan bahasa yang timbul karena ada cara berpikir yang baru, sebab itu merasa perlu mengatur pembaruan bahasa itu.

c. Sesudah mendengar *prae-advis* tuan St. Takdir Alisjahbana dalil ke-6 dan Mr. Muh. Yamin, maka Kongres berpendapat bahwa *gramatica* yang sekarang tidak memuaskan lagi dan tidak menurut wujud bahasa Indonesia, karena itu perlu menyusun *gramatica* baru yang menurut wujud bahasa Indonesia.

d. *MOSI*. Orang dari berbagai-bagai golongan, dari berbagai-bagai daerah, berkongres di Solo pada tanggal 25—28 Juni 1938, setelah mendengarkan *prae-advis* tuan K. St. Pamoentjak tentang *Hal ejaan bahasa Indonesia* dan setelah bertukar pikiran tentang hal itu, maka yang hadir berpendapat: (1) bahwa ejaan baru tidak perlu diadakan, sampai Kongres mengadakan ejaan sendiri: (2) bahwa ejaan yang sudah berlaku, yaitu ejaan van Ophuysen untuk sementara boleh diterima; tetapi karena mengingat kehematan dan kesederhanaan, perlu dipikirkan perubahan seperti yang disebutkan oleh *prae-adviseur*, karena itu berpengetahuan:

- 1) supaya orang Indonesia selalu memakai ejaan yang tersebut;
- 2) supaya fraksi Nasional di Volksraad mendesak Pemerintah untuk memakai ejaan seperti yang dimaksudkan oleh Kongres;
- 3) supaya perhimpunan kaum guru suka membantu putusan Kongres.

e. Setelah mendengar *prae-advis* tuan Adi Negoro tentang *Bahasa Indonesia di dalam persuratkabaran*, maka sepanjang pendapat Kongres, sudah waktunya kaum wartawan berdaya upaya mencari jalan untuk memperbaiki bahasa di dalam persuratkabaran. Karena itu berharap supaya Perdi bermupakat tentang hal itu dengan anggota-anggotanya dan komisi yang akan dibentuk oleh *Bestuur Kongres* yang baru bersama-sama dengan *Hoofdbestuur Perdi*.

f. Sesudah mendengarkan *prae-advis* Ki Hadjar Dewantara, dalil ke-10 yang disokong oleh tuan Dr. R.M. Ng. Poebatjaraka, maka Kongres Bahasa Indonesia memutuskan bahwa Kongres berpendapat dan menganjurkan, supaya di dalam perguruan menengah diajarkan juga *ejaan internasional*.

g. Sesudah mendengarkan *prae-advis* tuan Soekardjo Wirjopranoto tentang *Bahasa Indonesia dalam badan perwakilan* yang diucapkan dan dipertahankan oleh tuan R.P. Soeroso, maka Kongres berpendapat dan mengeluarkan pengharapan; pertama supaya mulai saat ini bahasa Indonesia dipakai dalam segala badan perwakilan sebagai bahasa perantaraan (*voertaal*); kedua supaya me-



nunjang usaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sah dan bahasa untuk undangan-undangan negeri.

h. Sesudah mendengarkan *prae-advis* tuan-tuan St. Takdir Alisjahbana, Mr. Muh. Yamin, dan Sanusi Pane, maka Kongres berpendapat bahwa untuk kemajuan masyarakat Indonesia, penyelidikan bahasa dan kesusasteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, perlu didirikan Perguruan Tinggi dengan selekas-lekasnya.

Sesudah itu sekali lagi Pujangga Baru tampil ke muka memperjuangkan bahasa dan sastra Indonesia (*Pujangga Baru*, September – Oktober 1940), yaitu pada ketika perang dunia ke-2 sudah di ambang pintu. Pada ketika itu pihak Belanda yang dalam suasana terancam peperangan, ingat kembali akan tugas etiknya, cepat-cepat menyusun sebuah universitas dengan mendirikan di sisi fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas teknik sebuah fakultas sastra dengan berbagai cabang-cabangnya. Dalam fakultas sastra itu pelajaran sastra dan bahasa Indonesia akan mempunyai kedudukan yang penting. Usaha itu baru bermula setahun sebelum pecah perang pasifik dan Jepang mendarat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1942.

Dengan pendudukan, berhentilah bukan hanya riwayat penjajahan Belanda tetapi juga riwayat bahasa Belanda di negeri ini. Bahasa itu dengan keputusan pihak Jepang menjadi bahasa yang terlarang, sehingga bahasa Indonesia yang sampai ketika itu merana hidupnya, tiba-tiba dengan tak diduga-duga mendapat kesempatan yang sebaik-baiknya untuk berkembang. Dari semula, dan sesuai dengan cita-cita Jepang untuk meniponkan seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara, telah jelas bahwa hanyalah soal waktu saja lagi, bahwa bahasa Jepang akan menjadi bahasa pemerintahan, bahasa hukum, bahasa sekolah untuk seluruh masyarakat Indonesia jauh mengatasi kedudukan bahasa Belanda dahulu. Akan tetapi jelas pula, bahwa cita-citanya itu hanya akan dapat dicapainya dalam waktu yang panjang dan akan menjelma dengan sempurna apabila Dai Nippon menang dalam peperangan yang dahsyat itu. Sebelum sampai ke sana Bala tentara Dai Nippon perlu mengerahkan bukan hanya tenaga rakyat Jepang tetapi juga rakyat daerah-daerah yang didudukinya untuk menghadapi musuhnya yang pada dasarnya jauh lebih kuat dari dia. Dalam usaha untuk mengerahkan segala orang dan segala tenaga dari bangsa Indonesia bagi peperangan bangsa Jepang tak ada jalan lain dari pada memakai bahasa Indonesia untuk mencapai rakyat Indonesia sampai ke pelosok desa-desa di pegunungan dan di pulau-pulau yang terpencil, dengan menyisihkan bahasa-bahasa daerah. Bala tentara Dai Nippon dari Jepang telah bersiap membawa alat-alat bahasa Indonesia seperti kamus dan orang-orang yang terlatih berba-

hasa Indonesia untuk menggerakkan massa bangsa Indonesia dalam peperangan yang maha dahsyat itu. Demikianlah, bala tentara Dai Nippon yang datang menggantikan kekuasaan penjajahan Belanda menjadi tenaga pengembangan bahasa Indonesia yang terkuat, dengan menyisihkan bukan hanya bahasa Belanda tetapi juga bahasa-bahasa daerah. Terlampaui berat dan banyak memakan waktu bagi bangsa Jepang untuk dapat memakai bahasa-bahasa daerah dalam propagandanya yang sebagai topan mengguncang seluruh masyarakat kebudayaan Indonesia.

Segera akan terlihat bahwa usaha pengembangan bahasa Indonesia ke segala daerah dan ke segala tingkat masyarakat tidak mencukupi. Meskipun kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang amat mudah menyesuaikan diri, ketika ia dengan sekaligus dipakai sebagai bahasa pengantar dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi, dalam segala lapangan administrasi dan hukum, dalam segala jabatan dan lembaga-lembaga, ternyata bahwa ia menghendaki pembinaan yang istimewa agar dalam waktu yang secepat-cepatnya dapat menjalankan fungsi bahasa moderen dalam hubungan dunia moderen yang dikuasai oleh ilmu dan teknologi. Demikianlah, supaya jangan timbul kekacauan dalam berbagai jabatan, dalam sekolah, dalam hukum, dan sebagainya, mau tak mau pemerintah Jepang mestilah mengadakan suatu badan yang membina bahasa Indonesia, agar bahasa itu dapat melakukan fungsinya dengan wajar dalam lingkungan kehidupan dunia moderen dalam arti yang luas. Pada tanggal 21 Oktober 1942 didirikanlah Komisi Bahasa Indonesia yang susunan organisasi dan personalianya sebagai berikut.

Ketua : tuan Mori (Pemimpin Kantor Pengajaran).

Wakil ketua : tuan Ichiki  
tuan Kagami

Penulis : tuan Mr. R. Soewandi.

Penulis ahli : tuan Mr. S. Takdir Alisjahbana

Anggota : tuan-tuan: Abas St.Pamoentjak n.s.; Mr.Amir Sjarifoedin, Armijn Pane, Dr. Aulia, St.P. Boestami, Prof.P.A. Hoesein Djajadiningrat, Drs. M. Hatta, S. Mangoensarkoro, Minami, K. St. Pamoentjak, Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka, R.P. Prawiradinata, Dr. R. Prijono, H.A. Salim, Sanoesi Pane, Ir. S. Tjokronolo, Mr. R. Soedjono, Ir. R. Soekarno, Mr. R.M. Soemanang, M. Soetardjo, prof. Oehara.

Komisi ini segera dibagi dalam tiga bagian:

- a. Komisi istilah yang diketuai oleh Mohammad Hatta, tugasnya menciptakan istilah-istilah baru yang diperlukan untuk berbagai jenis ilmu dan teknologi ataupun cabang-cabang kehidupan yang lain dalam hubungan sekolah, jabatan, dan masyarakat luas. Jelaslah bahwa seksi ini adalah yang paling mendesak; segera ditimbulkan sub-sub seksi untuk ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu hukum, ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan sebagainya.
- b. Seksi yang kedua adalah seksi tata bahasa. Pada waktu permulaan pendudukan Jepang telah ada beberapa tata bahasa, antara lain yang ditulis oleh Sutan Muhammad Zain. Pekerjaan menulis tata bahasa tentulah tak dapat tergesa-gesa, sebab mesti berdasarkan pemikiran dan penyelidikan yang agak luas dan mendalam.
- c. Seksi ketiga adalah seksi kata-kata baru dalam kehidupan setiap hari yang ketika itu amat banyak datang menyerbu ke dalam bahasa Indonesia baik dari bahasa Jawa, Minangkabau, Sunda, dan lain-lainnya maupun dari bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Jepang, sedangkan di sini itu tentu banyak kata-kata baru diciptakan oleh khalayak ramai. Dalam seksi ini diputuskan hingga mana kata-kata baru itu telah dapat diterima sebagai kata-kata bahasa Indonesia dan perlu dimasukkan ke dalam kamus bahasa Indonesia yang lengkap.

Sejak dari semula Kantor Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh S. Takdir Alisjahbana menjadi pusat bagi seniman dan pemuda-pemuda yang tidak senang akan keadaan politik dan kebudayaan. Dewasa itu Chairil Anwar boleh dikatakan setiap hari datang ke sana membawa bermacam-macam berita dan cerita, sedangkan Subadio Sastrosatomo yang bekerja di kantor itu hampir setiap hari dikunjungi kawan-kawan mahasiswanya. Rapat-rapat seksi dan sub-seksi pun sering dicampuri percakapan tentang keadaan politik dan kabar-kabar rahasia. Taklah mengherankan bahwa pada tahun 1944 S. Takdir Alisjahbana sebagai Pemimpin Kantor Bahasa Indonesia dan Subadio Sastrosatomo ditangkap karena kegiatan politik. Maka sejak itu Komisi Bahasa Indonesia terhentilah sekalian aktivitasnya.

Dalam zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia didirikan kembali di Jakarta Panitia Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh S. Takdir Alisjahbana sebagai ketua dan Amin Singgih sebagai penulis. Sampai pada waktu penyerahan kedaulatan, panitia ini dapat menambahkan sejumlah kata-kata istilah ba-

ru. Pada ketika itu pula S. Takdir Alisjahbana menyelesaikan penyelidikan kamus dan menerbitkan *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* jilid I yang hingga sekarang telah mengalami cetakan yang ke - 42. Sementara itu W.J.S. Poerwadarminta menyelesaikan kamus umum yang memuat kata-kata bahasa Indonesia yang baru dalam hubungan Universitas Indonesia yang setelah penyerahan kedaulatan memimpin pembinaan bahasa Indonesia di sebuah lembaga yang bernama Lembaga Bahasa Indonesia. Kemudian Lembaga Bahasa Indonesia itu berubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

jalan 36 tahun. Tentu perkembangan dan kemajuan bahasa Indonesia amat besar dalam waktu itu, sehingga sekarang sungguh-sungguh kita dapat berkata bahwa bahasa Indonesia tidak dapat digugat lagi sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi ataupun bahasa pergaulan masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan bahasa-bahasa kebangsaan dan resmi negara-negara yang baru seperti India, Sailand, Filipina, dan negara-negara Afrika ataupun negara-negara Arab kita dapat berkata bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara baru mempunyai kedudukan yang istimewa. Sejak Indonesia merdeka kita tidak pernah mengalami pertikaian yang berhubungan dengan soal bahasa seperti di India, Sailand, dan lain-lainnya. Di masyarakat Indonesia yang mempunyai sekitar 250 bahasa daerah, tidak ragu-ragu bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi yang bertambah dalam dan luas dikuasai oleh seluruh rakyat Indonesia berkat pendidikan yang dari Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi boleh dikatakan hampir seluruhnya memakai bahasa Indonesia.

Akan tetapi adakah ini berarti bahwa cita-cita kita telah tercapai sepenuhnya? Jauh daripada itu. Sebab cita-cita kita, bukan hanya mendapat suatu bahasa yang luas tersebar di seluruh Indonesia tetapi juga suatu bahasa yang menjadi alat yang baik, kalau mungkin yang terbaik untuk pemikiran dan kebudayaan moderen. Yang terakhir ini bukan sesuatu yang tak mungkin. Sudah berapa kali saya katakan bahwa bahasa moderen sekarang adalah hasil dari pertumbuhan yang kacau, kebetulan, dan tak terpimpin seperti kelihatan oleh kita, dalam ejaan bahasa Inggeris atau perubahan kata kerja bahasa Perancis. Kita masih dapat mengadakan aturan yang lebih ketat, dengan perantaraan sekolah yang berdisiplin disebarkan kepada rakyat banyak. Akan tetapi untuk itu golongan-golongan dan lembaga-lembaga yang memimpin pertumbuhan dan perkembangan bahasa mesti berpikir teratur dan efisien. Linguistik diskriptif dapat membantu, tetapi yang sangat kita perlukan adalah linguistik konstruktif.

Sebagai penutup karangan ini saya hanya hendak menunjukkan beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk perkembangan bahasa Indonesia, selanjutnya agar ia dapat menjadi salah satu bahasa moderen yang penting di dunia, karena keefisienan dan kemudahannya. Tentang jumlah orang yang mempercakapkan bahasa Indonesia dapat diletakkan sebagai bahasa kelima atau keenam di antara bahasa-bahasa di dunia.

Soal yang paling penting yang dihadapi bahasa Indonesia sekarang adalah kurangnya buku-buku dalam bahasa Indonesia, terutama yang menjadi inti dari kebudayaan moderen, yaitu tentang ilmu dan teknologi dalam arti yang seluas-luasnya. Meski bagaimana sekalipun kuatnya aliran untuk mempertahankan atau mencari identitas kebangsaan, tak dapat dielakkan identitas kebangsaan itu mesti mencakup segala perkembangan ilmu, teknologi dan ekonomi moderen yang menyebabkan dunia moderen itu menjadi suatu kebudayaan industri yang maha luas. Hanya dengan menguasai ilmu, teknologi, dan ekonomi — intisari kebudayaan progresif nilai-nilai rohani yang sering kita banggakan itu akan berarti bagi kehidupan bangsa kita. Dan kenyataannya terutama sekali dalam ilmu, teknologi, dan ekonomilah pemikiran kita masih amat terbelakang.

Kita memerlukan penterjemahan buku-buku ilmu yang tiada berhingga banyaknya, di sisi buku-buku yang berharga dalam perkembangan jiwa dan kebudayaan umat manusia sepanjang sejarah. Bahasa Indonesia mesti menjadi salah satu dari bahasa moderen yang penuh dan lengkap, setara dengan bahasa Inggeris, bahasa Jerman, Jepang, dan lain-lain. Keadaan yang sekarang ini terutama oleh kekurangan buku — membuat tingkat sekolah-sekolah kita terutama perguruan tinggi kita sangat rendah, sebab universitas yang sesungguhnya seperti dikatakan oleh Tomas Carlyle adalah buku. Tak dapat tidak pemerintah kita mesti mengadakan rancangan penterjemahan, penulisan, dan penerbitan buku dan majalah yang besar, baik dengan menerbitkan sendiri maupun dengan memberi sokongan yang kuat kepada penerbit-penerbit swasta.

Kedua, cara standardisasi maupun modernisasi bahasa Indonesia hendaklah dilakukan berancangan, rasional dan efisien. Dalam hal ini sangat merugikan pandangan ilmu linguistik spesialisma yang formal dan menjauhkan bahasa itu dari pikiran manusia maupun kebudayaannya sehingga bahasa itu hanya merupakan susunan bunyi yang kosong.

Tentang hal ejaan, keefisienan ini berarti bahwa bukan saja kita menentukan tanda atau lambang untuk fonem-fonem, tetapi pola suku bahasa Indonesia mesti dipersahaja. Pola suku kata Indonesia jangan dicampur-adukkan dengan pola suku kata daerah atau bahasa asing. Kata-kata daerah atau asing.

hendaknya konsekuen mungkin disesuaikan dengan pola suku kata Indonesia, apabila kata-kata itu diterima sebagai kata-kata Indonesia.

Dengan mengakui bahasa bukanlah matematik, kita tetap berusaha agar keputusan keputusan yang diambil menuju kepada bahasa yang lebih logis, lebih konsekuen, dan lebih mudah tentang tata bahasanya.

Juga dalam istilah hendaklah ada aturan-aturan yang tertentu tentang bagaimana mengindonesiakan istilah-istilah asing, sehingga tiap-tiap orang apabila menghadapi istilah asing tahu aturan-aturan untuk mengindonesiakan kata-kata asing itu. Aturan-aturan ini pun mesti konsekuen, efisien, dan sesuai dengan pola-pola suku kata Indonesia yang sudah ditentukan.

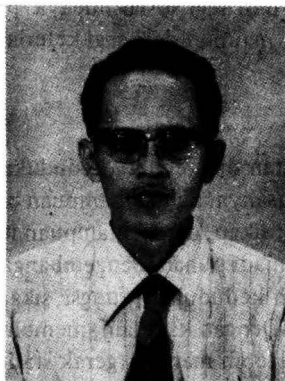
Dalam hubungan ini banyak perubahan ejaan kata-kata dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan W.J.S. Poerwadarminta hanya lebih mengacaukan pola-pola kata Indonesia.

\* \*



# BEBERAPA POKOK PIKIRAN TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH

S. Effendi



## I. Pendahuluan

Beberapa pertanyaan pokok yang timbul sehubungan dengan judul artikel ini adalah (1) apakah yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan bahasa, (2) masalah-masalah apakah yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan bahasa itu, (3) ke manakah tujuan yang hendak ditempuh dan sasaran apakah yang akan dicapai dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa itu, dan (4) bagaimanakah strategi dan program yang seyogianya dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai sasaran itu.

Kesimpulan Seminar Politik Bahasa Nasional (Februari 1975) menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa adalah "usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya" termasuk kesusastraan yang merupakan faktor penunjang perkembangan bahasa dan kebudayaan bersangkutan (lihat Halim, ed., 1976: 146). Dalam hubungan ini, pertanyaan yang timbul ialah apakah yang dibina dan dikembangkan itu hanyalah bahasa. Artikel ini ingin menyatakan bahwa yang dibina dan dikembangkan bukanlah semata-mata bahasa, melainkan juga masyarakat pemakai bahasa (lihat Effendi, 1976: 2-3; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1976: 2).

Berbagai masalah kebahasaan telah dikemukakan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional (Februari 1975) terutama masalah yang timbul bertalian dengan pertanyaan antara lain (1) apakah pembinaan dan pengembangan bahasa serasi dengan kebutuhan masyarakat, (2) apakah mutu pemakaian bahasa di kalangan masyarakat cukup baik, dan (3) apakah pemakaian bahasa dengan baik itu meluas dan merata di kalangan masyarakat, (4) apakah pembinaan dan pengembangan bahasa menggairahkan partisipasi masyarakat. Dengan



memahami masalah-masalah dari segi lain ini, diharapkan kita akan lebih mudah melihat tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan bahasa serta strategi dan program untuk mencapai sasaran.

Akhirnya, perlu dinyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam artikel ini diharapkan dapat merangsang pemikiran lebih mendalam dan menyeluruh dari para ahli dan peminat bahasa sehingga tindakan pembinaan dan pengembangan bahasa yang dilakukan selama ini akan lebih mantap, lebih dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi sosial budaya, politik, ketahanan nasional, pendidikan, kebahasaan maupun dari segi keterlaksanaannya.

## 2. Pengertian Dasar

Pembinaan bahasa adalah serangkaian kegiatan memelihara kedudukan dan fungsi bahasa, sikap masyarakat terhadap bahasanya, dan kemampuan bahasa yang dimilikinya sehingga kedudukan, fungsi, sikap, dan kemampuan itu menjadi lebih mantap alih-alih menurun apalagi menjadi punah. Pengembangan bahasa adalah serangkaian kegiatan menumbuhkan kedudukan, fungsi, sikap, dan kemampuan itu sehingga menjadi lebih maju. Dengan kata lain, membina adalah memelihara apa yang telah tercapai menjadi lebih mantap (gerak statis) dan mengembangkan adalah menumbuhkan apa yang telah dicapai menjadi lebih maju (gerak dinamis) baik dalam hal bahasa maupun pemakai bahasa; membina dan mengembangkan bahasa terjadi dalam suatu proses yang tidak terputus.

Untuk keperluan praktis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa, Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional (Maret 1976) mengambil sikap bahasa (1) pembinaan bahasa terutama ditujukan kepada manusianya, manusia pemakai bahasa, dan (2) pengembangan bahasa terutama ditujukan kepada bahasa dalam segala aspeknya.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, kita melihat bahwa istilah pembinaan dan pengembangan bahasa menyiratkan pula pengertian adanya kemauan manusia "mengendalikan" atau "membimbing" atau "merencanakan" perkembangan bahasa ke arah yang diharapkannya. Dalam hubungan ini, ingin dikemukakan anggapan dan sikap berikut.

Sebagai salah satu sumber daya kemasyarakatan, bahasa bukanlah semata-mata sebagai alat, melainkan juga antara lain sebagai ekspresi pribadi dan lambang identitas pribadi. Oleh karena itu, bahasa sebagai alat tidak dapat diubah, dibetulkan, diatur, atau diperbaiki semau perencana, semau pembina dan pengembang, seperti lazimnya alat. Perubahan-perubahan dalam bahasa

tidak segera tampak sebagai suatu perbaikan dan mudah terselesaikan. Berbeda halnya dengan perubahan-perubahan yang terjadi apabila seorang montir mengganti suku cadang sebuah mesin: perbaikan segera tampak.

Di Indonesia, perencanaan pembinaan dan pengembangan bahasa seyogianya merupakan salah satu bagian dari perencanaan pendidikan dan kebudayaan serta perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijaksanaan serta tindakan pembinaan dan pengembangan bahasa hendaknya mempunyai hubungan fungsional dengan kebijaksanaan dan tindakan pengembangan pendidikan dan kebudayaan serta pembangunan nasional.

### 3. Masalah Pokok

Untuk dapat melihat lebih jelas kemungkinan tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, perlu ditelaah dan diteliti situasi kebahasaan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang dihadapi dewasa ini. Dalam hubungan ini, para ahli dan peminat bahasa pada umumnya (lihat Halim, ed., 1976: 145-146) melihat beberapa kenyataan berikut ini dalam perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah selama ini.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemer-satu bangsa, dan alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, dan sebagai bahasa resmi dalam pelaksanaan pemerintah, pengembangan kebudayaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahasa-bahasa daerah seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis dan Aceh, dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan sebagai alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah ini berfungsi sebagai pendukung bahasa Indonesia, bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan sebagai alat pembina dan pendukung kebudayaan daerah. Namun kenyataan-kenyataan tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa itu sudah mantap baik dilihat dari segi bahasa maupun dari segi warga pemakainya..

Dari segi warga pemakai, terlihat bahwa:

- a. masih sebagian kecil warga masyarakat Indonesia yang dapat berbahasa Indonesia dengan baik sesuai dengan kedudukan dan peranan mereka dalam masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
- b. masih sebagian kecil warga masyarakat Indonesia yang secara sadar bersikap setia dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukan dan peranan mereka dalam masyarakat;
- c. masih sebagian kecil warga masyarakat di daerah-daerah tertentu seperti Sunda, Jawa, Madura, Bali, Bugis, dan Aceh yang dapat berbahasa daerah yang bersangkutan dengan baik sesuai dengan kedudukan dan peranan mereka dalam masyarakat daerah;
- d. masih sebagian kecil warga masyarakat di daerah-daerah tertentu itu yang secara sadar bersikap setia dan bangga menggunakan bahasa daerah sesuai dengan kedudukan dan peranan mereka dalam masyarakat daerah yang bersangkutan;
- e. masih sedikit bahan atau informasi kebahasaan yang tersedia baik dalam bentuk buku, majalah, atau terbitan lain maupun dalam bentuk siaran atau bentuk media komunikasi lain, yang dengan mudah diperoleh dan dimanfaatkan oleh sebagian besar warga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan (a) pengetahuan, wawasan, dan apresiasi, (b) kemampuan bahasa, (c) kemampuan penelitian, dan (d) kemampuan penyuluhan.

Dari segi bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu sendiri, terlihat bahwa:

- a. bahasa Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan terutama sebagai sarana pengungkap konsep-konsep ilmu, teknologi, dan seni budaya;
- b. bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh masyarakatnya juga masih mengandung kelemahan-kelemahan tertentu terutama sebagai sarana komunikasi resmi dalam lingkungan masyarakat daerah bersangkutan.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut, kita melihat adanya empat masalah pokok yang perlu dipecahkan:

- a. masalah relevansi pembinaan dan pengembangan bahasa dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta kebutuhan pembangunan nasional;
- b. masalah kualitas pembinaan dan pengembangan bahasa antara lain dalam kaitannya dengan mutu pemakaian bahasa serta mutu hasil pembinaan dan pengembangan bahasa;

- c. masalah kuantitas pembinaan dan pengembangan bahasa antara lain dalam hal pemerataan pemakaian bahasa serta hasil pembinaan dan pengembangan bahasa;
- d. masalah efisiensi dan keefektifan pembinaan dan pengembangan bahasa antara lain dalam hal pengelolaan dana, tenaga, dan sumber daya lain.

#### 4. Tujuan dan Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Secara umum tujuan pembinaan bahasa ialah memelihara kedudukan dan fungsi bahasa yang telah tercapai serta memelihara sikap dan kemampuan bahasa yang dimiliki masyarakat. Sasaran akhirnya ialah mantapnya kedudukan dan fungsi bahasa serta sikap dan kemampuan bahasa yang dimiliki masyarakat. Tujuan pengembangan bahasa ialah menumbuhkan berbagai aspek bahasa beserta fungsinya serta sikap dan kemampuan bahasa yang lebih maju dalam berbagai aspek dan fungsinya serta terwujudnya sikap dan kemampuan bahasa yang lebih bermutu dan meluas di kalangan masyarakat.

Secara khusus, bertalian dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, sasaran pembinaan dan pengembangan bahasa. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran yang berhubungan dengan masalah relevansi:
  - 1) Terwujudnya golongan-golongan masyarakat yang memiliki potensi kebahasaan (kemampuan, sikap, wawasan) yang serasi dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
  - 2) Terwujudnya bahasa Indonesia yang lebih mampu mengungkapkan konsep-konsep ilmu, teknologi, dan seni budaya dengan cermat dan teliti.
  - 3) Terwujudnya bahasa-bahasa daerah tertentu seperti Sunda, Jawa, Madura, Bali, Bugis, dan Aceh yang lebih mampu sebagai alat perhubungan resmi dalam lingkungan masyarakat daerah yang bersangkutan serta lebih mampu menunjang bahasa Indonesia.
- b. Sasaran yang berhubungan dengan masalah kualitas:
  - 1) Terwujudnya pemakaian bahasa Indonesia yang lebih cermat dan teliti serta lebih berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dan benar.
  - 2) Terwujudnya kesetiaan dan kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik di kalangan masyarakat dalam arti masyarakat taat mengembangkan kaidah-kaidah yang benar dan tidak merasa rendah diri apabila menggunakan bahasa Indonesia.

- 3) Terwujudnya pemakaian bahasa-bahasa daerah tertentu seperti Sunda, Jawa, Madura, Bali, Bugis, dan Aceh yang lebih cermat dan teliti, serta lebih berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dan benar di kalangan masyarakat daerah yang bersangkutan.
  - 4) Terwujudnya kesetiaan dan kebanggaan menggunakan bahasa-bahasa daerah tertentu seperti Sunda, Jawa, Madura, Bali, Bugis, dan Aceh yang lebih baik di kalangan masyarakat daerah yang bersangkutan.
- c. Sasaran yang berhubungan dengan masalah kuantitas:
- 1) Terwujudnya kesempatan yang lebih luas dan merata di kalangan masyarakat Indonesia untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia.
  - 2) Terwujudnya kemampuan berbahasa Indonesia dan kesadaran akan pentingnya kesetiaan serta kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat Indonesia yang lebih luas dan merata.
  - 3) Terwujudnya sistem pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang lebih mampu mengelola dana, mengembangkan tenaga di bidang bahasa, mengembangkan sumber daya lain, dan mengembangkan evaluasi kegiatan serta hasil sistem secara efisien dan efektif.

Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan bahasa seperti dikemukakan di atas tentulah harus menunjang tujuan dan sasaran pendidikan nasional, pengembangan kebudayaan, dan pembangunan nasional.

## **5. Strategi dan Program Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**

Dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa, strategi adalah pengumpulan dan pemanfaatan berbagai kekuatan kebahasaan dan nonkebahasaan dalam masyarakat menjadi satu kekuatan yang merupakan sarana utama yang memungkinkan terlaksananya usaha-usaha mencapai sasaran dalam jangka waktu tertentu. Bertalian dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kekuatan-kekuatan strategis yang seyogianya dihimpun dan dimanfaatkan antara lain sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, sikap positif masyarakat daerah tertentu terhadap bahasanya, ahli bahasa dan sastra, guru, sastrawan, wartawan, media massa, lembaga pendidikan, dan biaya yang ada.

Berdasarkan strategi pembinaan dan pengembangan bahasa itu, program-program berikut seyogianya dilaksanakan.

*a. Program Utama*

- 1) Pembinaan dan pengembangan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bidang kurikulum, bahan pengajaran, media pengajaran, metode, guru maupun sistem evaluasi, melalui kegiatan-kegiatan seperti penyusunan buku pegangan, buku pelajaran, alat peraga, penataran, dan eksperimen.
- 2) Pembinaan dan pengembangan pengajaran bahasa daerah di lembaga pendidikan di daerah-daerah yang memerlukannya, baik dalam bidang kurikulum, bahan pengajaran, media pengajaran, metode, guru maupun sistem evaluasi, melalui berbagai kegiatan seperti dikemukakan pada 1).
- 3) Pembinaan dan pengembangan pemakaian bahasa Indonesia di luar sekolah, baik dalam hal mutu maupun pemerataannya, melalui kegiatan-kegiatan seperti penyusunan buku pegangan dan penyuluhan melalui berbagai media komunikasi.
- 4) Pembinaan dan pengembangan bakat dan prestasi di bidang bahasa, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dan peminat bahasa pada umumnya, melalui kegiatan-kegiatan seperti sayembara mengarang, pemberian beasiswa, dan hadiah penghargaan.
- 5) Pembakuan bahasa Indonesia, baik dalam bidang ejaan, tata bahasa, peristilahan, kosakata umum maupun lafal, melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan buku pedoman, kamus umum, dan kamus istilah berbagai bidang ilmu dan teknologi.
- 6) Pembakuan bahasa-bahasa daerah yang dipelihara baik-baik oleh masyarakat bersangkutan, baik dalam bidang ejaan, tata bahasa, kosakata maupun lafal, melalui kegiatan-kegiatan seperti penyusunan buku pedoman dan kamus umum.

*b. Program Penunjang*

- 1) Pembinaan dan pengembangan penelitian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik dalam bidang struktur, perkembangan bahasa dalam segala aspeknya, pengajaran bahasa dalam segala aspeknya maupun ragam dan fungsi bahasa, melalui kegiatan lapangan dan studi pustaka.

- 2) Pembinaan dan pengembangan tenaga kebahasaan, baik dalam bidang linguistik, perkamusan maupun penerjemahan, melalui kegiatan pendidikan, latihan, dan penataran.
- 3) Penerjemahan karya-karya kebahasaan dan kesastraan yang penting dalam bahasa asing dan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
- 4) Penerbitan hasil penelitian dan penyusunan dalam bidang bahasa, baik dalam bentuk buku, majalah, brosur maupun dalam bentuk lain.
- 5) Pembinaan dan pengembangan pusat informasi kebahasaan, baik dalam bidang organisasi, tenaga, tata kerja maupun kelengkapan informasinya, melalui berbagai kegiatan seperti pembelian dan pertukaran bahan informasi kebahasaan, pembuatan mikrofilm, penyusunan buku petunjuk, dan penataran, latihan, atau kursus.

Sejalan dengan strategi seperti yang telah dikemukakan di atas, program-program tersebut tidak akan dapat dilaksanakan dan tidak akan dapat mencapai hasil yang baik tanpa kerja sama dan pemanfaatan kekuatan-kekuatan strategis yang ada. Dengan kata lain, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, melainkan merupakan tanggung jawab kita bersama, pencinta bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai warisan budaya nasional.

#### Daftar Pustaka

- Effendi, S. 1976. "Masalah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia". Kertas kerja untuk Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional di Jakarta, 23 – 27 Maret 1976.
- Halim, Amran (ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1976. "Hasil Perumusan Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional". Jakarta.
- Rubin, Joan dan Bjorn H. Jernudd. 1971. *Can Language Be Planned ?* Honolulu: The University Press of Hawaii.

# PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SELURUH RAKYAT

**Ki Soeratman**



## 1. Pendahuluan

Bagi kehidupan manusia, bahasa mempunyai peranan sebagai alat perhubungan. Melalui bahasa, manusia mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, kehendaknya, yang kemudian dapat ditangkap dan dimengerti manusia lainnya. Dengan cara demikian akan terjadi hubungan timbal-balik antar-manusia dalam kehidupan bersamanya. Bagi suatu bangsa, bahasa bangsa itu merupakan bukan saja alat perhubungan tetapi juga salah satu ciri khas yang menandai bangsa itu. Ini berarti bahwa bahasa juga merupakan salah

satu wujud kepribadian suatu bangsa, yang membedakan dirinya dari bangsa-bangsa lainnya.

Untuk dapat melakukan hubungan antarbangsa diperlukan pula suatu bahasa yang dapat dimengerti oleh segenap bangsa yang menggunakannya itu. Dengan demikian, selain bahasa yang secara nasional mampu mengikat suatu bangsa, diperlukan pula kehadiran suatu bahasa yang dapat dipahami dan digunakan sebagai bahasa perantara dalam kehidupan bersama antarbangsa. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat kita akan selalu menghadapi adanya (1) bahasa daerah, (b) bahasa nasional, dan (c) bahasa asing.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut, maka masyarakat berkewajiban untuk membina ketiga jenis bahasa itu, meskipun mengenai urutan kepentingannya, dapat diurutkan (1) bahasa nasional, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing. Urutan kepentingan ini sekaligus juga menentukan urutan perhatian serta penentuan pola pembinaan dan pengembangannya.

Sesuai dengan tata urutan tersebut, dalam uraian ini hanya akan disoroti secara khusus usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.



## 2. Latar Belakang Sejarah

Dibanyak negara dan masyarakat yang terdiri dari banyak suku dan menggunakan banyak bahasa daerah, pada umumnya bahasa daerah yang digunakan oleh banyak pemakai akan merupakan bahasa sumber bagi bahasa nasional negara dan bangsa itu. Hal ini adalah wajar karena manakala suatu bahasa sudah banyak digunakan oleh banyak pemakai bahasa, kehadiran bahasa itu sudah cukup dikenal, dimengerti, dan bahasa itu sudah berperan cukup penting dalam kehidupan bersama para pemakainya itu. Tetapi hal itu tidak terjadi di Indonesia. Perkembangan bahasa nasional atau bahasa persatuan bangsa Indonesia tidak mengikuti rumus yang telah dikemukakan di atas. Bahasa persatuan Indonesia, sumber pokoknya bukan bahasa daerah Jawa, yang pada saat itu digunakan oleh pemakai bahasa yang terbanyak, melainkan dari bahasa Melayu Riau yang kemudian mengalami perubahan dan perkembangan.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta, prasaran Ki Hadjar Dewantara yang berjudul "Bahasa Indonesia di dalam Perguruan" telah diterima baik oleh Kongres. Dalam salah satu keterangannya, Ki Hadjar menjelaskan bahwa isi prasaran beliau tersebut sebenarnya pernah pula dipertahankan dalam *Eerste Koloniaal Onderwijs-congres* di s'Gravenhage, negeri Belanda pada tahun 1916.

Adapun pokok isi prasaran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Demi persatuan bangsa Indonesia, hanya bahasa Indonesialah yang berhak menjadi bahasa persatuan.
2. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang asalnya bahasa Melayu Riau tetapi sudah diubah, ditambah, dan dikurangi menurut keperluan alam dan zaman.
3. Perguruan-perguruan yang di daerahnya masih mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara baik-baik oleh rakyatnya buat keperluan masyarakat dan kebudayaan, harus mempergunakan bahasanya sendiri sebagai bahasa perantara di dalam perguruannya, tetapi wajib juga mengajar bahasa Indonesia hingga cukup.

Demikian keterangan Ki Hadjar tentang betapa sangat pentingnya bahasa nasional atau bahasa persatuan itu, yang tiada lain bagi Ki Hadjar adalah hanya bahasa Indonesia. Hal tersebut sudah pula disebarluaskan melalui suatu risalah yang berjudul *De Taalkwestie* oleh S. Suryaningrat.

Jika kita teliti kemudian, maka ternyata bahwa dasar pikiran tersebut sudah tertuang pula secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita, pada pasal 36 sebagai berikut: "Bahasa Negara adalah Bahasa Indo-

nesia", sedang penjelasan pasal tersebut berbunyi: "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh Negara." Dalam hal ini perlu kita membandingkannya dengan apa yang telah ditentukan dalam TAP No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, yang menyangkut masalah kebudayaan sebagai berikut.

1. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mewajibkan penggunaannya secara baik dan benar.

2. Pembinaan bahasa daerah dilakukan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai salah satu sarana identitas nasional.

Jadi, jika kita tinjau proses terjadi dan perkembangannya, bahasa persatuan kita bukan terjadi dan berkembang menurut hukum perkembangan bahasa dan pemakai bahasa terbanyak, melainkan berkembang melalui proses sosio-kultural berlandaskan perjuangan bangsa yang sifatnya politis. Di sini akan terbukti lagi betapa besar jiwa toleransi bangsa kita, yang lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau suku bangsa yang kurang nilai kenasionalannya.

Jika sudah sejak tahun 1916 Ki Hadjar Dewantara mengemukakan pendapatnya bahwa hanya bahasa Indonesia yang berhak menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, maka hal tersebut oleh para pemuda telah dipaterikan dalam Kongres Pemuda 50 tahun yang lalu, sebagai hasil kongresnya yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

### 3. Bahasa sebagai Alat Perjuangan

Bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku bangsa dan berbahasa daerah yang beraneka ragam pula, pembinaan bangsa sebagai suatu bangsa yang bersatu bulat merupakan suatu perjuangan yang terus-menerus. Persatuan dan kesatuan itu belum dapat dicapai pada saat penjajahan, karena waktu itu memang ada usaha-usaha intensif dari pihak penjajah untuk menghalangi dan menghambatnya. Politik *divide et impera* dengan cara adu dombanya antarsuku bangsa kita dilakukan baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Hanya karena berkat kewaspadaan sebagai pemimpin pergerakan kita waktu itu, dapatlah secara bertahap dibina persatuan antar-kelompok melalui organisasi partai-partai politik, yang kemudian dipersatukan geraknya secara koordinatif.

Di sini tampak jelas peranan bahasa persatuan atau bahasa Indonesia sebagai alat perjuangan bangsa, yaitu untuk menyatukan gerak dan langkah dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Usaha "pecah-belah" dan "adu domba" diimbangi dengan usaha konsolidasi segenap anggota organisasi-organisasi rakyat di bidang yang bergerak baik di bidang politik, sosial, ekonomi, kesenian, pendidikan, maupun kebudayaan pada umumnya.

Melalui himpunan-himpunan kelompok yang dikoordinasikan itu, ditanyakan betapa perlu dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam setiap rapat sudah mulai digunakan bahasa "Melayu" sebagai bahasa kerapatan, dan sekaligus merupakan salah satu usaha untuk menjadikan bahasa itu tenar di masyarakat. Selain sebagai bahasa kerapatan, juga persuratkabaran kita mulai turut menyebarkan penggunaan bahasa "Melayu" tersebut dalam masyarakat.

Dalam kedudukannya seperti diuraikan di atas, bahasa Indonesia waktu itu jelas berkedudukan sebagai alat perjuangan bangsa, dalam hal ini perjuangan untuk merebut kemerdekaan nusa dan bangsa. Sehubungan dengan kedudukan tersebut pembinaan bahasa Indonesia sebagai unsur budaya bangsa waktu itu masih belum mendalam dan teratur. Titik berat masih diletakkan pada segi perluasan pemakaiannya, tersebarnya bahasa itu ke masyarakat luas dan "daya ikatnya" sebagai alat mempersatu bangsa.

Setelah melalui proklamasi kemerdekaan, bangsa dan negara Republik Indonesia lahir sebagai bangsa dan negara merdeka, maka peranan bahasa Indonesia tentu mempunyai kedudukan yang lain pula. Kedudukannya sebagai unsur budaya bangsa yang akan memberi wujud identitas nasional bangsa akan lebih dapat diutamakan. Untuk ini sudah mulai dirintis usaha-usaha pengembangan dan pembinaannya secara lebih mantap dan lebih teliti. Meskipun demikian kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat perjuangan masih belum dapat dikatakan selesai. Kita semua mesti berpandangan jauh ke masa depan. Jika kita teliti secara cermat, dan kebulatan sebagai suatu bangsa menjadi salah atau titik sasaran yang harus kita tuju, maka persatuan dan kesatuan bangsa itu masih harus diperjuangkan. Walau bagaimanapun, bahasa persatuan dan bahasa Indonesia kita ini merupakan salah satu patri persatuan bangsa yang cukup ampuh. Melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan lebih didekatkanlah perasaan bangsa kita satu sama lain, sehingga pada suatu ketika benar-benar akan diwarnai hanya dengan satu warna, yaitu warna kepribadian bangsa Indonesia yang bersatu bulat. Dengan demikian, meskipun kita sudah merdeka, sudah bebas dari perjuangan kemerdekaan bangsa dari penjajah, bahasa Indonesia tetap

merupakan alat perjuangan bangsa yaitu sebagai upaya untuk menyatupadukan seluruh bangsa sehingga benar-benar menjadi satu bangsa yang bersatu bulat, meskipun terdiri atas bermacam suku bangsa. Dengan bahasa Indonesia, kita akan menunggalikan kebinekaan kita. Pembinaan bangsa Indonesia masih akan tetap merupakan suatu perjuangan.

#### 4. Pembinaan Bahasa Indonesia

Kalau di muka telah dijelaskan bahwa pada zaman penjajahan pembinaan bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur budaya bangsa belum dapat dilakukan secara lebih mendalam, tetapi usaha-usaha ke arah pembinaan itu sudah ada. Hal ini terbukti dengan diadakannya Kongres Bahasa pada tahun 1938 di Surakarta. Peristiwa ini dapat dinilai sebagai kegiatan yang sifatnya *embryonic* yang menuju ke arah pembinaan bahasa yang lebih fundamental.

Keunggulan bangsa Indonesia untuk membina bahasa secara baik dan teratur setelah zaman kemerdekaan terbukti dari sikap Pemerintah nasional yang pada tahun 1946 telah membentuk lembaga resmi untuk menangani permasalahan bahasa. Kalau kita ingat bahwa pada saat itu kita masih dalam keadaan hangat-hangatnya menghadapi musuh-musuh yang berusaha merongrong kemerdekaan kita, pembentukan lembaga tersebut menunjukkan betapa kuat kemauan kita dan betapa tinggi penilaian kita terhadap usaha pembinaan bahasa yang baik.

Kejadian itu dapat juga disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, karena pada saat pendudukan Jepang, Pemerintah telah melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga ada ketentuan bahwa semua buku pelajaran yang dipakai di sekolah harus segera diganti dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Meskipun dalam keadaan yang masih serba kekurangan dalam semua hal, akhirnya terbit pulalah buku-buku sekolah berbahasa Indonesia. Sudah tentu peristilahannya masih sangat "miskin", namun sebagai pengganti buku-buku yang waktu itu sangat diperlukan sudah agak memadai. Oleh karena itulah, maka sejak awal kemerdekaan sudah mulai dipandang perlu meresmikan suatu lembaga yang menangani masalah bahasa itu.

Kegiatan yang agak menonjol ialah berlangsungnya Kongres Bahasa Indonesia yang diberi predikat "kedua", dihitung dari tahun 1938, yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1954. Sesudah ini, boleh dikatakan situasi dan perkembangan usaha pembinaan bahasa Indonesia tampak "sepi". Ini merupakan pencerminan pula keadaan masyarakat kita waktu itu yang dapat dikatakan belum lagi stabil. Pada zaman kehidupan bangsa kita diwarnai

oleh dominasi kekuasaan partai politik, pemerintahan selalu silih berganti dalam waktu yang teramat singkat. Dengan demikian tidak pernah ada program yang dapat dilaksanakan dengan tuntas. Juga mengenai pembinaan bahasa ini pun tampaknya ada semacam "kelesuan".

Baru setelah berakhirnya "bencana nasional" pada tahun 1965 dan lahirnya Orde Baru, situasinya menjadi lebih cerah. Lambat laun keadaannya menjadi lebih mantap. Program Pemerintah sudah mulai dapat diwujudkan, rencana pembangunan yang terarah sudah mulai dapat diwujudkan secara lebih teratur.

Dalam kondisi demikian itu mulailah terpikirkan untuk melanjutkan usaha pembinaan bahasa Indonesia, dan pada tahun 1966 diselenggarakan suatu simposium di Jakarta. Rupanya simposium ini adalah pembuka jalan pembinaan bahasa yang lebih mendasar yang segera diikuti oleh berbagai seminar bahasa berikutnya. Berturut-turut diselenggarakan Seminar Bahasa Indonesia pada tahun 1968 di Jakarta dan pada tahun 1972 di Puncak, Bogor.

Hal yang sangat menonjol adalah Seminar Bahasa di Puncak yang menentukan ejaan yang disempurnakan. Oleh karena hal tersebut dalam masyarakat merupakan yang baru dan membawa dampak yang sangat luas, maka terjadilah sikap-sikap tertentu oleh banyak pihak dalam masyarakat. Sedikit keresahan juga timbul antara yang menyatakan persetujuannya dan yang tidak menyetujuinya.

Melalui Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 di Jakarta berturut-turut diselenggarakan Seminar Pengembangan Sastra Indonesia (1975) dan Seminar Pengembangan Sastra Daerah (1975), keduanya di Jakarta. Berikutnya menyusul Seminar Bahasa Daerah di Yogyakarta (1976), Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah di Jakarta (1977), dan Konferensi Bahasa dan Sastra Indonesia (1978) juga di Jakarta.

Jika dalam tahun-tahun terakhir ini dapat diselenggarakan banyak kegiatan dalam rangka usaha pembinaan dan pengembangan bahasa, sebab utamanya ialah karena kegiatan tersebut sudah dituangkan dalam program kerja melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua (1974 - 1978), yang berwujud Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah serta Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah.

## 5. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Kalau pembinaan dan pengembangan di muka telah diuraikan, sebenarnya pelaksanaannya adalah pihak resmi, yaitu pihak Pemerintah dengan mekanismenya yang berwujud Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen

temen Pendidikan dan Kebudayaan. Kita semua menyadari bahwa masalah bahasa sebenarnya bukanlah masalah resmi Pemerintah saja. Bahasa merupakan sarana perhubungan yang digunakan oleh masyarakat. Itulah sebabnya maka pembinaan dan pengembangan bahasa yang baik dan benar tidak mungkin dibebankan kepada pihak Pemerintah saja. Ini berarti bahwa sebagian tanggung jawab mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus pula dipikul oleh masyarakat.

Betapapun Pemerintah telah menentukan berbagai peraturan yang sebaik-baiknya dalam usaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik, jika masyarakat tidak menghayati betapa pentingnya usaha tersebut, dan menggunakan bahasa seenaknya sendiri atau berdasarkan selera masing-masing, maka usaha yang baik tersebut tidak akan menemukan sasarannya. Bahasa Indonesia akan tetap kacau, penggunaannya mungkin juga akan tetap terbatas di lingkungan tertentu dan tidak akan meluas rata ke seluruh rakyat. Oleh karena itu, masyarakat yang bertanggung jawab dituntut untuk turut serta mematri, membina, membantu mengembangkan bahasa Indonesia itu dengan menggunakan secara benar dan baik. Hal ini memang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam GBHN 1978. Kewajiban untuk turut membina dan mengembangkan bahasa Indonesia ini hendaknya dapat kita tanamkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, semua jenis penerbitan, dan juga melalui sarana komunikasi massa lainnya seperti radio dan televisi.

Kesadaran akan kewajiban tersebut akan menimbulkan sikap dan perilaku yang memenuhi tuntutan usaha pembinaan bahasa seperti yang selama ini selalu kita harapkan. Untuk dapat mencapai kesadaran tersebut, maka memasyarakatkan lembaga yang menangani masalah kebahasaan ini, seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sangat penting. Selama ini publikasi mengenai lembaga tersebut serta hasil karyanya terasa masih sangat terbatas sehingga kehadirannya kurang dirasakan oleh masyarakat.

## 6. Penutup

Untuk mengakhiri uraian ini dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya usaha yang secara resmi ditangani oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah memadai. Usaha untuk membakukan bahasa Indonesia mulai dari ejaan yang disempurnakan tentu akan berkelanjutan mengenai seluruh permasalahan bahasa. Bahwa telah terasa adanya kemajuan-kemajuan tertentu dapat dibuktikan dengan sudah dapat diterimanya bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa konferensi internasional, seperti yang akan terjadi dalam Konferensi Sarikat Perusahaan Surat Kabar Internasional (FIEJ) di

negeri Belanda pada tahun 1978 dan juga dalam Kongres Guru Sedunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada bulan Juli 1978 ini.

Sebagai salah satu hambatan yang hingga kini masih dirasakan agar "sem-rawut" ialah cara penyingkatan atau akronim yang tidak berketentuan patokannya. Selain sumber-sumber masyarakat yang sering menyingkat kata-kata atau kalimat seenak sendiri, dari sumber Pemerintah pun sering terjadi penyingkatan-penyingkatan yang tidak menurut ketentuan yang berlaku. Setiap lembaga atau instansi seolah-olah merasa mempunyai wewenang untuk melakukan penyingkatan tersebut.

Hal ini kiranya memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dan menuntut dari semua pihak adanya disiplin yang cukup tinggi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga masalah bahasa persatuan dan bahasa nasional kita — bahasa Indonesia — ini akan merupakan bahasa yang mampu memenuhi segala kebutuhan hidup manusia Indonesia di segala bidang: sosial, politik, ekonomi, ilmu, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Dirgahayu 50 tahun Sumpah Pemuda dan majulah bahasa Indonesia.

\* \* \*

# PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Samsuri



## 1. Pengantar

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian suatu kebudayaan. Yang kami maksudkan dengan kebudayaan ialah perkembangan budi manusia. Kecuali ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan mempunyai bagian-bagian yang lain, seperti: pemerintahan, hukum dan adat, pendidikan, pertanian dan industri, ekonomi dan perdagangan, agama dan kepercayaan, serta kesenian dan hiburan. (Samsuri, 1975: 14 – 24). Tiap-tiap bagian itu mempunyai pola-pola kegiatannya, dan kegiatan-kegiatan itu memerlukan

alat komunikasi. Alat komunikasi manusia yang paling baik ialah bahasa. Di samping sebagai alat atau wahana kebudayaan, bahasa sekaligus merupakan bagian kebudayaan.

Bahasa pada hakikatnya terdiri atas dua hal yaitu bentuk dan isi. Isi di sini, baik yang berbentuk kata, frase, kalimat, ataupun paragraf, merupakan konsep sesuatu. Adapun bentuk itu ialah bunyi yang bersistem atau tulisan. Di samping itu kata-kata dalam bahasa sebagian besar merupakan bentuk dan sekaligus isi. Umpamanya kata *kursi*, *duduk*, dan *malas*, pada taraf bentuk, masing-masing diucapkan sebagaimana orang Indonesia mengucapkannya, atau dituliskan dengan huruf-huruf sebagaimana ketentuan dalam sistem ejaan bahasa Indonesia. Akan tetapi pada waktu yang sama, artinya pada waktu kata-kata itu diucapkan ataupun dituliskan, ucapan dan tulisan itu — di samping merupakan bentuk — sekaligus mengandung pengertian, makna, atau konsep. Akhirnya bentuk dan isi itu sukar dipisahkan. Kata-kata semacam itu kami sebut *kata baku*. Sebagian kecil kata-kata suatu bahasa sukar — jika tidak dapat dikatakan tak mungkin — ditentukan pengertian, makna, atau konsep yang dikandungnya. Kata-kata seperti *di*, *yang*, *itu*, *makin*, *tetapi*, *padahal*, sukar sekali ditentukan pengertian, makna, atau konsep yang dimilikinya. Kata-kata itu baru jelas pengertiannya, apabila



dihubungkan dengan kata-kata baku. Oleh karena itu kata-kata itu kami sebut *kata fungsi*. Perbedaan antara kata fungsi dan kata baku ialah kata fungsi atau hampir-hampir tidak bertambah ataupun berubah, tetapi kata baku dapat bertambah atau berkurang jumlahnya. Dengan demikian, hanya kata bakulah yang dapat berubah jumlahnya, sehingga kata pungutan atau kata yang usang hanya menyangkut kata baku. Istilah-istilah termasuk ke dalam kelompok kata baku ini.

Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda daripada bahasa daerah di dalam masyarakat kita. Secara singkat dan umum dapat dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang merujuk ke kebudayaan nasional, kebudayaan Indonesia; sedangkan bahasa daerah berfungsi sebagai alat komunikasi yang merujuk ke kebudayaan daerah. Oleh karena penuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kegiatan nasional, agaknya mudah dipahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan wahananya. Sebagai wahana ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa Indonesia dirangkum di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh bangsa Indonesia selama ini, baik yang tersimpan dalam kesadaran ilmuwan dan teknologiwon Indonesia maupun yang terekam dalam berbagai tulisan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain, lokus ilmu pengetahuan dan teknologi ialah kesadaran ilmuwan dan teknologiwon serta penerbitan-penerbitan dalam bahasa Indonesia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Agaknya jelas bahwa berbicara tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mesti menyangkut pembicaraan mengenai pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga.

## **2. Pembinaan Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Yang kami maksudkan dengan "pembinaan bahasa Indonesia" ialah usaha pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar baik secara lisan maupun tulisan. Dalam hal ini menyangkut pemakaian bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang membina tidak lain ialah para ilmuwan dan teknologiwon. Untuk memudahkan pembicaraan, baiklah kita mulai dengan pembentukan ilmuwan dan teknologiwon, yaitu para mahasiswa di perguruan tinggi, karena mereka itulah pertama-tama yang belajar menggunakan bahasa Indonesia dalam pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi sebelum kami bicarakan hal itu, perlu kami terangkan sedikit tentang bagaimana seharusnya penguasaan bahasa Indonesia calon-calon mahasiswa itu,

yaitu para lulusan sekolah menengah atas, karena penguasaan bahasa Indonesia calon mahasiswa itu menjadi dasar pembinaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lulusan sekolah lanjutan atas diharapkan telah menguasai bahasa Indonesia secara lisan dan tulisan, sehingga ia dapat berpidato dengan baik, dengan persiapan atau spontan. Demikian pula dalam penulisan karangan seharusnya ia telah menguasai secara baik mengenai masalah sehari-hari ataupun karangan fiktif dan sebagainya. Sebenarnya, pada tingkat SLA murid-murid seharusnya telah dilatih untuk membuat karangan mengenai masalah nyata ataupun ilmu pengetahuan hasil pengamatan mereka, seperti pertumbuhan tanaman, metamorfosa ulat kepongpong kupu-kupu, hasil pengamatan perubahan kimiawi, tentang pengetahuan alam, sosial, maupun budaya, yang sederhana, atau mungkin pengetahuan yang praisistematis.

Bentuk dan format karangan serta gaya beberapa tulisan ilmiah mesti sudah diberikan dan dilatihkan kepada murid-murid SLA sehingga cara berfikir, cara menyusun bagian-bagian pikiran, serta meletakkan dasar-dasar permasalahan, telah pula menjadi bagian pendidikan bahasa murid-murid SLA (Samsuri 1978, b: 310 — 333).

Pada hemat kami, betapapun penguasaan bahasa Indonesia lulusan SLA pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi tetap diperlukan. Pendapat yang menyatakan bahwa lulusan SLA telah menguasai bahasa Indonesia dan tidak memerlukan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi dengan tidak memperhitungkan kenyataan bahasa Indonesia, sebenarnya tidak seluruhnya tepat. Pendapat semacam itu tidak didasari oleh pengetahuan bahwa dalam bahasa Indonesia pun terdapat dialek-dialek baik yang bersifat keilmubumian maupun yang bersifat kesosialan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa di samping bahasa Indonesia yang dipakai sehari-hari, dipakai pula dalam mengutarakan proporsisi, asumsi-asumsi, hipotesis, dan teori, seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelidikan mengenai dialek-dialek vertikal maupun horisontal ini memang belum dilakukan di Indonesia, meskipun sebenarnya sangat diperlukan. Khususnya dalam hal ini, penyelidikan bahasa Indonesia yang dipakai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang menjadi masalah pokok di dalam pembinaan bahasa Indonesia di perguruan tinggi ialah penguasaan bahasa Indonesia oleh para dosen. Kami terpaksa menyatakan bahwa pada umumnya para dosen kurang sekali menguasai bahasa Indonesia, baik yang umum maupun yang khusus dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila masih terdapat hal ini, bagaimana

kita dapat mengharapakan para mahasiswa akan menguasai bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik, sebab mereka menerima contoh-contoh bahasa yang kurang baik. Akibat ganda dalam hal ini ialah jika para mahasiswa telah menjadi sarjana, kita tak dapat mengharapakan penguasaan bahasa Indonesianya lebih baik dari penguasaan bahasa Indonesia sarjana-sarjana yang lebih tua. Demikianlah sehingga terjadi lingkaran setan. Kami memang belum pernah melakukan penyelidikan pemakaian bahasa Indonesia di perguruan tinggi termasuk bahasa Indonesia para dosen dalam pengajaran. Namun dari ceramah-ceramah, pidato-pidato, dan pengutaraan masalah-masalah dalam rapat atau diskusi pada dosen, kami peroleh kesan tersebut.

Yang menjadi soal pula dalam penguasaan bahasa ialah bahwa jika pada waktu permulaan pelajaran bahasa, pembicara tidak atau kurang mempelajari sungguh-sungguh pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan sukarlah menghilangkan dan memperbaiki kebiasaan pemakaian bahasa yang ceroboh dan salah itu. Kemungkinan besar pembicara-pembicara itu tidak sadar bahwa bahasa Indonesia mereka kurang baik, sehingga biarpun beberapa tahun terakhir ini banyak diadakan seminar, lokakarya, dan diskusi, namun penguasaan bahasa Indonesia lisan kebanyakan dosen tidak bertambah baik.

Bagaimana penguasaan bahasa Indonesia tulisan para dosen?

Dalam hal ini rupanya terdapatlah hal yang lebih menggembirakan biarpun belum banyak monograf-monograf dan buku-buku dalam bahasa Indonesia yang ditulis para sarjana. Namun dari buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, kami memperoleh kesan bahwa mereka telah memakai bahasa Indonesia yang makin lama makin sesuai dengan pemakaian bahasa Indonesia tulisan yang baik, biarpun masih banyak juga orang atau ahli bahasa yang mengeluh, betapa kurangnya penguasaan bahasa Indonesia para dosen ahli-ahli bahasa Indonesia sendiri.<sup>1)</sup> Memang ironis benar, tetapi hal ini mungkin pula disebabkan oleh lingkaran setan yang kami sebutkan di atas. Penguasaan bahasa merupakan salah satu tingkah laku manusia, dan di Indonesia berbahasa tidak menjadi kecuali dari tingkah laku manusia Indonesia pada umumnya. Bahkan berbahasa dapat merupakan suatu cermin tingkah laku yang lain-lain, karena bahasa adalah alat komunikasi kegiatan bidang-bidang lain di dalam kebudayaan itu. Jika kegiatan-kegiatan bidang lain, seperti pemerintahan atau politik, hukum dan perundang-undangan, pendidikan dan ketrampilan, ekonomi dan perdagangan, belum terdapat sistem yang baik sehingga mudah dipahami maka pada kegiatan berbahasa

pun belum terdapat disiplin yang diminta kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan, dan sebagainya, yang merupakan suatu keadaan mental masyarakat, tercerminkan pula dalam penggunaan bahasa.<sup>2)</sup>

Bagaimana pembinaan bahasa yang dilakukan di luar dunia perguruan tinggi ? Dalam hal ini dua instansi mungkin perlu disebut, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai direktorat yang mengurus pengadaan buku teks, baik tulisan asli, saduran, maupun terjemahan, dan bagian yang mengurus penelitian dan pertemuan ilmiah. Boleh dikatakan bahwa bagian-bagian ini hanya merupakan sarana, biarpun sarana yang penting sekali dalam pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alangkah baiknya, seandainya di samping ketiga bagian itu, Direktorat Pembinaan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat masih mempunyai bagian yang mengurus khusus tentang pembinaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagian yang mengurus khusus tentang masyarakat. Dengan demikian akan terdapat bagian yang merupakan komponen-komponen pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lengkap, termasuk alat dan wahananya, yaitu bahasa Indonesia.

Peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pembinaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi jelas positif. Usahanya untuk menciptakan istilah-istilah ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan boleh dikatakan berhasil, biarpun belum selesai seluruhnya. Hal ini diperkuat dengan kerja sama dengan Malaysia untuk menghasilkan istilah-istilah yang sama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Lebih penting lagi daripada penciptaan istilah-istilah itu ialah penyebarannya agar dipakai oleh ilmuwan dan dosen bidang yang bersangkutan, sebab kita dapat menciptakan beribu-ribu istilah, tetapi tanpa pemakaiannya, usaha itu akan mubazir belaka.

Di samping pemakaian sehari-hari di ruang kuliah ataupun di luarnya, yang menentukan penyebaran dan pemakaian istilah-istilah itu secara umum ialah pemakaiannya dalam buku-buku (teks). Seperti juga orang tidak belajar bahasa hanya dengan menghafalkan kata-kata, demikian pula orang yang belajar ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dengan menghafalkan istilah-istilah, betapa pun pentingnya istilah-istilah itu, yang mengandung berbagai pengertian, makna, dan konsep ilmiah. Jika secara lisan istilah-istilah itu disebarkan melalui kuliah, diskusi, lokakarya dan seminar, secara

tertulis disebarkan dan diujikan pengertian-pengertian yang terdapat padanya melalui karangan, monografi, dan buku. Bersama itu pula mahasiswa dibina dalam hal pengajian proposisi, asumsi, hipotesis, dan teori melalui pemakaian bentuk kalimat-kalimat, penyusunan paragraf, dan bahkan bab-bab khusus. Dengan demikian akan terciptalah gaya bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Apabila ilmu pengetahuan dan teknologi terekam dalam karangan dan buku, maka terekam pulalah bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi itu.

### 3. Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Yang kami maksud dengan "pengembangan" di sini ialah usaha menambah dan memperbaiki pemakaian bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah tentu pengembangan bahasa Indonesia dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, sehingga berhasil tidaknya bergantung pada kegiatan para ilmuwan dan teknologian. Usaha ini akan dapat dibantu oleh kesadaran ilmuwan dan teknologian, bahwa pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar akan sangat membantu jalan pikiran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka sampaikan kepada mahasiswa, rekan di perguruan tinggi dan di luarnya. Kegiatan-kegiatan para sarjana itu meliputi hal-hal di bawah ini.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada hemat kami dapat dilakukan melalui beberapa cara. Kita dapat mengibaratkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai organisme, dan perkembangannya kami analogikan dengan tanaman, sehingga kami catat tiga macam pertumbuhan, yaitu *transplanting* (penanaman pindahan), okulasi, dan pembibitan. Proses pertama ialah apabila seorang sarjana menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibawa dari luar negeri, baik melalui perkuliahan ataupun penerapan di masyarakat, tanpa mengadakan penyesuaian dengan keadaan masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Seperti kita ketahui dalam pertanian, penanaman pindahan semacam ini sering mengalami kemacetan, jika tanaman itu tidak sesuai dengan keadaan *tanah* di tempat menanam. Demikian pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses kedua lebih menjamin perkembangan karena sarjana itu telah mencernakan baik melalui perkuliahan maupun penerapan di luar, mengetahui benar bahwa ia telah menyesuaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pertumbuhan atau perkembangannya akan jauh lebih baik dan terjamin. Sudah barang tentu proses ketiga adalah cara yang paling baik, yaitu dengan mengadakan pene-

litian di Indonesia ia memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang telah terbukti dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi macam ini, jika bersifat alami, telah memperhitungkan keadaan alam Indonesia; jika bersifat sosial, telah pula memperhitungkan keadaan sosial Indonesia; dan jika bersifat budaya, telah juga memperhitungkan kebudayaan Indonesia.

Bagaimana proses ketiga macam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di atas sehubungan dengan wahananya, yaitu perkembangan bahasa Indonesia di dalamnya? Ada tiga masukan (*input*) penting yang menjadi bahan proses pengembangan ini, ialah tenaga manusia dari perguruan tinggi, standarisasi bahasa Indonesia, dan masyarakat-masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi merupakan tempat tenaga manusia dalam urusan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja di samping pusat-pusat penelitian, yang secara implisit kami masukkan ke dalam perguruan tinggi. Di sinilah terjadi asalmula ketiga macam proses yang kami sebutkan di atas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi merupakan tempat tenaga manusia dalam urusan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja di samping pusat-pusat penelitian, yang secara implisit kami masukkan ke dalam perguruan tinggi. Di sinilah terjadi asalmula ketiga macam proses yang kami sebutkan di atas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi perguruan tinggi tidak mungkin melakukan hal itu, apalagi jika tidak ada alat atau wahananya yang berupa bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini lebih-lebih menyangkut peristilahan dan gaya bahasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila perguruan tinggi dengan bantuan bahasa Indonesia telah melakukan tugasnya, pastilah akan menyerahkan hasil itu kepada masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh *sanctioning* mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Inilah peranan yang sangat penting bagi masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu perlu benar ditumbuhkan dan dipelihara kehidupan masyarakat-masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini, terutama masyarakat-masyarakat ilmu pengetahuan yang "kering". Pemerintah Indonesia, jika benar-benar menginginkan hal itu tumbuh dengan baik, berkewajiban untuk membantu masyarakat-masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi itu, dan bahkan perlu mengadakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus untuk memelihara kehidupan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana mengelola pengembangan bahasa Indonesia dalam proses ilmu pengetahuan dan teknologi di atas? Tersusunnya kamus-kamus istilah berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, masih mengharapkan pekerjaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya tentang pemakaian bahasa Indonesia di dalamnya. Tugas ini lebih bersifat penstandaran, penyanksian, dan pencatatan dalam soal istilah (dan gaya bahasa). Apabila sampai sekarang ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merupakan pengambilan inisiatif dalam penyusunan istilah-istilah, setelah kamus-kamus istilah dan pedoman pembentukan istilah beredar di kalangan ilmuwan dan teknologian, inisiatif untuk menciptakan istilah-istilah baru sebagai keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diambil oleh anggota-anggota masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri. Hanya jika terdapat ketidakcocokan dalam penyusunan istilah dalam masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi, hal itu diserahkan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk diputuskan, dan keputusan hendaklah diterima oleh semua anggota masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertumbuhan istilah (dan perkembangan gaya bahasa), yang dapat dilihat dalam buku-buku (baru), seharusnya dicatat oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk kemudian diterbitkan, sehingga kerja sama yang baik antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, masyarakat ilmu, dan perguruan tinggi perlu benar diusahakan.

#### 4. Kesimpulan

Telah jelas kiranya bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bergantung seluruhnya kepada kegiatan ilmuwan dan teknologian untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan itu berupa mengajar di perguruan tinggi, mengadakan diskusi, lokakarya dan seminar, serta menulis karya ilmiah seperti kertas kerja, karangan, monograf, buku, dan lain sebagainya. Jika kita ketahui bahwa lokus ilmu pengetahuan dan teknologi terletak pada kesadaran ilmuwan dan teknologian serta pada perekaman yang berupa karangan ilmiah, monograf, dan buku, kriteria keberhasilan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ialah bertambahnya jumlah dan mutu yang baik dari ilmuwan dan teknologian serta buku tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan hal ini akan sekaligus merupakan berhasilnya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.



Pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendapatkan *sanctioning*-nya dari masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan penjaga mutu yang ketat. Oleh karena itu, peranan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan main pentingnya. Menurut Daniel Bell (1973: 380): *"The community of science is a unique institution in human civilization. It has no ideology, in that it has no postulated set of formal beliefs, but it has an ethos which implicitly prescribes rules of conduct. It is not a political movement that one joins by subscription, for membership is by election, yet one must make a commitment in order to belong. It is not a church where the element of the faith rests on belief and is rooted in mystery, yet faith, passion, and mystery are present, but they are directed by the search for certified knowledge whose function it is to test and discard old beliefs. Like almost every human institution, it has its hierarchies and prestige rankings, but this ordering is based uniquely on achievement by peers rather than on inheritance, age grading, brute force, or contrived manipulation. In totality, it is a social contract but in a way never foretold by Hobbes of Rousseau, for while there is a voluntary submission to a community and a moral unity results, the sovereignty is not coercive and the conscience remains individual and protestant. As an image, it comes closest to the ideal of the Greek polis, a republic of free men and women united by a common quest for truth . . . . ."*

Jika masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia telah bangkit dan menerima tugasnya sebagai pembina dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khususnya penciptaan istilah dan gaya bahasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan dapat dilihat dalam karangan-karangan dan buku baru. Pembinaan dan pengembangan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi serta penulisan karya ilmiah akan menjadi sangat penting, dan hasilnya perlu diikuti oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk istilah baru, pencatatannya serta penerbitan kamus-kamus istilah, dan penelusuran gaya bahasa, yang penting sekali bagi pendidikan bahasa para mahasiswa.

#### C a t a t a n :

1. Dalam harian Kompas bertanggal 13 Juni 1978 Redaksi mengantarkan rubrik "Bahasa Kita" yang memuat tulisan S. Suharianto, dengan: "Dalam suatu konferensi tentang bahasa dan sastra (yaitu Konferensi Bahasa dan



Sastra Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tanggal 12 – 18 Februari 1978, Penulis), tentunya bisa diharapkan bahwa para penulis kertas kerja menggunakan bahasa dengan baik dan benar.

Tetapi ternyata para ahli bahasa pun masih sering membuat kesalahan dalam penyusunan kalimat . . . . . ”

2. Orang mungkin bertanya, bukankah para sarjana merupakan kelompok elite dan semestinya tidak terlibat oleh keadaan umum yang buruk? Jawaban kepada pertanyaan itu dapat diberikan: ”Ya, mestinya ! Tetapi sarjana pun hanya manusia biasa (di Indonesia) yang mempunyai kekurangan-kekurangan juga !”

### DAFTAR PUSTAKA

- Bell, Daniel. 1973. *The Coming of Post-Industrial Society, A Venture in Society Forecasting*. New York: Basic Books, Inc. Publisher.
- Carroll, John B. 1960. ”Vectors of Prose Style” dalam Thomas A. Sebeok (ed). *Style in Language*. New York, London: The Technology Press on MIT and John Wiley & Sons.
- Dedijer, Steven. 1958. ”Underdeveloped Science in Underdeveloped Countries, ”dalam Edward Shils (ed.) *Criteria for Scientific Development Public Policy, and National Goals*. USA: MIT, The Maple Press.
- Merton, Robert K. 1973. *The Sociology of Science, Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Moravcsik, Michael J. 1968. ”Some Practical Suggestions for the Improvement of Science in Developing Countries”, dalam Edward Shills. (ed.) *Criteria for Scientific Development, Public Policy, and National Goals*. USA: MIT, The Maple Press.
- Polanyi, Michael. 1968 ”The Growth of Science in Society” dalam Edward Shils (ed.) *Criteria for Scientific Development, Public Policy, and National Goals*. USA: MIT, The Maple Press.
- Samsuri. 1975 ”Kebudayaan, Masyarakat, dan Bahasa Indonesia”, dalam *Bulletin Yaperna, Berita Ilmu-ilmu Sosial dan Kebudayaan*, Th. II, No. 6, April 1975, pp. 14–24.

1978. a. *Analisa Bahasa*, khususnya "Bahasa dan Ilmu Pengetahuan" Jakarta Erlangga, pp. 32-4.

1978. b. "Takdir's Tatabahasa Baru Indonesia and The Writing of Indonesia Grammars", dalam *Spectrum, Essays Presented to Sutan Takdir Alisyahbana on His Seventieth Birthday*, Jakarta: Dian Rakyat.

\*\*\*

kungan, yang kemudian diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena sastra menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi, maka dengan sendirinya bahasa merupakan sarana komunikasi sosial, sarana pemersatu generasi terdahulu dan generasi berikutnya yang sekaligus mengikat kelompok-kelompok sosial sezamannya. Dari segi inilah akan dibahas masalah bahasa sebagai sarana komunikasi sosial suatu bangsa.

## 2. Lambang sebagai Refleksi Kebudayaan dalam Bahasa

Di dalam alam filsafat, kemampuan membuat lambang merupakan hal yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang hanya dimiliki manusia sebagai makhluk hidup. Lambang adalah hasil proses berpikir, proses belajar tentang diri, lingkungan, dan relevansinya antara satu sama lain. Lambang adalah hasil abstraksi dari proses berpikir dan belajar. Peursen (1976: 147) membedakan antara lambang yang merupakan perjanjian antarmanusia saja (seperti lambang dalam matematika, aljabar, dan lain-lainnya) dan lambang yang terbina dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Lambang-lambang tertua yang dikenal antara lain: api, air, matahari, serta ikan yang telah memperoleh fungsi religius dan telah melampaui arti lambang sebagai alat komunikasi saja. Melalui lambang-lambang itu terbentuklah suatu kebudayaan yang akhirnya mengikat satu generasi pada generasi sebelumnya dan seterusnya. Lambang-lambang tidak dapat dipisahkan dari alam kebudayaannya. Hal ini terbukti dari huruf hieroglif di Mesir Kuno yang menggambarkan sesuatu, jadi mengandung berita tetapi tidak lewat huruf-huruf biasa (satu huruf satu bunyi misalnya), melainkan lewat lambang-lambang keagamaan kuno yang sekaligus merupakan ekspresi seni yang indah sekali. ....

Dilihat dari sudut ini, lambang-lambang yang menceritakan tentang pengalamannya merupakan ilustrasi mengenai proses belajar yang luas itu yang biasanya kita sebut kebudayaan (Peursen, 1976: 147).

Sarana yang dipakai untuk menceritakan pengalaman dituangkan dalam suatu sistem sehingga terbentuklah "sistem perlambangan" (*sign system*). Kemampuan melepaskan pengalaman dari lingkungan melalui teknik abstraksi inilah yang biasanya disebut bahasa. Dengan demikian, terdapatlah bahasa yang diekspresikan melalui tari, lukisan, dan gerakan. Namun demikian yang terutama dipermasalahkan di sini ialah bahasa yang merupakan "sistem lambang suara" (*system of vocal signs*) yang merupakan landasan kehidupan manusia pada umumnya (berger dan Luckman, 1967: 37). Sistem lambang suara ini kemudian disusun/diekspresikan secara tertulis sehingga terbentuklah ba-

1978. a. *Analisa Bahasa*, khususnya "Bahasa dan Ilmu Pengetahuan" *Jakarta Erlangga*, pp. 32-4.

1978. b. "Takdir's Tatabahasa Baru Indonesia and The Writing of Indonesia Grammars", dalam *Spectrum, Essays Presented to Sultan Takdir Alisyahbana on His Seventieth Birthday*, Jakarta: Dian Rakyat.

\*\*\*



# BAHASA SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI SOSIAL SUATU BANGSA

Astrid S. Susanto



## 1. Pendahuluan

Marshall McLuhan (1966) mengeluh mengapa dalam zaman media massa dan abad serba mungkin ini, anehnya manusia berhadapan dengan manusia buta aksara lagi, sebagai akibat termanjakannya manusia oleh media visual melalui televisi. Mental manusia pun berubah kembali ke alam kehidupan pedesaan sehingga terbentuklah desa semesta (*global village*) yaitu: keinginan akan keseragaman meningkat, keinginan akan pengalaman sama meningkat, dan usaha untuk menjadi me-

dia cetak/tertulis meningkat pula. Berubahlah manusia purnaaksara menjadi manusia buta aksara lagi. Hal kedua yang disesalkan McLuhan adalah pengaruh media elektronika yang sedemikian intensifnya sehingga terputuslah alam kehidupan generasi kita dengan generasi sebelumnya. Keadaan ini disebabkan karena kemampuan media elektronika untuk menyajikan sedemikian banyak informasi dalam waktu yang singkat. Akibatnya manusia dewasa ini dibanjiri informasi-informasi masa kini serta permasalahannya, sehingga ia sukar mencari waktu untuk belajar tentang diri ataupun lingkungannya. Perhatiannya, terutama tertuju kepada masalah-masalah kini, dan kurang melihat dirinya sebagai hasil dari masa lalu.

Dalam hubungan itu McLuhan menyesalkan terdesaknya media cetak oleh media elektronika visual, yang mengakibatkan tersisihnya sastra sebagai salah satu mata rantai komunikasi antargenerasi. Oleh karena sastra adalah hasil zamannya, maka sastra akan menggunakan bahasa dan lambang-lambang yang melukiskan alam fisik dan ide zamannya — hal yang dibahas dan wawasan pikiran pada zaman itu — diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Dengan demikian, generasi berikutnya mengerti lingkungan sosial dan problema zaman sebelumnya melalui bahasa dan sastra sehingga terbentuklah suatu kesinambungan nilai-nilai budaya melalui komunikasi antargenerasi, penerusan nilai dari generasi satu ke generasi berikutnya secara alamiah. Oleh karena itu, sastra merupakan keseluruhan pikiran dan penilaian tentang diri dan ling-

kungan, yang kemudian diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Oleh karena sastra menggunakan bahasa sebagai alat ekspresi, maka dengan sendirinya bahasa merupakan sarana komunikasi sosial, sarana pemersatu generasi terdahulu dan generasi berikutnya yang sekaligus mengikat kelompok-kelompok sosial sezamannya. Dari segi inilah akan dibahas masalah bahasa sebagai sarana komunikasi sosial suatu bangsa.

## 2. Lambang sebagai Refleksi Kebudayaan dalam Bahasa

Di dalam alam filsafat, kemampuan membuat lambang merupakan hal yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang hanya dimiliki manusia sebagai makhluk hidup. Lambang adalah hasil proses berpikir, proses belajar tentang diri, lingkungan, dan relevansinya antara satu sama lain. Lambang adalah hasil abstraksi dari proses berpikir dan belajar. Peursen (1976: 147) membedakan antara lambang yang merupakan perjanjian antarmanusia saja (seperti lambang dalam matematika, aljabar, dan lain-lainnya) dan lambang yang terbina dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Lambang-lambang tertua yang dikenal antara lain: api, air, matahari, serta ikan yang telah memperoleh fungsi religius dan telah melampaui arti lambang sebagai alat komunikasi saja. Melalui lambang-lambang itu terbentuklah suatu kebudayaan yang akhirnya mengikat satu generasi pada generasi sebelumnya dan seterusnya. Lambang-lambang tidak dapat dipisahkan dari alam kebudayaannya. Hal ini terbukti dari huruf hirolgif di Mesir Kuno yang menggambarkan sesuatu, jadi mengandung berita tetapi tidak lewat huruf-huruf biasa (satu huruf satu bunyi misalnya), melainkan lewat lambang-lambang keagamaan kuno yang sekaligus merupakan ekspresi seni yang indah sekali. . . . .

Dilihat dari sudut ini, lambang-lambang yang menceritakan tentang pengalamannya merupakan ilustrasi mengenai proses belajar yang luas itu yang biasanya kita sebut kebudayaan (Peursen, 1976: 147).

Sarana yang dipakai untuk menceritakan pengalaman dituangkan dalam suatu sistem sehingga terbentuklah "sistem perlambangan" (*sign system*). Kemampuan melepaskan pengalaman dari lingkungan melalui teknik abstraksi inilah yang biasanya disebut bahasa. Dengan demikian, terdapatlah bahasa yang diekspresikan melalui tari, lukisan, dan gerakan. Namun demikian yang terutama dipermasalahkan di sini ialah bahasa yang merupakan "sistem lambang suara" (*system of vocal signs*) yang merupakan landasan kehidupan manusia pada umumnya (berger dan Luckman, 1967: 37). Sistem lambang suara ini kemudian disusun/diekspresikan secara tertulis sehingga terbentuklah ba-

han tulis. Bahasa, karenanya, berpangkal pada situasi komunikasi langsung yang memungkinkan terbentuknya komunikasi sosial. Komunikasi sosial memungkinkan terbentuknya suatu ikatan sosial melalui interaksi dan proses saling mempengaruhi, yang merupakan hasil suatu komunikasi yang efektif/positif.

Himpunan dari semua pemikiran dan pengalaman yang tertulis (terdokumentasikan) merupakan sastra suatu kelompok sosial, sastra suatu bangsa. Sastra demikian inilah dikenal sebagai "gudang pengetahuan masyarakat" (*social stock of knowledge*), dan karenanya merupakan informasi yang lebih banyak dan lebih luas, meliputi berbagai bidang kehidupan sehari-hari dari berbagai manusia dalam berbagai zaman, yang jelas lebih luas daripada pengalaman pribadi seseorang. Melalui gudang pengetahuan masyarakat inilah terbentuk suatu struktur sosial masyarakat, yaitu penjelasan bagaimana relevansi masing-masing dengan pihak dan lingkungan lain. Melalui gudang pengetahuan masyarakat tersusunlah suatu "struktur relevansi" (*relevance structure*) yang menjelaskan kebudayaan suatu kelompok sosial (Berger dan Luckman, 1967: 41).

Teknologi modern telah memungkinkan bahwa selain perekaman pengalaman melalui bahasa tulis, perekaman pengalaman juga dapat dilakukan melalui rekaman suara dan gambar gerak, sehingga pendapat McLuhan hanyalah tepat untuk sebagian saja. Memang benar bahwa sastra merupakan alat komunikasi yang biasa dipergunakan oleh generasi sebelum media massa elektronik, sehingga apabila manusia dewasa ini *tidak* terbiasa memanfaatkan sastra, dengan sendirinya ia juga tidak dapat berkomunikasi dengan generasi-generasi sebelumnya. Lain halnya dengan generasi-generasi berikut yang dapat memanfaatkan rekaman suara dan gambar gerak, yang memungkinkan penerusan pemikiran-pemikiran dan pengalaman suatu generasi kepada generasi lebih lanjut.

Namun demikian, media komunikasi elektronik dewasa ini justru memungkinkan penghimpunan dan penyebaran sebanyak mungkin naskah melalui duplikasinya yang bukan merupakan lembaran foto (*photo copy*) melainkan juga secara keseluruhan melalui film-mikro yang terbesar di berbagai perpustakaan, tanpa menggunakan naskah aslinya. Dengan demikian, maka untuk generasi-generasi berikutnya gudang pengetahuan bagi masyarakat bukan saja terbatas pada sastra tetapi juga pada rekaman-rekaman suara dan gambar-gambar gerak tersebut akan lebih memperkaya dan lebih mendekatkan pengetahuan baru kepada pengetahuan/pengalaman aslinya.



Ditinjau dari struktur relevansi yang tercermin pada gudang pengetahuan masyarakat dan yang tertuang dalam sistem perlambangan yang dipergunakan, dapatlah dikatakan bahwa lambang adalah refleksi kebudayaan zaman dan kebudayaan pemakainya. Dalam hubungan ini, bahasa sebagai refleksi dari sistem lambang vokal, tidak berbeda daripadanya.

### 3. Bahasa sebagai Sarana Komunikasi Sosial

Tadi setelah dibahas masalah pengalaman yang dituangkan/diekspresikan secara tertulis maupun gambar/suara yang mencerminkan struktur relevansi dengan lingkungan. Dalam hubungan ini, penduduk Jakarta baru-baru ini mengalami hal yang menarik dan dapat dipakai sebagai contoh yaitu pementasan wayang oleh *Dalang Bocah*. Cerita yang dibawakan, sebagian masih dari Mahabharata dan sebagian sudah tentang cerita anak/panji yang lebih relevan dengan sejarah Indonesia setelah zaman Hindu, atau dalam masa transisinya. Bentuk wayang masih mencerminkan *keasliannya*, tetapi bahasa yang dipakai — dalang yang berdatangan dari berbagai daerah — telah mencerminkan bahasa lingkungan si dalang. Dalam hubungan ini dalang dari Jakarta tidak ragu-ragu mengatakan *gue colok mata lu* dan dalang bocah (yang walaupun berasal dari keluarga transmigran di Sulawesi Selatan/Luwu atau Lampung) sudah mengalami kesukaran dalam menggunakan bahasa Jawa halus dalam menuturkan ceritanya.

Kejadian tersebut menjelaskan bagaimana suatu rekaman melalui kegiatan pengulangan oleh manusia lain mengalami perubahan karena pengaruh lingkungan pembawa cerita/dalang. Hal ini terjadi karena manusia dalam hidupnya selalu mengadakan dan mengalami komunikasi. Manusia menggunakan komunikasi sebagai radar untuk mengetahui apa yang baru dan mencari petunjuk serta pembenaran terhadap sikap dan perilakunya, terutama dalam hubungannya dengan lingkungannya.

Melalui komunikasi, manusia sekaligus menyatakan identitas dan pengertiannya terhadap lingkungan. Manusia menggunakan komunikasi sebagai alat pengolahan masalah untuk mengambil keputusan dan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam keseluruhannya, manusia juga menggunakan komunikasi dalam mengisi waktu senggangnya, bekerja maupun bersantai. Tidak mengherankan — karena manusia selalu berkomunikasi dan mengalami komunikasi — bahasa manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, lingkungan yang sekaligus menjelaskan kepadanya, hak dan kewajiban serta batas-batas kebebasannya. Dalam keadaan inilah terbentuk dan berkembanglah pemben-

tukan bahasa. Manusia mengadakan ikatan sosial, menyatakan kembali keterikatan sosialnya sehingga bahasa menjadi sarana komunikasi sosial.

Bagaimana lingkungan fisik dan sosial mempengaruhi bahasa dan susunan kata yang dipergunakan, dijelaskan oleh Dorothy Lee (1966: 12–23) dalam *Linguistic reflection of Wintu thought*. Dalam studinya mengenai bahasa suku Wintu di Amerika, ia yang melihat diri sebagai bagian dari kosmos dan siklus hidup dalam alam semesta. Susunan dan pilihan kata yang tercermin dalam bahasa sehari-hari, mencerminkan adanya suatu kesadaran yang mendalam tentang diri yang hidup dalam ekosistem alam semesta. Selain itu, demi kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan, semua mempunyai waktu yang telah ditentukan untuk setiap tahap dalam hidup. Dengan demikian maka seorang pemburu yang kurang berhasil tidak akan mengatakan, "Hari ini saya tidak dapat membunuh rusa", tetapi akan mengatakan, "Hari ini rusa tidak mau mati untuk saya". Dalam kalimat ini tercermin adanya suatu hukum alam yang belum menentukan bagi rusa untuk dibunuh oleh pemburu, dan dalam berburu pun korban yang ditangkap haruslah mengalami suatu kerelakan, hal itu akan terjadi apabila hukum alam menentukannya. Dengan demikian tampak jelas bahwa filsafat hidup dan filsafat tentang relevansi diri dengan lingkungan sangat dipengaruhi bahasa suku Wintu tersebut. Bahkan dalam kegiatan sehari-hari, suku Wintu mencerminkan pemikiran mereka tentang adanya tugas manusia untuk menjamin kelangsungan hidup lingkungannya, antara lain tercermin dalam penebangan pohon yang dibatasi pada pohon-pohon tua, atau teknik penebangan yang bukan dibatasi pada pemotongan batang di atas tanah tetapi penggalian pohon sampai ke akar-akarnya. Mereka mengatakan, "Bangsa kulit putih membajak tanah, menebang pohon, membunuh segala-galanya . . . . karena itu Dewa Tanah membenci mereka. Mereka menggergaji pohon, menarik pohon. Hal itu menyakiti mereka. Bangsa Indian tidak pernah menyakiti siapa pun . . . . ."

Suatu studi lain yang dibuat Stephen Gilman (1966: 24–33) menjelaskan bahwa dalam bentuk epik kuno, waktu yang dipergunakan pengarang berubah-ubah bergantung pada apa yang dianggapnya penting. Melalui analisisnya tentang *Poema del Cid*, Stephen Gilman menemukan bagaimana epik ini telah meletakkan dasar nilai-nilai bagi bangsa Spanyol sebagaimana juga mewarnai kepribadian nasionalnya melalui pemanfaatan waktu dalam penyusunan kalimat. Dalam susunan epik itu, ia melihat adanya penggunaan waktu masa kini maupun masa lampau. Masa lampau sekedar untuk menjelaskan jalan ceritanya, sedangkan pengalihan secara mendadak ke waktu kini berguna untuk menitik-beratkan sesuatu yang penting, biasanya mencerminkan suatu

sikap atau nilai yang ingin ditanamkan. Dengan demikian epik tersebut menggunakan pernyataan dalam waktu kini untuk memberi aksi kepada suatu nilai, sehingga melalui pergantian waktu terjadilah penonjolan yang memberi efek yang lebih tinggi dalam kegiatan komunikasi. Dengan demikian, tata bahasa yang dipergunakan dalam *Poema del Cid* tidak saja mencerminkan gaya penulisan akan tetapi tata bahasa telah dijadikan alat dari gaya itu.

Suatu analisis tentang puisi yang dilakukan oleh Daisetz T. Suzuki terhadap teknik penulisan sastra Jepang dalam abad ke-18, memberi kesimpulan yang sama yaitu bahwa bahasa yang menitikberatkan partisipasi komunikasi barulah memberi arti kepada kegiatan komunikasi. Puisi Jepang zaman tersebut biasanya dimulai dengan deskripsi lingkungan yang merupakan pemaparan data. Deskripsi ini belum memperoleh makna karena belum ada *aksi* yang menghubungkan lingkungan dengan pelaku dan terutama penyairnya sendiri. Melalui aksi, lingkungan yang masih merupakan lingkungan *kosong*, terjadilah partisipasi yang memberi identitas kepada masing-masing pelakunya maupun komunikasi/penyair. Aksi inilah yang justru menurut Suzuki merupakan pembentuk perlambangan dalam Buddhisme (*Buddhist symbolism*), yang melalui perlambangan ini akhirnya memberi makna dan membawa nilai terhadap apa yang dibahas. Sekali lagi, tampak di sini bahwa memberi nilai, komunikator nilai-nilai sosial dalam masa lampau terutama adalah para sastrawannya. Merekalah yang mendokumentasikan pikiran dan pengalaman serta nilai-nilai yang diagungkan itu kepada pembaca-pembaca generasi berikutnya. Dalam hubungan ini, sastra dalam bentuk prosa maupun puisi selalu menggunakan bahasa sebagai alatnya.

Kadang-kadang bahasa sedemikian subordinasinya terhadap tujuan komunikasi (yaitu penanaman/penyampaian nilai-nilai tertentu), sehingga tata bahasa diubah sekedar untuk memberi tekanan kepada apa yang ingin disampaikan. Makin pandai dan halus tujuan komunikasi terjalin dalam bahasa dan permainan tata bahasa sebagai tekniknya, makin tinggi nilai budayanya. Makin terjalannya bahasa dengan tujuan komunikasi, bentuk, isi, dan arti dalam penyampaian, makin terbataslah lingkungan khalayaknya. Hal ini disebabkan oleh penjalinan unsur-unsur itu sendiri terikat oleh kebudayaan sastrawannya, sehingga hasil karangannya selalu mencerminkan sifat khas lingkungan budaya (*culture specific*) (Hall, 1977: 74). Oleh karena itu jelaslah bahwa bahasa, dan terutama hasil karya sastra hanya terbatas pada kelompok masyarakat budaya yang sama. Di dalam interaksi bangsa, sastra dapat membantu meningkatkan keterikatan sosial anggota bangsa, dengan memahami, meyakini, menghayati, dan menghidupi nilai-nilai yang tercermin dalam sastra budayanya.

#### 4. Komunikasi Budaya dan Negara Berkembang

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi. Informasi tersebut disusun, disebar menurut nilai dan budaya yang ada dalam setiap masyarakat. Dalam berkomunikasi, bahasa dipergunakan sebagai sistem lambang yang dapat dibentuk bahasa tulis atau bahasa lisan, sebagai proses abstraksi lebih lanjut daripada bahasa lisan.

Penggunaan bahasa oleh suatu bangsa merupakan hasil perkembangan politik dan budaya bangsa yang bersangkutan. Makin lama suatu bahasa mengikat suatu bangsa, makin banyak unsur keterlibatan sosial yang akan tercermin dalam bahasanya. Dalam hubungan ini dapat dipergunakan analisis Edward Hall yang menganalisis komunikasi dan informasi dari sifat monokronik dan polikronik. Suatu kebudayaan yang mencerminkan sifat monokronik lebih mencerminkan keterlibatan dan totalitas kejadian daripada unsur-unsur individualnya. Selanjutnya beberapa sifat kebudayaan monokronik adalah: dikuasai oleh waktu, kompartementalisasi adanya banyak prioritas, sikap memandang sesuatu secara linear, dan mengalami kesukaran dalam menyatukan kenyataan dengan pikiran diri. Sebaliknya suatu masyarakat dengan kebudayaan polikronik mencerminkan sifat totalitas, interaksi yang banyak antarindividu maupun individu dengan lingkungannya, dan selalu melihat diri sebagai bagian/subsistem dari suatu sistem yang lebih besar. Dalam hubungan ini, kebudayaan tua biasanya memperlihatkan sistem komunikasi dengan memberi banyak arti kepada sedikit/sejumlah lambang yang terbatas. Akibatnya setiap lambang mempunyai banyak arti dan banyak nilai implisit, oleh karena itu dikenal sebagai *H(igh) C(ontext) Communications* atau komunikasi dengan konteks banyak. Sebaliknya kebudayaan baru/rendah mencerminkan komunikasi dengan konteks sedikit dalam lambang-lambang yang dipergunakan, yang dikenal dengan istilah *L(ow) C(ontext) Communications*. Jelaslah bahwa komunikasi antara kedua sistem ini sangat sukar, terutama bagi pihak yang terbiasa dengan sistem konteks sedikit/rendah yang harus menyesuaikan diri, berusaha memahami pihak yang terbiasa dalam sistem komunikasi dengan konteks banyak/tinggi (Hall, 1977: 91).

Sekali lagi, terbukti bahwa lambang selalu mencerminkan kebudayaan diri dan lingkungan dan bahasa adalah hasil dari perlambangan tersebut. Oleh karena itu, makin banyak orang terbiasa hidup dalam lingkungan budaya yang sama, makin terbiasa ia menggunakan sistem lambang yang sama, yaitu memberi arti yang sama kepada lambang yang dipergunakan. Sebaliknya juga benar, bahwa melalui bahasa orang dapat mempelajari kebudayaan yang lain, atau bahasa merupakan dasar pengertian dan pembentukan suatu ikatan sosial

baru. Oleh karena itu pulalah dapat dikatakan bahwa bahasa, komunikasi sosial, dan kebudayaan saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui penggunaan lambang-lambang yang sama, lambat-laun orang akan memberi arti yang sama pula kepada lambang yang dipergunakan. Dengan demikian melalui bahasa terbentuk pulalah pembakuan/penyebaran pembakuan lebih lanjut dari nilai dan arti yang dituangkan dalam lambang. Ruth Benedict menggunakan istilah "sistem sinergi sosial" (= kerja sama sosial) sebagai pengukuran kebudayaan suatu kelompok sosial (Gross, 1975: 31). Makin tinggi kerja sama sosialnya, makin tinggi sinergi sosialnya; makin sedikit kerja sama sosialnya, makin rendah sinergi sosialnya. Dengan demikian, melalui komunikasi dan bahasa tingkat sinergi ini akan tercerminkan pula yaitu bahwa: makin banyak orang bekerja sama, makin sedikit lambang diperlukan untuk menyampaikan sesuatu; sebaliknya makin sedikit orang bekerja sama, makin banyak lambang diperlukan untuk menjelaskan maksud hatinya.

Jika pendapat Ruth Benedict ini dikombinasikan dengan pendapat Edward Hall, maka dapatlah dikatakan bahwa masyarakat dengan kebudayaan tinggi akan mengalami sistem komunikasi polikronik dengan sinergi sosial yang tinggi. Sebaliknya, masyarakat dengan kebudayaan yang lebih rendah (= pengalaman lebih sedikit) mengalami sistem komunikasi monokronik dengan sinergi sosial yang rendah. Sifat khas masyarakat dengan sinergi sosial yang tinggi ialah apabila lembaga-lembaga sosial dan individu saling menunjang dan memperkaya, sedangkan hal yang sebaliknya berlaku bagi masyarakat dengan sinergi rendah. Lerry Gross dalam hubungan itu cenderung untuk mengidentifikasi masyarakat industri sebagai masyarakat dengan sinergi sosial yang rendah, mengingat bahwa berhasilnya pihak yang satu biasanya merugikan pihak lain. Selanjutnya, makin tinggi kebudayaan suatu bangsa, makin berkembang budaya ekspresif dan pentasan, sebagai penuangan dari perilaku simbolik primer suatu masyarakat. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang makin mundur yang hanya menitikberatkan perilaku simbolik yang bersifat teknik, yaitu ketrampilan tanpa menghayati perilaku simbolik primer yang selain ketrampilan melibatkan juga perasaan. Justru unsur perasaan inilah — yang dalam bahasa juga tidak terkecualikan — merupakan unsur pengikat antaranggota masyarakat hanyalah dapat terjalin/terikat dengan penggunaan bahasa yang sama sebanyak mungkin. Setelah menguasai bahasa secara teknis dan trampil melalui pemanfaatannya setiap kali, unsur perasaan makin lama makin banyak terlibat. Karena bahasa dipergunakan dalam interaksi dengan orang lain dalam lingkungan, maka hal ini berarti bahwa melalui bahasa yang sama akan terpu-

puk dan terbina perasaan dan nilai-nilai yang sama-sama diagungkan, sehingga terjaminlah bukan saja komunikasi sosial, melainkan integrasi sosial dengan kesatuan suatu bangsa.

Selain itu masyarakat industri adalah masyarakat yang sibuk, kurang waktu. Oleh karena itu dalam proses komunikasi, apa yang dikomunikasikan hanyalah terbatas pada esensi dari apa yang dimaksudkan. Terjadilah proses yang lebih menitikberatkan komunikasi dengan sifat monokronik. Negara-negara berkembang yang menuju kepada industrialisasi, mengalami kesibukan ini pula. Dengan demikian dalam alam komunikasinya sifat monokronik makin lama makin menonjol dibandingkan dengan sifat komunikasi dalam alam budaya terdahulu yang lebih bersifat polikronik. Ditinjau dari segi kebudayaan, proses industrialisasi sebenarnya merupakan proses kemiskinan, sebagaimana tercermin dalam arti yang diberikan pada lambang-lambang yang dipergunakan, apalagi bila lambang-lambang tersebut diambil alih dari negara-negara industri yang lebih maju dalam teknologi daripada dirinya. Kesibukan ini pula yang mengakibatkan negara industri mengalami kemunduran budaya sehingga terjadilah masyarakat dengan sistem sinergi rendah.

Dewasa ini masyarakat berkembang masih berada dalam sistem sosial dengan sinergi tinggi, tetapi ancaman bahaya pergeseran ke sistem sinergi rendah hendaknya disadari. Kesibukan itu pulalah yang telah menyebabkan kurang adanya kerja sama dan pengalaman bersama dalam kehidupan sosial. Akibatnya, tentunya tercermin dalam komunikasi di negara-negara berkembang yang di samping mencerminkan sistem polikronik sudah mencerminkan pula adanya sistem monokronik, dan di samping sistem sosial sinergi tinggi mulai memperlihatkan juga gejala-gejala sinergi rendah. Hal itu merupakan pangkal jurang komunikasi dalam negara berkembang. Sehubungan dengan inilah maka peranan bahasa dan sastra makin meningkat yaitu bahasa dan sastra merupakan alat untuk meneruskan, menjamin kesinambungan sistem kebudayaan yang tinggi, sebagaimana tertuangkan dalam sistem sinergi tinggi dan polikronik tadi. Oleh karena itu bahasa dan sastra tidak saja merupakan pencerminan pasif nilai-nilai masa lampau, tetapi — melalui penggunaan dan penghidupannya kembali setiap saat — juga dapat mempertahankan kehidupan dan kelangsungan nilai-nilai yang digunakan, justru karena bahasa dan sastra merupakan sarana teknis dan wadah penuangan perasaan sekaligus. Kiranya ditinjau dari segi ini jelaslah mengapa penggunaan bahasa Indonesia setelah Sumpah Pemuda dan lima puluh tahun setelah itu, perlu lebih banyak ditingkatkan. Bahasa merupakan suatu sarana dan pencerminan keterikatan sosial dan kesatuan suatu bangsa. Melalui komunikasi, keterikatan sosial terse-

but dibina, dipupuk, dan ditingkatkan. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi budaya yang penting. Bahasa bukan saja menjelaskan kebudayaan pemakai bahasa tersebut tetapi juga membudayakan bahasa itu sendiri melalui penggunaannya.

## 5. Kesimpulan

Bahasa merupakan sarana ekspresi pengalaman, pikiran, dan perasaan manusia satu kepada manusia lain. Bahasa merupakan hasil abstraksi dari apa yang dialami dan dipelajari manusia yang merupakan pengalaman yang telah diolah secara intern dalam diri manusia. Sebelum mengkomunikasikan sesuatu, manusia telah mengadakan komunikasi dengan dirinya. Tahap komunikasi inilah yang memberi warna budaya yang dimiliki oleh komunikator, sebelum ia mengkomunikasikan sesuatu. Oleh karena itu bahasa selalu akan mencerminkan kebudayaan pemakai dan kelompok sosialnya. Apakah kebudayaan tersebut bersifat monokronik atau polikronik, bersifat sinergi rendah atau tinggi, semua itu akan tercermin dalam bahasa yang dipergunakan. Komunikasi antara kebudayaan yang monokronik dan kebudayaan yang polikronik, ataupun antara sistem sosial bersinergi rendah dan sistem sosial bersinergi tinggi, merupakan salah satu hambatan utama dalam komunikasi.

Negara berkembang sebagai negara yang sedang menuju industrialisasi, mengalami ancaman kemunduran kebudayaan yang tercerminkan dalam pergeseran sistem informasi polikronik menjadi sistem informasi monokronik, dan pergeseran sistem sosial dengan sinergi tinggi menjadi sistem sosial dengan sinergi rendah. Oleh karena itulah perlu diusahakan dipertahankannya sistem sosial sinergi tinggi tersebut melalui pengembangan dan penggunaan bahasa dan sastra bangsanya sebanyak mungkin. Melalui komunikasi diusahakanlah pemupukan nilai-nilai yang diagungkan melalui sistem kehidupan dengan sinergi tinggi maupun melalui komunikasi dengan sistem informasi polikronik yang telah menjadi milik bangsanya. Hal ini dilakukan antara lain melalui bahasa, yaitu bahasa sebagai sarana penyebaran nilai sosial budaya, ataupun sebagai pencerminan kebudayaan itu sendiri. Makin sering bahasa dipergunakan — tidak saja sebagai sarana penuangan perasaan — makin eratlah hubungan sosial antara pemakai bahasa yang sama. Dalam rangka inilah kita menyambut lima puluh tahun Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tersebut berbunyi sebagai berikut :

*Bertanah air satu, Tanah air Indonesia  
berbangsa satu, Bangsa Indonesia;  
berbahasa satu, Bahasa Indonesia !*



Semoga dalam lima puluh tahun mendatang bahasa Indonesia berkembang lebih pesat, lebih kaya sebagai sarana komunikasi sosial bangsa Indonesia, sehingga dengan demikian terjaminlah kesatuan bangsa Indonesia yang kekal abadi.

### DAFTAR BACAAN

- Berger, Peter L. dan Luckman, Thomas. 1967. *The Social Construction of Reality, a treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor Bocka, Garden City.
- Gross. Larry. 1975. *How true is television's image ?* dalam bahan UNESCO. "Getting the message across". An inquiry into successes and failures in of cross-cultural communication in the contemporary world. Unesco Press.
- Gilam. Stephen. 1966. "Time and tense in Spanish Epic pactry". H.24-33 dalam Edmund Carpenter dan Marschall McLuhan et. al *Exploration in Communication*. Boston: Beacon Press.
- Hall. Edward I. 1977. *Beyond Culture*. New York: Anchor Books, Garden City.
- Carpenter. Edmund dan McLuhan, Marschall. 1966. *Exploration in Communication*. Boston: Beacon Press.
- Lee. Dorathy. 1966. "Linguistic reflection of Wintu Thought". H.12-23 dalam Edmund Carpenter dan Marschall McLuhan et. al *Exploration in Communication*. Boston. Beacon Press.
- Perusen. C.A. Van. 1976. *Strategi Kebudayaan* (di-indonesiakan). Jakarta: BPK Gunung Mulia.

\*\*\*





## PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEMBINAAN BAHASA

### Harimurti Kridalaksana



1. Pembinaan bahasa sebagai suatu sistem pada hakikatnya adalah serangkaian tindakan yang menyebabkan masyarakat mentaati dan memakai kaidah bahasa. Beberapa di antara tindakan itu ialah:

- (1) pengambilan keputusan,
- (2) penyajian,
- (3) evaluasi, dan
- (4) pengukuhan.

Dalam pembinaan bahasa Indonesia dewasa ini yang lebih menjadi perhatian orang hanyalah ujud kaidah-kaidah bahasa, dan bagaimana agar kaidah itu dipakai masyarakat. Padahal ujud kaidah bahasa hanyalah *output* dari proses pengambilan keputusan, dan usaha agar kaidah bahasa dipakai masyarakat hanyalah satu komponen saja dari proses penyajian. Tidak adanya perhatian pada proses-proses lain dalam pembinaan bahasa menyebabkan pembinaan bahasa sampai sekarang tidak memberi hasil yang mantap. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini ialah kaidah-kaidah penyerapan bahasa asing yang telah dipunyai bahasa Indonesia sejak tahun 1950 (Kridalaksana, 1978: 49-68) sampai EYD diresmikan pada tahun 1972 jarang sekali dipergunakan orang, mungkin karena tidak tahu, mungkin tidak cukup disebarluaskan — yang pasti ialah aspek pembinaan bahasa lain seperti penyajian, evaluasi, dan pengukuhan tidak diperhatikan orang pada waktu itu. Akhir-akhir ini pun sudah mulai kita alami bahwa pemakai bahasa merasakan kaidah-kaidah tata bahasa agak mengambang. Misalnya, dalam suatu pertemuan dengan para ahli teknik listrik, penulis terkejut atas pernyataan mereka bahwa menurut penasihat bahasa panitia istilah listrik, bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk jamak; oleh sebab itu reduplikasi harus dihapuskan dari naskah istilah listrik. Ketika penulis menyatakan bahwa hal itu tidak seluruhnya benar, mereka bertanya apakah sekarang kaidah bahasa sudah berubah lagi? Penulis bertanya-tanya dalam hati: bagaimana hal ini terjadi?; apakah mereka dahulu tidak pernah belajar tata bahasa Indonesia di sekolah?; ataukah kita kurang mampu memberikan informasi yang memadai sehingga para ahli listrik itu salah mengerti?

Kesia-siaan semua usaha pengajaran bahasa dan pembinaan bahasa tidak mustahil akan kita alami pada waktu yang akan datang, bila kita mengabaikan aspek-aspek pembinaan bahasa seperti penyajian, evaluasi, dan pengukuhan.

Walaupun bukan tujuan karangan ini untuk membicarakan semua aspek pembinaan bahasa, namun pasti sulit diingkari bahwa di satu pihak antara pelbagai aspek itu ada kaitan yang tidak terelakkan, di pihak lain pembinaan bahasa itu sendiri berkaitan dengan aspek-aspek lain dalam pengembangan bahasa seperti penelitian, pendidikan ahli bahasa, dan penerbitan.

2. Aspek pembinaan bahasa yang akan dibicarakan dalam karangan ini ialah pengambilan keputusan. Aspek ini dipandang sebagai proses, karena pada hakikatnya aspek ini merupakan urutan tindakan yang terjadi karena ada *input* yakni masalah bahasa, dan menghasilkan *output* berupa rumusan kaidah bahasa untuk disebarluaskan ke tengah masyarakat. Dalam proses ini suatu masalah bahasa diusahakan untuk dipecahkan sehingga dihasilkan sejumlah alternatif terbatas, kemudian dipilih dan ditentukan salah satu di antaranya kemudian dilaksanakan, akhirnya dipakai dan ditaati oleh masyarakat.

Proses pengambilan keputusan tersebut sudah mencakup pengambilan keputusan dalam arti terbatas, yakni yang menyangkut pemecahan masalah bahasa, misalnya dalam usaha mencari kaidah penyerapan unsur asing, dan proses perumusan kebijaksanaan bahasa, yaitu proses pengambilan keputusan yang menghasilkan pemecahan atau keputusan yang membawa sanksi sosial, seperti penentuan format dan ragam surat suatu instansi yang harus dipakai oleh semua warga instansi itu.

Pengambilan keputusan diawali dari analisis masalah sehingga masalah dapat diidentifikasi secara pasti. Proses ini diikuti oleh analisis kondisi situasi untuk mengetahui faktor-faktor obyektif dan subyektif yang mempengaruhi keputusan, dan dapat dipakai untuk melihat ke depan sehingga kita dapat "meramalkan" apakah keputusan itu bermanfaat atau tidak. Proses ini diikuti oleh analisis potensi yang diperlukan agar semua sumber dapat diketahui dengan baik, baik yang tetap maupun yang berubah-ubah dan untuk menetapkan sarana yang diperlukan. Dengan mengetahui semua itu dapatlah kemudian dihasilkan keputusan yang realistik.

Proses itu diikuti oleh analisis alternatif untuk memilih satu di antara beberapa alternatif yang paling menguntungkan, sehingga bisa saja alternatif yang diambil ialah tidak mengambil keputusan.

Proses semacam itu melibatkan semua aspek pembinaan bahasa. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini ialah penyusunan kamus. Ada dua masalah yang harus dipecahkan dalam penyusunan kamus: (1) kamus yang bagaimana yang benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat dan (2) bagaimana sebaiknya menyusun kamus semacam itu. Masalah pertama dapat saja dipecahkan dengan menentukan bahwa kamus yang paling berguna adalah kamus ensiklopedia yang besar, tetapi pasti keputusan itu bukanlah keputusan nyata. Keputusan muluk-muluk tidak akan diambil bila dilakukan analisis kondisi situasi yang cukup dalam pengambilan keputusan. Masalah kedua dapat dipecahkan bila pengambilan keputusan dilakukan secara rasional. "Adakah cukup dana, keahlian, kemampuan mengelolanya, dan sebagainya?" Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis potensi sebagai tahap dalam pengambilan keputusan.

Urutan tindakan semacam itu berlaku dalam pengambilan keputusan kolektif maupun pengambilan keputusan individual. Dalam hubungan dengan yang terakhir itu memang pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari pemecahan masalah, yang lebih merupakan proses berpikir.

### BAGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

3. Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1976) pengambilan keputusan memerlukan kombinasi dari: intuisi, interpretasi, pengalaman, kewibawaan, dan wewenang. Faktor-faktor semacam itu pasti berlaku pula dalam pengambilan keputusan bidang bahasa. Kita dapat juga menambahkan faktor lain, yakni *wawasan dan kemampuan serta usaha untuk melihat jauh ke depan*.

Wawasan tentang bahasa sungguh mempengaruhi "bobot" *output* pengambilan keputusan. Dalam hal ini kita membedakan pembinaan bahasa berdasarkan wawasan tradisional yang hanya bertujuan agar orang dapat membedakan antara yang salah dan yang betul, dan pembinaan bahasa berdasarkan wawasan fungsional yang bertujuan bukan hanya agar orang dapat berbahasa secara betul, melainkan juga agar orang dapat berbahasa sesuai dengan maksud dan konteks bahasa.

Barangkali tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk melihat jauh ke depan karena hal itu diperoleh dari pengalaman dan belajar dari pengalaman. Namun bila dalam mengambil keputusan bahasa ada usaha untuk melihat ke depan dengan mempertimbangkan apa implikasinya, pastilah *output* pengambilan keputusan itu akan mantap sifatnya, dan tidak akan timbul keluhan masyarakat bahwa kaidah-kaidah bahasa selalu berubah.

Seperti halnya kemampuan melihat ke depan, faktor kewibawaan adalah faktor yang akan diperoleh pengambil keputusan dari pengalaman. Masalahnya dalam pembinaan bahasa dewasa ini, bagaimana kewibawaan dapat ditumbuhkan. Pada waktu-waktu yang lampau para pembina bahasa mempunyai kewibawaan karena pengalamannya. Dewasa ini pembinaan bahasa tidak dapat menunggu sampai generasi muda pembina bahasa mempunyai pengalaman. Satu-satunya jalan ialah melalui pendidikan bahasa; jadi kita harus mengusahakan agar sistem pendidikan bahasa sedemikian rupa sehingga para calon pembina bahasa mempunyai bekal pengetahuan, ilmu, dan ketrampilan yang cukup untuk tugas-tugas mereka nanti. Memang benar bahwa pendidikan bahasa di universitas bertujuan membentuk ahli-ahli bahasa atau pemimpin-pemimpin dalam bidang bahasa yang berperan di masyarakat; namun sebenarnya yang harus menjadi bekal mereka karena pengetahuan kita tentang kebutuhan masyarakat dalam bidang bahasa barulah atas dasar asumsi. Jelas bahwa pendidikan bahasa adalah masalah bersama yang harus dipecahkan oleh semua orang yang terlibat di dalamnya.

Faktor wewenang atau kekuasaan formal adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam masyarakat totaliter. Seperti yang kita lihat dalam perkembangan Academic Francaise di Prancis (Kridalaksana 1978: 35-8) sebagai contoh yang ekstrem, wewenang formal ini hanya mempunyai pengaruh jangka pendek atas *output* pengambilan keputusan. Dengan perkataan lain, keputusan dalam bidang bahasa hanya akan ditaati selama pengambil keputusan "berkuasa" secara formal. Memang wewenang tanpa bobot intrinsik yang obyektif tidak akan menghasilkan keputusan bahasa yang mempunyai kegunaan jangka panjang yang mantap.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut berkaitan dengan sifat-sifat yang menuntut pengambil keputusan, dan pada hakikatnya dengan syarat-syarat kepemimpinan ahli bahasa dalam bidangnya.

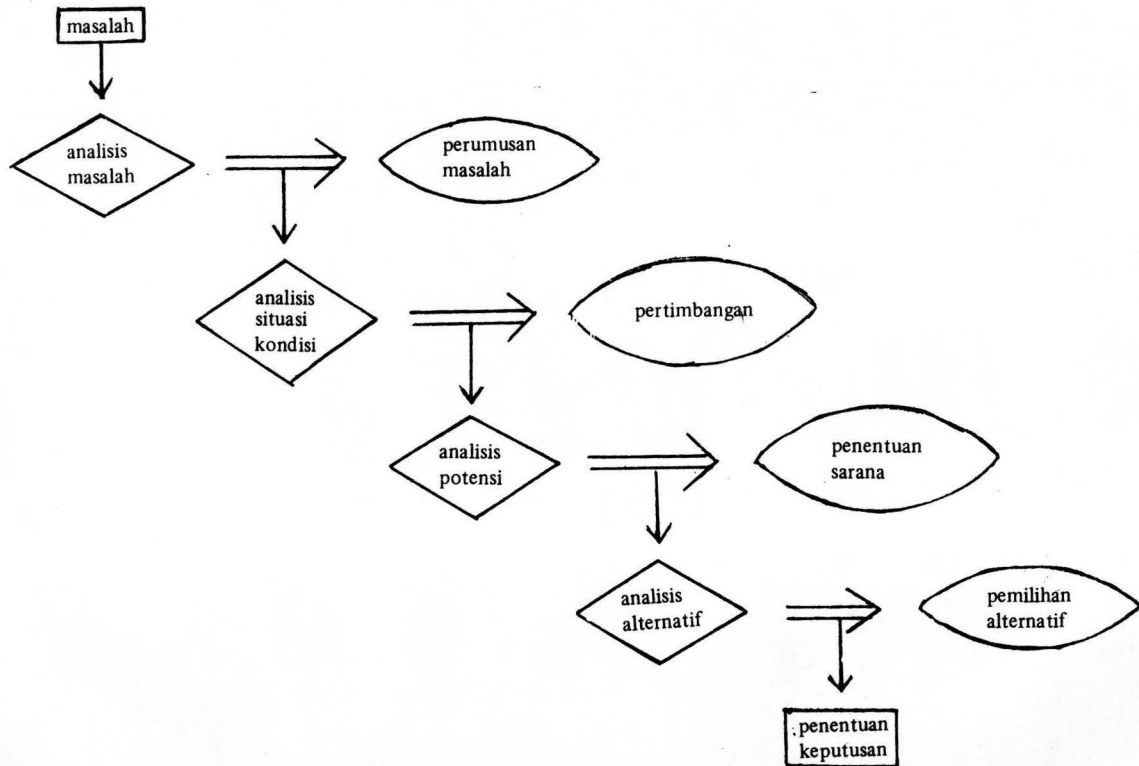
### **Karangan yang disebut**

"Decision Making" dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* jilid II. New York: Macmillan.

Harimurti Kridalaksana. 1978. *Fungsi Bahasa dan Sikap bahasa*.  
Ende: Nusa Indah.

Prajudi Atmosudirdjo. 1976. *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*. (tidak ada penertib)

## Bagan PENGAMBILAN KEPUTUSAN





# KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN SASTRA INDONESIA

Lukman Ali



## O. Pendahuluan

Dalam Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Nasional (sekarang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) bersama Proyek Pengembangan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 25-28 Pebruari 1975, telah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Politik Bahasa Nasional ialah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah

bahasa.<sup>1</sup> Politik Bahasa Nasional ini memberikan dasar bagi perencanaan serta pengembangan bahasa nasional dalam hubungannya dengan berbagai masalah, antara lain masalah pengembangan sastra nasional.

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan di sini adalah usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan tersebut tidak hanya menyangkut masalah-masalah bahasa belaka, tetapi juga masalah kesusastraan karena kesusastraan merupakan faktor penunjang pengembangan bahasa dan kebudayaan yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Jadi yang dimaksud dengan kebijaksanaan pengembangan sastra ialah kebijaksanaan untuk menentukan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan lain yang dapat dipakai sebagai dasar pengolahan keseluruhan masalah sastra.

## 1. Fungsi dan Kedudukan Pengembangan Sastra

Dalam hubungan perumusan di atas mungkin ada di antara kitayang bertanya apakah sastra memang hanya berfungsi sebagai alat penunjang saja bagi usaha pengembangan bahasa. Jadi bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri yang mempunyai otonomi sendiri. Menurut pendapat saya sastra itu jelas ti-



dak hanya berfungsi sebagai alat penunjang bagi usaha pengembangan bahasa saja. Ia mempunyai kedudukan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai salah satu kegiatan seni. Tetapi bila rumusan itu dilihat dari sudut usaha pengembangan bahasa, artinya sastra dilihat dalam perwujudannya berbentuk suatu komposisi seni dengan memakai bahasa sebagai alat, hal itu tentulah benar. Bahkan sebenarnya dapat ditambahkan bahwa antara keduanya terjalin hubungan saling menunjang. Perkembangan bahasa mempengaruhi perkembangan sastra, perkembangan sastra pada gilirannya mempengaruhi pula perkembangan bahasa.

## 2. Tujuan Pengembangan Sastra

Secara ringkas dapat dirumuskan bahwa tujuan pengembangan sastra mengandung tiga hal:

- a. meluaskan wilayah pembaca atau penikmat sastra dan menanamkan apresiasi sastra secara lebih mendalam;
- b. meningkatkan mutu hasil sastra; dan
- c. menggairahkan penciptaan sastra.

Sebenarnya hal yang tiga ini yang mungkin dapat diperluas lagi baru merupakan tujuan yang akan membuahkan hasil antara. Belum merupakan tujuan akhir. Bila tujuan akhir pengembangan bahasa adalah "tercapainya suatu kemampuan untuk mempergunakan bahasa Indonesia yang sebaik mungkin di kalangan masyarakat luas sebagai sarana komunikasi antarmanusia Indonesia,"<sup>3</sup> maka agaknya tidak berlebihan bila kita mencoba merumuskan pula tujuan akhir pengembangan sastra yaitu: "tercapainya suatu kemampuan mengapresiasi hasil-hasil sastra sebaik mungkin, sehingga sastra Indonesia dan daerah betul-betul dirasakan sebagai milik nasional dan bagian penting dari hidup berbudaya di Indonesia. Tujuan ini misalnya bisa dicapai antara lain dengan mengusahakan agar setiap anak Indonesia mengenal dengan baik sastra nasionalnya termasuk sastra daerah baik klasik maupun modern melalui kebijaksanaan pendidikan".<sup>4</sup> Usaha mengenalkan ini tentunya dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

## 3. Beberapa Catatan dalam Kehidupan Sastra Dewasa ini.

Sebuah pertanyaan penting telah disampaikan oleh Ajip Rosidi dalam Pra-seminar Politik Bahasa Nasional bulan Oktober 1974: " . . . . . bukankah kita memerlukan suatu politik pengembangan sastra nasional bersama-sama dengan suatu politik bahasa nasional yang jelas." <sup>5</sup> Pertanyaan ini tentulah

ada hubungannya dengan situasi kehidupan sastra sejak masa yang sudah-sudah sampai dewasa ini yang memperlihatkan ketidaktentuan dan bahkan kadang-kadang mencemaskan. Hal ini memang akan tampak jelas bagi kita bila kita ikuti pembicaraan-pembicaraan dalam ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, seminar-seminar, serta tulisan-tulisan yang dimuat dalam koran-koran dan majalah-majalah baik yang terbit di ibu kota maupun di daerah-daerah. Bergalaunya suara tentang masalah sastra ini tidak kalah ramainya dengan pembicaraan tentang masalah bahasa. Masih segar dalam ingatan kita tentunya pembicaraan yang timbul mengenai masalah konsepsi sastra bagi Lekra, Manifest Kebudayaan, dan lembaga-lembaga kebudayaan kepunyaan golongan-golongan sosial dan politik dalam masyarakat, masalah organisasi pengarang, masalah penciptaan, penerbitan, pengajaran sastra, dan sebagainya, sehingga pemerintah (Presiden) pernah perlu turun tangan dengan tegas untuk mengatasinya. Ingat kita sebagai contoh peristiwa pelarangan Manifest Kebudayaan yang diiringi oleh pelarangan buku-buku karya penanda tangan manifest tersebut.

Pada saat itu masalah bahasa agak tenang-tenang saja. Baru kemudian tahun 1966 memberikan kemungkinan kepada bahasa untuk muncul dengan ide penyempurnaan ejaan yang pada tahun-tahun berikutnya sempat menggerakkan dan melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat. Masalah ejaan ini baru berakhir dengan keluarnya keputusan Presiden pada tahun 1972.

Suatu hal yang dapat kita lihat dalam masalah pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra ini ialah bahwa unsur-unsur atau faktor-faktor di luar lingkungan bahasa dan sastra banyak tersangkut dan berperan terutama faktor-faktor sosial dan politik. Hal ini tentulah tidak perlu kita herani lagi sekarang ini. Bahasa sebagai alat komunikasi menyangkut semua kegiatan kehidupan kita sedangkan sastra menghubungkan kita secara mesra dengan segala aspek kehidupan kita dengan nilai-nilainya yang serbaneka yang pada saat-saat tertentu bisa atau malah dibisakan menimbulkan benturan-benturan sesuai dengan anutan paham, doktrin serta nilai yang serbaneka tadi.

Sementara itu kehidupan sastra berlangsung terus kehidupan penciptaannya, penerbitannya, pembacaan atau penikmatannya, penelaahannya, pengajarannya dengan segala onak durinya. Berbagai keluhan dan pemikiran sebagai tanda ketakpuasan muncul. Orang berbicara tentang kurangnya minat baca dalam masyarakat, kurangnya apresiasi, apakah sastra Indonesia dibaca oleh para pejabat atau pemimpin, guru, dosen, mahasiswa, pelajar, pedagang, pegawai, dan sebagainya kurangnya media untuk sastra, kurangnya kritik

sastra yang baik dan berwibawa, adanya jurang antara guru dan pelajar dengan sastrawan, sukarnya guru-guru memperoleh buku-buku sastra, bingungnya guru-guru dengan masalah angkatan dalam sastra, kurikulum pelajaran sastra yang belum memuaskan, pelajaran sastra yang bertitik berat kepada hafalan teori dan kesejarahan, kenapa sastra terpencil, kenapa sastrawan lari ke majalah hiburan, benarkah sastrawan kurang membaca, apakah organisasi sastrawan perlu atau tidak, apakah novel masih diperlukan di negeri ini, apakah sebabnya timbul pengadilan sastra, apakah yang dinamakan sastra kontemporer itu dan bagaimana penerimaan kehadirannya, masalah karya sastra remaja yang cengeng, dan sebagainya.

Keluhan tentu tidak selamanya bersifat negatif. Sejumlah sastrawan di beberapa kota mengambil prakarsa mengadakan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi, ceramah-ceramah, mengenai bagaimana usaha menghidupkan kesusasteraan misalnya seperti yang dilakukan di Yogya, Semarang, Bandung dan Padang. Dibicarakan misalnya bagaimana memasyarakatkan sastra (Darmanto Jt. misalnya mengusulkan memakai cara "coca cola"), menghilangkan keterpencilannya dari masyarakat, mengenai perlunya diperbanyak ruang sastra di koran-koran dan majalah-majalah, perlunya dikembangkan apresiasi di kalangan pelajar, dan sebagainya.

Jika diperhatikan sebetulnya pembicaraan tentang sastra yang termuat dalam koran-koran dan majalah-majalah, atau yang diucapkan dalam berbagai pertemuan yang isinya antara lain seperti hal-hal tersebut di atas, jumlahnya memang tidak dapat dikatakan kecil. Sebagai contoh dapat kita lihat *Clippings*, yaitu suatu terbitan hasil fotokopi guntingan koran terbitan "Clippings Service Agency", Jakarta, khusus berisi artikel bahasa dan sastra yang memuat tiap bulan puluhan tulisan. Terbitan bulan Januari 1975 umpamanya memuat 8 artikel tentang bahasa Indonesia, 2 artikel tentang bahasa daerah, 2 artikel tentang bahasa asing, dan . . . . . 52 artikel tentang sastra Indonesia. Artikel ini dikumpulkan dari sejumlah koran yang terbit di ibu kota dan daerah: *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Berita Yudha*, *Suara Karya*, *Berita Buana*, *Pelita*, *Angkatan Bersenjata*, *Indonesia Times*, *Suara Minggu*, *Sinar Pagi*, dan *Pikiran Rakyat*. Dalam terbitan bulan Juli 1975, dimuat 10 artikel tentang bahasa Indonesia, 4 artikel tentang bahasa daerah, dan . . . 87 artikel tentang sastra Indonesia yang digunting dari *Kompas*, *Sinar Harapan*, *Pelita*, *Berita Buana*, *Berita Yudha*, *Suara Karya*, *Tribun*, *Pos Sore*, *Angkatan Bersenjata*, *Haluhan*, *Waspada* dan *Pikiran Rakyat*. Jelas itu belum dari semua koran. Yang dalam majalah belum pula terhitung.

Dari data yang tentunya belum lengkap ini dapatlah diambil kesimpulan sementara bahwa pembicaraan tentang masalah sastra secara kuantitatif lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pembicaraan tentang masalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Yang agak menarik juga dalam artikel-artikel tentang sastra tersebut ialah adanya usaha menelaah kehidupan sastra Indonesia dari segi sosiologi, dalam hal ini sosiologi sastra, dengan mencoba mengupas beberapa pokok mengenai bagaimana interaksi dan interrelasi antara unsur-unsur masyarakat sastra Indonesia (pencipta, peneliti dan penikmat), soal pengaruh keadaan sosial pada sastranya dan pengaruh sastra itu sendiri bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Penelitian semacam ini memang perlu dilakukan dalam usaha kita memahami peristiwa-peristiwa kehidupan sastra kita, dalam rangka mencari langkah-langkah kebijaksanaan pengembangan sastra agar ia dapat memberikan manfaatnya kepada masyarakat.

Jadi pertanyaan Ajip tadi tentulah harus dijawab dengan "memang" mengingat bahwa sastra Indonesia memang perlu dikembangkan sesuai dengan tujuan pengembangan seperti tersebut terdahulu. Dapat ditambahkan bahwa bila tujuan akhir tersebut tercapai itu berarti bahwa sastra akan memenuhi fungsinya yang utama yaitu mendorong kita untuk lebih memahami, mencintai dan membina kehidupan dengan lebih baik. Maka dalam hubungan ini tanpa mengaitkannya secara latah dengan pembangunan kita dewasa ini sesungguhnya sastra bukanlah tidak besar peranannya dalam usaha pembangunan dalam bidang kebudayaan. Dengan sastra sebagai salah satu jalan, kita akan dapat lebih mengarifi dan memesrai kehidupan serta mendorong kita untuk lebih bijaksana menghadapi dan membinanya.

#### **4. Masalah Pengembangan Sastra**

##### **4.1 Beberapa Masalah Sastra**

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dalam peristiwa kehidupan sastra sebagaimana dikemukakan tadi pada angka 3, kita dapat menyimpulkan:

- a. apresiasi sastra dalam masyarakat masih tetap dianggap sangat terbatas;
- b. penelitian sastra yang menunjang pengembangan sastra masih belum meluas dan memadai hasilnya;
- c. penerbitan buku-buku sastra masih tetap kecil jumlahnya, baik jumlah naskah yang dicetak maupun jumlah eksemplarnya;
- d. penerbitan hasil-hasil penelitian masih sangat kurang; dan
- e. pengajaran dan pelajaran sastra masih perlu ditingkatkan mutunya.

Dalam tulisan ini tidak dibicarakan satu demi satu masalah tersebut di atas. Hanya secara umum dapat dicatat di sini pendapat dalam hubungan masalah bahwa bila kebanyakan orang Indonesia masih lebih bangga berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia dalam situasi yang menghendaki berbahasa dengan baik — terutama dalam kalangan pejabat — maka dalam bidang sastra saya kira kita lebih baik sangsi lebih dahulu, apakah pejabat-pejabat itu pernah membaca hasil sastra Indonesia. Jangan tanya dahulu koleksinya dalam rak buku mereka. Sedang bahasa Indonesia saja yang jelas mempunyai guna praktis sebagai alat komunikasi sehari-hari, masih dianggap sepele, apalagi membaca sastra yang dianggap hasil orang "bermenung-menung" itu. Tetapi ini barulah sebuah asumsi yang mungkin amat naif yang dapat disimpulkan dari pembicaraan-pembicaraan antara sesama sastrawan. Bagi kita tentulah ideal bila ada seorang menteri umpamanya membicarakan *Pada Sebuah Kapal* Nh. Dini, seorang jenderal mengasyiki *Rojan Revolusi* Ramadhan KH, seorang direktur utama menikmati *Telegram* Putuwidjaja, seorang sopir taksi membaca *Horison*, atau seorang pegawai bea cukai membaca *Ziarah* Iwan Simatupang.

Kejelasan mengenai adanya dan seberapa luas dan dalam kadar apresiasi sastra dalam kelompok-kelompok masyarakat serta sebab-sebab tidak bisa atau tidak mau meluasnya apresiasi tersebut, tentulah akan dapat diketahui dengan adanya penelitian, dalam hal ini penelitian secara sosiologi sastra.

Masalah kritik sastra masih tetap "kritik" kelihatan. Antara sesama sastrawan saling memberikan kritik yang ada kalanya menimbulkan saling tak senang atau saling menyenangkan. Tergantung kepada kondisi. Kritikus katanya membuat kritik demikian pula. Malah lebih banyak menimbulkan ketaksetiaan. Hal ini wajar saja. Antara lain ini disebabkan karena kurang disadari-nya perbedaan tempat kedua wilayah itu — wilayah penciptaan dan wilayah penelitian — yang mempunyai dunianya sendiri-sendiri, tetapi dalam usaha pengembangan sastra keduanya saling menentang, ditambah lagi dengan wilayah ketiga yaitu wilayah para penikmat atau konsumen sastra yang dapat mengambil manfaat dari interaksi antara kedua wilayah terdahulu.

Demikian pula keadaannya masalah pengajaran sastra dan penerbitan hasil sastra.

#### 4.2 Pengembangan Sastra sebagai Suatu Sistem

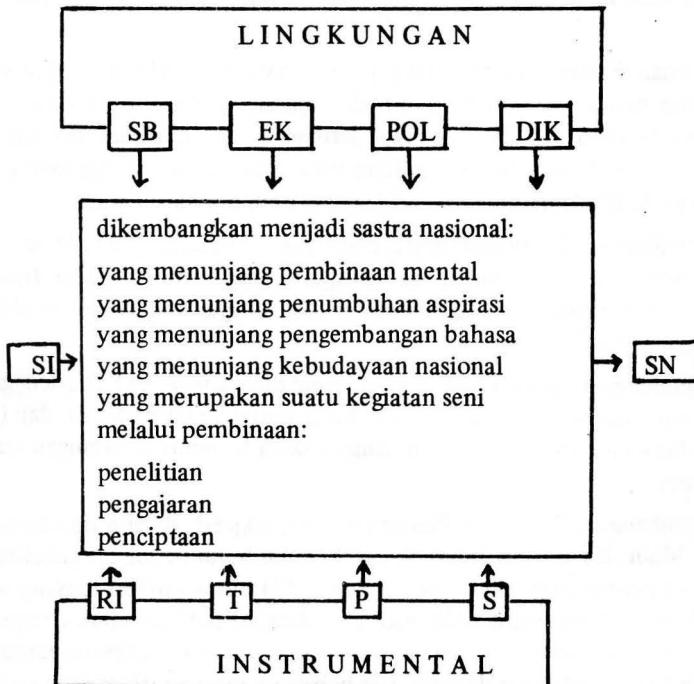
Seperti juga dengan masalah bahasa maka masalah pengembangan sastra menyangkut beberapa komponen yang saling berhubungan, yaitu:

- a. sastra yang dikembangkan;

- b. proses pengembangan;
- c. instrumental pengembangan; dan
- d. lingkungan pengembangan.<sup>7</sup>

Komponen *a* meliputi bidang penciptaan, penelitian (teori, kritik, sejarah, perbandingan, dan sosiologi sastra) dan pengajaran. Komponen *b* menyangkut sasaran-sasaran pengarah proses, misalnya sastra yang dikembangkan itu hendaklah sastra yang dapat menunjang pembinaan mental, membina apresiasi, mencintai kehidupan, memperkaya batin, menunjang pengembangan bahasa, membina persatuan dalam arti saling pengertian antara sesama, serta menjadi bagian yang mutlak dalam pembinaan kebudayaan. Komponen *c* menyangkut rencana induk pengembangan, tenaga pengembang, penerbitan, hak cipta, perpustakaan, pengelolaan pengembangan, fasilitas dana dan peralatan. Komponen *d* menyangkut lingkungan sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan yang mempengaruhi usaha pengembangan sastra itu.

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dibayangkan sistem pengembangan sastra nasional sebagai berikut:



SI	=	Sastra Indonesia	DIK	=	Pendidikan
SN	=	Sastra Nasional	RI	=	Rencana Induk
SB	=	Sosial Budaya	T	=	Tenaga
EK	=	Ekonomi	P	=	Pengelolaan (Manajemen)
POL	=	Politik	S	=	Sarana

## 5. Pemecahan Masalah dan Program Pengembangan

Untuk memecahkan masalah-masalah sastra dalam rangka mencapai tujuan pengembangan, maka sejalan dengan program-program di bidang bahasa seperti yang sudah dimasukkan dalam Repelita II, program-program pengembangan sastra telah tersusun berupa sejumlah kegiatan sebagai berikut:

- a. **Penelitian Sastra Indonesia.** Hasil yang diharapkan adalah: (1) data dan deskripsi tentang sastra Indonesia (teori, kritik, sejarah, perbandingan, dan sosiologi sastra) di Jawa dan di luar Jawa, termasuk yang berhubungan dengan pengajaran, dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga tentang sastra Indonesia yang perlu diselamatkan, dikembangkan atau disebarluaskan.
- b. **Penelitian Sastra Daerah.** Hasil yang diharapkan: (1) data dan esripsi tentang sastra daerah (teori, kritik, sejarah, perbandingan dan sosiologi sastra) di Jawa dan di luar Jawa, termasuk yang bertalian dengan pengajaran, dan (2) data tentang tulisan-tulisan berharga tentang sastra daerah yang perlu diselamatkan, dikembangkan, atau disebarluaskan.
- c. **Pengembangan Sastra Indonesia.** Hasil yang diharapkan: (1) terselenggaranya beberapa kali seminar dan sanggar kerja tentang sastra Indonesia, dan (2) tersebarluasnya hasil seminar dan sanggar kerja tersebut di kalangan masyarakat luas.
- d. **Pengembangan Sastra Daerah.** Hasil yang diharapkan: (1) terselenggaranya beberapa kali seminar dan sanggar kerja tentang sastra daerah, dan (2) tersebarluasnya hasil seminar dan sanggar kerja tersebut di kalangan masyarakat luas.
- e. **Pengembangan, Penulisan, Penterjemahan, Majalah Bahasa dan Sastra, dan Penerbitan.** Hasil yang diharapkan: (1) buku-buku pedoman penelitian sastra dan penyusunan istilah-istilah sastra, (2) buku sumber tentang sejarah, kritik, dan teori sastra Indonesia dan daerah, (3) buku-buku terjemahan sastra daerah dan asing yang bermutu dan buku-buku referensi tentang sastra ke dalam bahasa Indonesia, (4) beberapa monografi tentang sastra, (5)

majalah ilmiah tentang bahasa dan sastra dan majalah pengajaran bahasa dan sastra, (6) tersebarluasnya hasil penerbitan tersebut dikalangan masyarakat.

- f. **Pengembangan Pusat Informasi Kebahasaan** (termasuk sastra). Hasil yang diharapkan dalam bidang sastra ialah terkumpulnya data atau informasi tentang sastra Indonesia dan daerah secara lengkap.
- g. **Pengembangan Ketenagaan Teknis**. Hasil yang diharapkan adalah tersedianya tenaga-tenaga yang terlatih dalam bidang penelitian dan pengembangan sastra melalui penataran-penataran di dalam dan di luar negeri.

Semua jenis kegiatan di atas dalam pelaksanaannya dituangkan dalam satuan-satuan kegiatan yang ditangani oleh kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari tenaga-tenaga berbagai lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, sastrawan dan tenaga-tenaga dari Pusat Bahasa sendiri.<sup>8</sup>

Itulah baru yang dapat direncanakan dan sedang dilaksanakan oleh Pusat Bahasa sebagai penanggung jawab yang ditampung oleh dua proyek: (1) *Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah*, dan (2) *Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah*.

Jelas, bahwa usaha pengembangan sastra tersebut belumlah merupakan usaha yang sudah lengkap. Masih banyak usaha dan kegiatan lain yang bisa ditambahkan lagi ke dalamnya. Masih perlu dipikirkan usaha apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan kemampuan sastra dalam mutu penciptaannya. Tetapi sebagai langkah pertama yang sudah berhasil masuk ke dalam Repelita II, diharapkan usaha-usaha itu dapat bermanfaat bagi pengembangan sastra kita.

Di samping kegiatan-kegiatan yang ditampung oleh kedua proyek tersebut usaha-usaha pengembangan lainnya bukannya tidak ada, baik itu dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri maupun oleh badan-badan nonpemerintah. Departemen misalnya pernah memberikan Anugerah Seni tahunan dan piagam Satyalencana Kebudayaan. Balai Pustaka dahulunya juga pernah memberikan hadiah-hadiah sastra. Majalah-majalah *Kisah*, *Sastra*, *Horison*, *Basis*, Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional, Yayasan Yamin, Ikapi, dan lain-lain pernah pula memberikan hadiah-hadiah sastra. Penghargaan Piagam Ambri untuk sastrawan daerah (Sunda) pernah pula dilaksanakan oleh Paguyuban Pengarang Sastra Sunda dan oleh Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda. Dewan Kesenian Jakarta dan Yayasan Indonesia menampilkan kegiatannya dalam ceramah-ceramah, diskusi-diskusi, pembacaan sajak dan pertemuan sastra lainnya. Akademi Jakarta mulai pula memberikan penghargaannya berupa hadiah uang dua juta rupiah dan piagam.



Sayembara-sayembara mengarang (novel, cerita pendek, drama) tak kurang peranannya dalam penggalakan penciptaan seperti yang dilakukan misalnya oleh Dewan Kesenian, Ikapi, dan Panitia Tahun Buku Internasional.

Bersama dengan beberapa direktorat dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak lama telah diadakan kerja sama dengan Pusat Bahasa dalam bidang penyusunan kurikulum dan penulisan buku-buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, penataran-penataran guru-guru bahasa dan sastra Indonesia yang pengelolaannya dilaksanakan oleh direktorat yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Pemesanan buku-buku sastra di samping nonsastra melalui Proyek Pengadaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, dan Proyek Pengadaan Buku Kanak-kanak/Remaja, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya amat besar sumbangannya dalam usaha permulaan pembinaan apresiasi sastra bagi anak-anak, di samping juga telah ikut mengembangkan suatu komponen yang menyangkut penerbitan buku-buku sastra.

Akhirnya penulis ini berharap agar suatu kerangka kebijaksanaan pengembangan sastra yang lebih terperinci dan lengkap dengan mempertimbangkan semua komponen pengembangan, akan dapat hendaknya dirumuskan dengan lebih jelas. Tulisan ini tidak lebih sebuah usaha kecil yang dimaksudkan untuk dapat menggugah para pembaca untuk turut memikirkan dan merumuskan kebijaksanaan tersebut.

#### Catatan

1. Lembaga Bahasa Nasional, *Politik Bahasa Nasional*; Laporan Seminar, 25-28 Februari 1975, Jakarta, 1975, hal. 172.
2. *Ibid.* hal. 176-177.
3. Departemen Penerangan R.I., *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua 1974/1975 - 1978/1979*, Jilid III, hal 230.
4. Ajip Rosidi, "Politik Bahasa Nasional dan Pengembangan Kesusastraan". Dalam *Politik Bahasa Nasional*; Laporan Praseminar 29-31 Oktober 1974, Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta, hal. 4.
5. *Ibid.* hal. 3.
6. Yakob Sumarjo, "Sosiologi Sastra Indonesia (1)". Dalam *Harian Pikiran Rakyat*, Bandung, 13 Februari 1975. Tulisan ini dimuat secara bersambung dalam nomor-nomor selanjutnya harian tersebut.
7. Lihat juga pembagian yang dibuat oleh S. Effendi dalam kertas kerjanya, "Lembaga Bahasa Nasional dan Pengembangan Bahasa". Dalam : *Politik Bahasa Nasional*; Laporan Praseminar 29-31 Oktober 1974, Lembaga Bahasa Nasional, Jakarta, hal. 1.
8. Khusus mengenai penataran tenaga ahli ini Pusat Bahasa telah merencanakan lima jenis penataran selama Repelita II:  
1974 Penataran Leksikografi  
1975 Penataran Sociolinguistik

1976 Penataran Dialektologi

1977 Penataran Sastra

1987 Penataran Penterjemahan

Setiap penataran diikuti oleh dosen-dosen dan tenaga-tenaga ahli bahasa dan sastra yang dipilih dari seluruh Indonesia dan masing-masing penataran berjalan selama dua bulan.

9. Lihat selanjutnya kertas kerja S. Effendi "Lembaga Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia", dalam Seminar Masalah Pembinaan Bahasa Indonesia di Universitas, Jakarta, 1973.

## BACAAN

1. Ali, Lukman (ed.). 1967 *Bahasa dan Kesusastraan Indonesia Sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung.
2. Buku *Pedoman Pengajaran Kesusastraan Indonesia* 1965. Djakarta, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
3. Brown, K. & Sterling P. Olmsted 1962 *Language and Literature*. New York: Harcourt, Brace & World.
4. Harun, Ishak, 1974. "Ke Arah Pembentukan Satu Strateji untuk Menyuburkan Perkembangan Kesusastraan Nasional Kita". Kertas kerja dalam Seminar "Hari Sastra" di Kuching, Serawak, 1-5 Agustus 1974.
5. Jassin, H.B. 1975. *Sastra Indonesia Sebagai Warga Sastra Dunia*. Pidato penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Juni 1975. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia Yayasan 23 Januari 1942, 1975.
6. Kridalaksana, Harimurti dan Djoko Kentjono (e.). 1971. *Seminar Bahasa Indonesia 1968*. Ende: Nusa Indah.
7. *Petunjuk Penelitian Bahasa dan Sastra* 1975. Buku II; Laporan Sanggar kerja Penelitian Bahasa dan Sastra 27-31 Maret 1975. Jakarta: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
8. *Politik Bahasa Nasional* Laporan Praseminar 29-31 Oktober 1974, Lembaga Bahasa Nasional, t.t.
9. *Politik Bahasa Nasional*, 1975. Laporan Seminar 25-28 Februari 1975. Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional.
10. *Seminar Kesusastraan Nusantara 1973-1974*. Kumpulan kertas kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
11. "Tentang Kritik Sastra." 1970. *Majalah Bahasa dan Kesusastraan*, Lembaga Bahasa Nasional, Seri Khusus, No. 4, 1970.
12. Wellek, Rene & Austin Warren 1966. *Theory of Literature*. London: Penguin Books.

\*\*\*



## DOKUMENTASI KESUSASTRAAN INDONESIA

### Sebuah Perkenalan Umum

H.B. Jassin



Tidak dapat disangkal bahwa Balai Pustaka yang didirikan tahun 1908 mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan kesusastraan Indonesia. Di sinilah lahirnya Angkatan 20-an dengan terbitnya roman *Siti Nurbaya* yang dianggap sebagai roman pertama yang memenuhi syarat yang baik dan merupakan roman modern klasik kita yang pertama.

Di sini pula terbitnya roman-roman besar lain seperti *Hulubalang Raja*, *Salah Asuhan*, *Layar Terkembang*, *Atheis*, *Tembara*, dan *Mereka yang Dilumpuhkan*.

Pengarang-pengarang terkemuka Pujangga Baru dan Angkatan 45 ada yang pernah bekerja di Balai Pustaka untuk beberapa waktu, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane, Sanusi Pane, H.B. Jassin, Indrus, Akhdiat K. Miharja, Utuy Tatang Sontani, dan Pramoedya Ananta Toer. Hal ini jelas merupakan satu pembaharuan periode Pujangga Baru dengan majalahnya yang bernama serupa, terbit tahun 1933, bukan saja di lapangan sastra tetapi juga di lapangan pemikiran kebudayaan pada umumnya. Munculnya Pujangga Baru tidak berlangsung diam-diam tetapi disertai polemik mengenai pembaharuan yang dibawahnya dalam bahasa, sastra, dan konsepsi kebudayaan. Polemik itu berlangsung antara tokoh-tokoh Pujangga Baru dan barisan guru-guru kolot serta kebudayaan-kebudayaan yang berpijak pada tradisi lama.

Pemerintah Jepang yang mencoba membunuh semangat Pujangga Baru, sebaliknya justru melahirkan Chairil Anwar yang lebih revolusioner dalam sikap dan tanggapan hidupnya dan muncullah Angkatan 45 sesudah Indonesia merdeka.

Kebudayaan kita mengenal atau pernah melihat buku kecil *Surat Keperayaan Gelanggang Seniman Merdeka* yang bertahun 1950 dan juga mengetahui pembukaan ruangan Gelanggang dalam warta sepekan *Siasat* tahun 1948, tetapi sedikit yang mengetahui bahwa Perkumpulan Gelanggang telah

didirikan tahun 1946. Usaha-usahanya ialah mengadakan pameran-pameran seni lukis dan kemudian menerbitkan majalah *Gema Suasana*. Dari perkumpulan inilah sebenarnya bermula apa yang disebut Angkatan 45 dalam sastra dengan Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin sebagai tokoh utamanya.

Lahirnya Angkatan 45 pun menimbulkan polemik. Ada atau tidak Angkatan 45, apa cita-citanya, mana orang-orangnya, dan mana karya-karyanya? Apa bedanya dengan Pujangga Baru? Maka Menulislah Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, Achdiat K. Miharja, Anas Ma'ruf, dan bertambah seru lagi perdebatan tatkala orang-orang Lekra mulai tampil ke depan.

Dalam tahun 1950 Lekra didirikan sebagai organisasi kebudayaan yang juga bergerak di lapangan sastra. Di lapangan kesenian ia membawa realisme sosialis yang kemudian dipertegas dengan semboyan "Politik adalah Panglima". Karena konsepsinya ini Lekra berhadapan dengan seniman merdeka yang berkumpul dalam Gelanggang yang mementingkan nilai dan membawa konsepsi humanisme universal. Tokoh-tokoh Lekra ialah A.S. Dharta alias Klara Akustia, Jubaar Ajub, Bakri Siregar dan kemudian juga Rivai Apin dan Pramodya Anata Toer. Pertarungan antara kedua golongan ini meningkat dari tahun ke tahun sampai teretusnya Manifest Kebudayaan pada tahun 1963.

Apabila antara tahun 1950 dan tahun 1960 perdebatan masih berlaku dalam batas-batas kesopanan, maka sesudah pidato Presiden Sukarno tahun 1959 pihak Lekra-PKI mendapat angin di lautan melemparkan serangan-serangan yang kasar terhadap lawan-lawannya. Pendidikan akan diselewengkan dari Pancasila dan diciptakan Pancacinta yang menggegerkan golongan agama dan guru-guru yang sadar akan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Hamka yang berpengaruh besar di kalangan Islam dan pernah mengecam cara-cara komunis yang tidak jujur, diserang dan diciptakan *isu* plagiat *Tenggelamnya Kapal van der Wijck*. Ia difitnah hendak meruntuhkan pemerintahan Sukarno hingga dijebloskan dalam tahanan.

Lalu menyusul isu penolakan hadiah sastra tahun 1962 dan pengganyangan film Amerika.

Sadar akan bahaya yang mengancam kebudayaan dan sendi-sendi negara yang berdasarkan Pancasila, maka para cendekiawan, pengarang, dan seniman, mencetuskan Manifest Kebudayaan dan menghimpun para pengarang dan kebudayaan dari seluruh tanah air dalam suatu konferensi yang disebut Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia disingkat KKPI.

Ini adalah satu perlawanan total dan frontal dari golongan kebudayaan dan dalam usahanya untuk mematahkan perlawanan ini pihak Lekra/PKI

berhasil melalui menteri Kiri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Profesor Prijono mendesak Presiden Sukarno untuk melarang Manifest Kebudayaan dengan dalih membahayakan jalannya revolusi.

Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa kata hati nurani bangsa tidak dapat didiamkan, kezaliman tidak dapat berjalan lama. Dengan meletusnya G 30 S/PKI tanggal 30 September tahun 1965, bangkitlah rakyat yang telah bertahun-tahun diteror sebelumnya lahir batin dan timbul angkatan baru, Angkatan 66.

Angkatan 66 tampil dalam demonstrasi-demonstrasi beberapa bulan sesudah meletusnya Gerakan 30 September atau Gestapu yang didalangi oleh PKI. Di tengah-tengah keriuhan tuntutan mahasiswa dan pelajar, terdengarlah suara penyair yang mengundang hati nurani rakyat.

Seperti juga Angkatan Pujangga Baru dan Angkatan 45, pun Angkatan 66 tidak sekaligus diterima kehadirannya oleh semua golongan. Meskipun diakui adanya Angkatan 66 dalam masyarakat, sebagian orang meragukan adanya dalam sastra, sebab apakah kriteria sastra yang dapat dipakaikan padanya? Maka ramailah polemik dan kontra setelah tulisan H.B. Jassin dalam majalah *Horison* bulan Agustus 1966, memproklamasikan bangkitnya suatu generasi baru dalam sastra.

Setuju atau tidak setuju orang telah mempermasalahkannya dan pengarang-pengarang angkatan baru ini terus membuktikan adanya dengan karya-karyanya. Tulisan-tulisan mereka memenuhi majalah-majalah baru *Horison*, *Sastra* (lanjutan), *Cerpen*, *Gelombang*, *Budaya Jaya*, surat-surat kabar. Pun telah ada hasil karya mereka yang terbit sebagai buku, distensil atau dicetak. Sebuah antologi khusus *Angkatan 66 Prosa dan Puisi* memperkenalkan hasil-hasil mereka, disertai sekedar riwayat hidup dan keterangan mengenai kegiatannya di lapangan penciptaan.

\* \* \*

beim ersten Anblick der beiden in der Mitte des Bildes stehenden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, ist es, wie man sieht, ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden.

Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden. Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden.

Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden. Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden.

Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden. Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden.

Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden. Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden.

Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden. Die beiden Personen, die sich in der Mitte des Bildes befinden, sind ein Mann und eine Frau, die sich in der Mitte des Bildes befinden, und die sich in der Mitte des Bildes befinden.

## **BEBERAPA MASALAH PRASARANA SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**

**Maman Sumantri**



### **Pendahuluan**

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 tahun 1975 pasal 949 dan 950 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan sebagian dari tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai fungsi:

- a. meneliti bahasa Indonesia dan daerah;
- b. meneliti sastra Indonesia dan sastra daerah;
- c. meneliti pengajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, serta sastra Indonesia dan sastra daerah;
- d. meneliti dan menyusun perkamusan dan peristilahan bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- e. mengendalikan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra; dan
- f. menelaah hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra.

Dari pengalaman selama tiga tahun sejak tahun 1975 hingga sekarang (1978) melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terdapat beberapa masalah prasarana yang perlu mendapat perhatian serta penanggulangan secara berencana dan terarah, karena masalah-masalah itu menyangkut prasarana dan sarana yang secara fundamental sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran segala program kegiatan teknis yang tercermin di dalam tugas dan fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti tersebut di atas.



Menurut ruang lingkupnya masalah-masalah termaksud dapatlah dikelompokkan menjadi empat masalah pokok, yaitu: (1) masalah penyempurnaan organisasi dan pengelolaan, (2) masalah peningkatan jumlah, jenis, dan mutu tenaga kepegawaian, (3) masalah pengadaan dan pemanfaatan prasarana fisik gedung dan perlengkapan, dan (4) masalah pengadaan dan peningkatan dana.

Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan secara singkat data permasalahan. Mudah-mudahan uraian singkat di bawah ini akan merupakan bahan informasi yang berguna terutama bagi para pejabat pengambil keputusan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berwewenang menetapkan kebijaksanaan di dalam penanggulangan masalah-masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1. Masalah Penyempurnaan Organisasi dan Pengelolaan**

Susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975 pasal 951, yaitu terdiri atas: Bagian Tata Usaha dengan tiga Subbagian (Urusan Dalam, Kepegawaian, dan Keuangan), Bidang Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah, Bidang Sastra Indonesia dan Sastra Daerah, Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dan Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra. Selanjutnya menurut pasal 965 keputusan yang sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tiga instalasi sebagai unit pelaksana penelitian bahasa dan sastra di daerah, yaitu Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, Balai Penelitian Bahasa di Singaraja (Bali), dan Balai Penelitian Bahasa di Ujungpandang.

Dari pengalaman tiga tahun melaksanakan susunan organisasi seperti tersebut di atas ada tiga persoalan pokok yang patut mendapat perhatian untuk segera diatasi, yaitu: masalah Bidang Pengembangan yang terlalu sarat beban tugasnya sehingga sudah tidak seimbang lagi dengan beban tugas bidang-bidang sesamanya yang lain, masalah Balai Penelitian Bahasa sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang dianggap eksistensinya belum mantap, dan masalah peningkatan pengelolaan berdasarkan asas-asas manajemen.

### **1.1. Masalah Bidang Pengembangan**

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975 pasal 963 Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas mengadakan usaha pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, pengembangan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing, serta pengadaan perpustakaan sebagai sarana pengembangan. Menurut

kenyataannya sekarang, Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra ini juga dibebani tugas membina dan mengembangkan laboratorium penelitian bahasa (fonetik) sebagai sarana peningkatan mutu penelitian dan pengembangan kebahasaan.

Mengingat besarnya beban tugas dan luasnya ruang lingkup tugas Bidang Pengembangan seperti tersebut di atas, untuk meningkatkan intensitas kerja serta melaksanakan pemerataan tugas yang seimbang, seyogianya Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra yang sekarang ini perlu dipecah menjadi dua bidang baru sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengembangan yaitu (1) Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra (gaya baru) dan (2) Bidang Pengembangan Pengajaran Bahasa Asing; di samping dua instalasi sebagai sarana penunjang kegiatan penelitian, pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan, yaitu (1) Laboratorium Penelitian Bahasa (fonetik) dan (2) Perpustakaan dan Dokumentasi Bahasa.

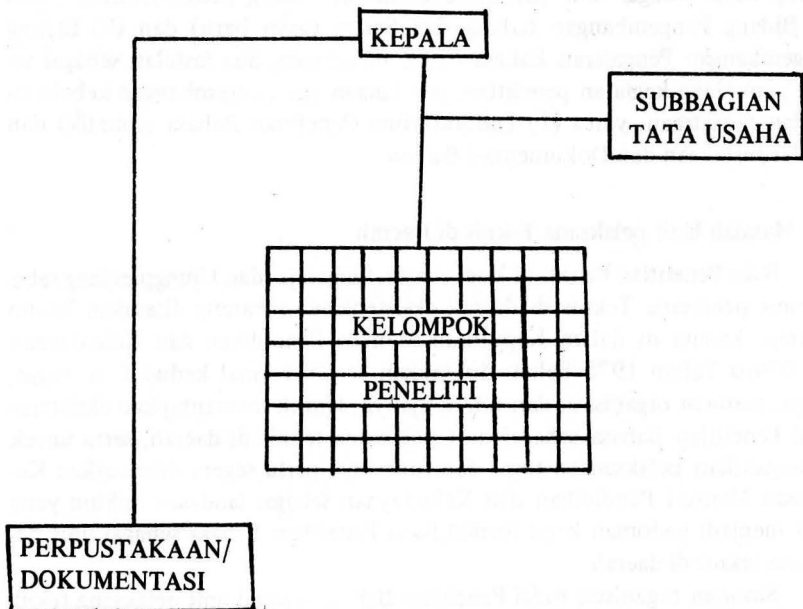
## 1.2 Masalah Unit pelaksana Teknis di Daerah

Balai Penelitian Bahasa di Yogyakarta, Singaraja, dan Ujungpandang sebagai unit pelaksana Teknis di daerah eksistensinya sekarang dirasakan belum mantap, karena di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975 belum ditetapkan secara formal kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerjanya. Untuk memantapkan eksistensi Balai Penelitian Bahasa sebagai unit pelaksana teknis di daerah, serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu segera dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai landasan hukum yang akan menjadi pedoman kerja formal Balai Penelitian Bahasa sebagai unit pelaksana teknis di daerah.

Susunan organisasi Balai Penelitian Bahasa sebagai unit pelaksana teknis di daerah sebaiknya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam susunan organisasi Balai tersebut sebaiknya ditetapkan antara lain sebagai berikut.

- a. Nama: Balai Penelitian bahasa;
- b. Balai Penelitian Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala;
- c. Subbagian Tata Usaha merupakan unsur bantuan administratif dalam urusan surat-menyurat, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;

- d. Kepala Balai Penelitian Bahasa dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- e. Tugas Balai Penelitian Bahasa dilaksanakan secara langsung oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional (peneliti);
- f. Balai Penelitian Bahasa mempunyai sebuah instalasi, yaitu Perpustakaan dan Dokumentasi Bahasa; dan pada instalasi tersebut ditempatkan pejabat-pejabat fungsional seperti pustakawan dan sebagainya.



Balai Penelitian Bahasa sebagai unit pelaksana teknis di daerah sekarang baru ada di tiga tempat di seluruh Indonesia, yaitu di Yogyakarta, Singaraja, dan Ujungpandang. Ketiga Balai tersebut bertugas membantu pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan mempunyai fungsi meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra, terutama meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra daerah, di daerahnya masing-masing.

Sesuai dengan kebijaksanaan nasional tentang bahasa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 dan penjelasannya, serta sesuai pula dengan perkembangan POLEKSOSBUD dewasa ini, sewajarnya apabila Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai sekarang mempertimbangkan kemungkinan didirikannya Balai Penelitian Bahasa di tempat lain selain di tiga tempat seperti tersebut di atas, misalnya: (1) di Bandung, untuk meneliti dan mengembangkan bahasa dan sastra di daerah Jawa Barat, terutama bahasa dan sastra Sunda (pemakainya lebih dari 20 juta), (2) di Padang atau di Bukittinggi, untuk bahasa-bahasa daerah di Sumatera, dan (3) di Banjarmasin untuk bahasa-bahasa daerah di Kalimantan.

### 1.3. Masalah Peningkatan Pengelolaan

Bentuk organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah bentuk organisasi lini dan staf. Sebagaimana lazimnya organisasi lini dan staf, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selain mempunyai unit-unit operasional yaitu bidang-bidang yang melaksanakan tugas pokok Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, juga mempunyai unit staf yaitu Bagian Tata Usaha yang melaksanakan fungsi-fungsi staf dengan tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Bagian Tata Usaha ini terdiri atas subbagian Urusan Dalam, Subbagian Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan.

Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi staf, juga berperan sebagai unsur pembantu pimpinan terutama untuk memberikan bantuan staf dalam bentuk nasihat, saran-saran alternatif, dan informasi lainnya untuk keperluan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Sehubungan dengan ini, dalam rangka usaha meningkatkan pengelolaan, pada Bagian Tata Usaha sangat diperlukan adanya tambahan satuan kerja yang disertai tugas menggarap pencatatan dan pengolahan data, penyusunan dan penyajian informasi, terutama untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan-keputusan secara cepat dan tepat.

Selain daripada itu satuan kerja ini dapat pula disertai tugas-tugas teknis administratif dalam perencanaan, pengolahan dan penyusunan laporan, yang semuanya itu merupakan garapan yang terus-menerus dan berkesinambungan.

Untuk memenuhi tuntutan keperluan pengelolaan tersebut Bagian Tata Usaha pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu dikembangkan dengan ditambah satu subbagian baru sehingga menjadi empat subbagian,

yaitu tiga subbagian yang telah ada dan satu subbagian yang baru disebut *Subbagian Pengolahan dan Laporan*.

Sambil menunggu terbentuknya subbagian baru tersebut pada Bagian Tata Usaha secara struktural, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di dalam menanggulangi masalah pengelolaan seperti tersebut di atas telah mengambil prakarsa untuk sementara membentuk satuan tugas sejenis yang disebut *Panitia Kerja Pengolahan Data*. Panitia Kerja Pengolahan Data ini sejak tahun 1977 telah melaksanakan tugas garapannya secara efektif membantu pimpinan, terutama di dalam penyajian informasi untuk pengambilan keputusan.

#### 1.4 Susunan Organisasi yang Disempurnakan

Mengingat segala penalaran sebagaimana telah dikemukakan pada 1.1, 1.2, dan 1.3 di atas, seyogianya pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai mempertimbangkan kemungkinan meninjau kembali serta menyempurnakan susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menurut prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa "yang disempurnakan" itu dapatlah kiranya digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

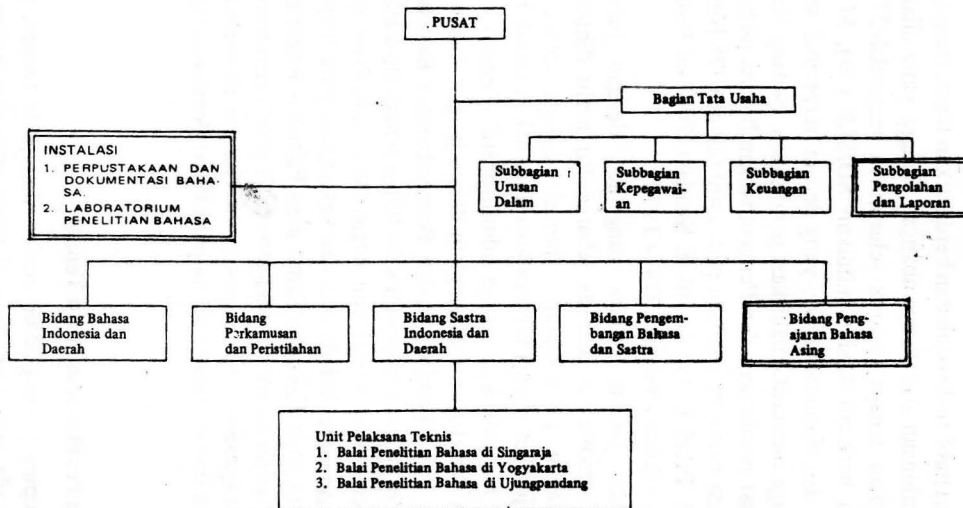
### 2. Masalah Peningkatan Ketenagaan

Perubahan struktur organisasi pada tahun 1975 dari Lembaga Bahasa Nasional (LBN) menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyebabkan jumlah tenaga yang ada pada permulaan organisasi itu kurang mencukupi kebutuhan tenaga yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena bertambahnya volume kerja sebagai akibat adanya peningkatan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975. Selain dari itu perbandingan antara tenaga administratif ("karyawan staf") dan tenaga teknis ("Karyawan lini") adalah satu berbanding satu. Perbandingan ketenagaan seperti ini jelas tidak menguntungkan pelaksanaan kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai lembaga yang bergerak di bidang penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra. Sementara itu semua pegawai termasuk karyawan lini yang melaksanakan tugas teknis operasional penelitian masih berstatus sebagai pegawai administratif.

Dari situasi dan kondisi ketenagaan seperti tersebut di atas timbullah tiga masalah pokok ketenagaan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang perlu mendapat perhatian secara saksama, yaitu (1) masalah peningkatan

# **SUSUNAN ORGANISASI \*)** **PUSAT PEMBINAAN DAN** **PENGEMBANGAN BAHASA**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**



## **KETERANGAN:**

Unit/Subunit yang telah ada (Keputusan Menteri P dan K No. 079/0 Tahun 1974).

Unit/Subunit baru yang diusulkan sebagai tambahan.

- \* Susunan Organisasi yang Disempurnakan (sebagai suatu gagasan).

jumlah dan jenis tenaga; (2) masalah peningkatan mutu tenaga, dan (3) masalah peningkatan status kepegawaian.

## **2.1 Masalah Peningkatan Jumlah dan Jenis Tenaga**

Menurut hasil analisis jabatan berdasarkan tugas, fungsi, dan uraian kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang dilakukan pada tahun 1976 kebutuhan tenaga organik seluruhnya berjumlah 375 yang terdiri atas tenaga-tenaga berkualifikasi pendidikan SD/SLP (29), SLA (104), Sarjana Muda (92), dan Sarjana (150), yang secara terperinci semuanya meliputi 26 jenis tenaga menurut kualifikasi pendidikan. Sedangkan tenaga organik yang ada pada Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa termasuk tiga Balai Penelitian Bahasa menurut keadaan pada awal tahun 1978 hanya berjumlah 161 orang. (Lihat Tabel E dan Grafik E Keadaan Pegawai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Tahun 1974 – 1978).

Perbedaan jumlah tenaga yang ada dengan jumlah tenaga yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan itu perlu dihilangkan. Untuk itu perlu diusahakan peningkatan jumlah tenaga secara berangsur-angsur. Peningkatan jumlah tenaga ini terutama diusahakan untuk tenaga teknis fungsional tanpa mengabaikan tenaga administratif. Dengan usaha penambahan tenaga secara bertahap ini diharapkan dalam jangka waktu lima tahun kebutuhan tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat terpenuhi. Sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan tenaga ini adalah perguruan tinggi. Untuk mendorong hasrat dan kegairahan mahasiswa dalam mempersiapkan diri sebagai kader kebahasaan dan kesastraan, para mahasiswa jurusan bahasa dan sastra pada Fakultas Sastra atau Fakultas Keguruan Sastra dan Seni (FKSS) IKIP perlu dirangsang dengan usaha pemberian beasiswa. Dengan usaha pemberian beasiswa ini diharapkan mereka setelah menyelesaikan studinya akan menaruh minat untuk bekerja pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

## **2.2 Masalah Peningkatan Mutu Tenaga**

Di samping peningkatan jumlah dan jenis tenaga, peningkatan mutu tenaga yang ada secara profesional perlu pula diusahakan secara berencana. Untuk ini ditempuh berbagai cara, misalnya:

- a. melaksanakan penataran intern tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;

- b. mengikutsertakan tenaga-tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada penataran-penataran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. mengikutsertakan tenaga yang ada dalam kegiatan penataran; latihan jabatan, atau kursus keahlian yang relevan dengan kebutuhan, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. mendorong tenaga-tenaga yang ada yang belum berpendidikan universitas untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi sambil bekerja;
- e. mengirim tenaga-tenaga potensial secara bergiliran ke luar negeri untuk memperluas cakrawala wawasannya serta memperdalam keahliannya yang selaras dengan garapan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

## 2.3 Masalah Peningkatan Status Kepegawaian

Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 079/0 Tahun 1975 pasal 950 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai unit peneliti. Supaya fungsinya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu ditunjang oleh tenaga-tenaga peneliti yang terdidik untuk melaksanakan penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra. Namun sampai tahun 1978 ini pegawai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa semuanya masih memiliki status sebagai pegawai administratif.

Mengingat pertimbangan dan alasan seperti dikemukakan di atas, pegawai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebaiknya dibedakan statusnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku menjadi tenaga fungsional peneliti dan tenaga administratif. Masalah ini sebenarnya menyangkut beberapa unit peneliti di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Oleh karena itu masalah ini sebaiknya ditangani oleh Pimpinan Departemen dan dibicarakan bersama dengan pihak-pihak yang berwewenang — dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) — sehingga mendapat penyelesaian secara tuntas sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.



### 3. Masalah Prasana Fisik Gedung dan Perlengkapan

Dalam masa Pembangunan Lima Tahun II Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memperoleh tambahan prasarana fisik gedung kantor dengan perlengkapannya sebagai hasil pembangunan yang dilakukan oleh Proyek Peningkatan Prasarana Fisik, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil pembangunan tersebut berupa:

- a. gedung kantor bertingkat dengan tiga lantai seluas 1275 m<sup>2</sup>, di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur;
- b. instalasi sentral AC lengkap dengan mesin-mesinnya, pompa air, dan unit pendingin air;
- c. alat-alat mebel;
- d. alat-alat dan mesin kantor;
- e. instalasi telepon intern dengan 16 pesawat berikut perlengkapannya, dan tiga buah pesawat telepon hubungan luas.

Gedung dengan perlengkapan seperti tersebut di atas sejak tahun 1976 telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dua unit pelaksana yaitu Bidang Perkamusan dan Peristilahan, dan Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra. Unit-unit pelaksana lainnya yaitu Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, Bidang Sastra Indonesia dan Daerah, dan Bagian Tata Usaha belum dapat ditampung di gedung baru tersebut sehingga masih terpaksa harus menempati gedung kantor yang lama (668 m<sup>2</sup>) di Jalan Diponegoro 82 (lantai atas), Jakarta Pusat. Gedung kantor tersebut adalah milik Himpunan Sekolah Kristen (HSK). Pengurus HSK kebetulan bermurah hati masih mengizinkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memakai gedung tersebut sebagai kantor hingga waktu yang akan ditentukan kemudian apabila Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah memperoleh tambahan fasilitas gedung kantor sendiri yang diharapkan akan dibangun oleh Pemerintah dalam masa Rencana Pembangunan Lima Tahun Repelita III.

Mengingat perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dewasa ini dan masa-masa yang akan datang sesuai dengan usaha peningkatan tugas dan fungsinya, seyogianya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selain memiliki gedung kantor yang representatif serta dapat menampung seburuh karyawan dengan segala kegiatan rutin administratif, juga memiliki prasarana penunjang kegiatan teknis operasional selengkapannya seperti. a. laboratorium penelitian bahasa; b. perpustakaan dan dokumentasi bahasa dan

sastra sebagai pusat informasi kebahasaan dan kesastraan tingkat nasional; c. ruangan dan perlengkapan seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya; d. ruangan reproduksi/percetakan dan penjilidan; e. fasilitas akomodasi; dan prasarana lainnya untuk keperluan pemeliharaan keamanan kantor dan pembinaan kesejahteraan pegawai, seperti rumah penjaga kantor, garasi, gudang, ruangan koperasi, kantin, dan tempat beribadat.

Pengadaan dan penambahan prasarana fisik gedung kantor dan fasilitas akomodasi lainnya seperti telah dikemukakan di atas sebaiknya dipusatkan di lokasi gedung kantor yang baru sekarang, yaitu di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur. Mudah-mudahan tempat tersebut kemudian hari akan merupakan kompleks "Pusat Bahasa" yang sewajarnya menjadi kebanggaan nasional. Pelaksanaan pembangunannya dapat dilakukan secara bertahap dalam masa Repelita III. Untuk dapat menampung unit-unit kerja yang sekarang masih berkantor di Jalan Diponegoro saja diperlukan tambahan pembangunan gedung kantor seluas kira-kira 1.200 m<sup>2</sup>, sedang untuk laboratorium penelitian bahasa dan perpustakaan/dokumentasi bahasa dan sastra diperlukan pembangunan gedung untuk tahap pertama seluas kira-kira 400 m<sup>2</sup>.

#### 4. Masalah Pengadaan dan Peningkatan Dana

Realisasi pembiayaan segala kegiatan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama lima tahun dalam Repelita II (1974–1978) dapat diketahui secara garis besar dari data di bawah ini:

a. Rutin (di luar belanja pegawai) . . . . .	Rp 234.210.000,00
b. Proyek Penelitian . . . . .	Rp 2.615.970.000,00
c. Proyek Pengembangan . . . . .	Rp 1.961.757.000,00
d. Bantuan Kerja Sama Luar Negeri . . . . .	Rp 24.409.719,00
Jumlah semua	Rp 4.845.346.719,00

Dana untuk biaya pelaksanaan program kebahasaan dan kesusastraan dalam Repelita II, yang bersumberkan baik pada anggaran rutin maupun pada anggaran pembangunan diperkirakan masih kurang, sekalipun ditambah dengan dana bantuan kerja sama luar negeri. Hal ini terbukti dengan masih adanya program kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terbatasnya dana.

Untuk melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dalam Repelita III (1979–1984) akan dibutuhkan dana yang lebih besar daripada dana dalam Repelita II, yaitu sekurang-kurangnya tiga kali lipat dari besarnya dana dalam Repelita II atau kira-kira 15 milyar rupiah.

Sejalan dengan semakin lainnya pembangunan, maka pembangunan di bidang sosial pada umumnya juga meningkat, begitu pula program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra. Dalam Repelita III kegiatan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra akan disempurnakan dan ditingkatkan. Oleh karena itu kebutuhan dananya juga akan meningkat.

Untuk tercapainya sasaran segala kegiatan yang telah direncanakan secara berkesinambungan serta maju berkelanjutan, perlu sekali diusahakan dana pembiayaan secukupnya. Untuk ini perlu meningkatkan usaha pengadaan dana dari berbagai sumber, baik dari anggaran rutin, anggaran pembangunan, maupun dari bantuan kerja sama luar negeri seperti dari *Ford Foundation*, *Indonesian Language Development Project (ILDEP)*, dan lain-lain.

Demikianlah uraian selayang pandang mengenai empat masalah pokok prasarana sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang diperoleh dari pengalaman selama tiga tahun ini. Penanggulangan masalah-masalah tersebut dengan sebaik-baiknya dan pembinaan prasarana/sarana tersebut dengan secermat-cermatnya akan merupakan kegiatan konstruktif yang benar-benar bersifat menunjang kelancaran dan berhasilnya pelaksanaan segala program teknis operasional yang menjadi garapan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

#### Daftar sumber/pustaka:

1. Menteri P dan K. *Keputusan No. 079/0 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*
2. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1978, *Pedoman Kerja.*
3. -----1977. *Rencana Induk Pengembangan Bahasa dan Sastra dalam Repelita III 1979 – 1984 (Naskah).*
4. ----- *Laporan Tahunan 1976, 1977.*

5. ----- *Laporan Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1977/1978.*
6. ----- *Laporan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 1977/1978.*
7. Sondang P. Siagian, MPA, Ph.D. *Peranan Staf dalam Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
8. ----- 1976. *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta; Gunung Agung.
9. ----- 1976. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta; Gunung Agung.

\* \* \*

1. Lagoon Power Station, Lagoon and Sand Island, etc.  
 Date: 1977/12/28

2. Lagoon Power Station, Lagoon and Sand Island, etc.  
 Date: 1977/12/28

3. Lagoon Power Station, Lagoon and Sand Island, etc.  
 Date: 1977/12/28

4. Lagoon Power Station, Lagoon and Sand Island, etc.  
 Date: 1977/12/28

5. Lagoon Power Station, Lagoon and Sand Island, etc.  
 Date: 1977/12/28

## DUA PEDOMAN PELENGKAP PEMBENTUKAN ISTILAH

Anton M. Moeliono



### Pendahuluan

Di dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* yang diterbitkan pada tahun 1975 oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan sekumpulan patokan dan saran yang dapat dipakai sebagai penuntun dalam usaha pembentukan istilah. Berkat pedoman itu berbagai istilah keilmuan dapat diciptakan dengan lebih berasio. Namun, istilah yang menjadi sendi yang penting di dalam pertukaran informasi harus diperkenalkan secara luas, disepakati bersama untuk diterima, dan dipakai secara merata jika hendak membuktikan manfaatnya. Salah satu jalan untuk mencapai maksud itu jalan penerbitan dan pemasukan kumpulan istilah ke dalam pasaran itu ialah jalan penerbitan dan pemasukan kumpulan istilah ke dalam pasaran sehingga mudah dicapai oleh semua kalangan masyarakat yang berkepentingan.

Karena itu, sebagai pelengkap pedoman umum tersebut di atas, Pusat Bahasa menerbitkan dua pedoman lagi, yang juga berasal dari seri rekomendasi *International Organization for Standardization (ISO)* tentang asas-asas penamaan dan penyiapan tata istilah berdasarkan klasifikasi. Tujuan kedua pedoman itu ialah menjadi penunjuk jalan bagaimana menyusun definisi istilah yang baik sebagai dasar pemilihan nama istilah, dan bagaimana menyiapkan kumpulan istilah yang komprehensif yang layak diterbitkan. Dengan tambahan kedua pedoman baru itu para pembentuk istilah mudah-mudahan dapat memperlancar usahanya yang terpuji dalam persiapan daftar istilah dan kamus istilah. Daftar dan kamus itu selanjutnya akan mempercepat proses pembakuan peristilahan Indonesia.

\*\*\*

**PEDOMAN ISO-R 704—1969**  
**TENTANG ASAS-ASAS PENAMAAN**  
**(Saduran Ringkas)**

- I. Pemilihan Prinsip
- II. Konsep dan Definisi
- III. Istilah
- IV. Penyajian Konsep dan Istilah.
- V. Pemakaian Istilah

**I. Pemilihan Prinsip**

**Asas 1. Pemilihan di antara prinsip yang bertentangan**

Istilah harus memenuhi beberapa prinsip yang terurai di bawah ini. Kadang-kadang prinsip itu berlawanan sehingga pembentuk istilah dalam keadaan tertentu harus memilih prinsip yang akan diutamakan-nya.

**Asas 2. Ekonomi bahasa**

Di dalam usaha membentuk istilah hendaknya diingat bahwa ungkapan yang terlalu cermat sering mengurangi kemudahan berbicara dan pemahaman. Karena itu, orang jarang mau lebih cermat daripada yang diperlukan. Misalnya, kebiasaan di Indonesia untuk memberi nama yang eksplisit dan panjang memaksa orang membuat akronim agar nama itu jadi lebih pendek sehingga dapat dipakai dengan lebih mudah.

**II. Konsep dan Definisi**

**Asas 3. Hakikat konsep**

Konsep atau satuan pikiran tidak sama dengan barang rujukannya karena konsep itu bersifat abstrak. Konsep juga tidak sama dengan istilah yang merupakan lambang lisan atau lambang tulisannya.

#### Asas 4. Pembatasan konsep

Penentuan batas-batas konsep mensyaratkan penetapan batas abstraksinya dan penetapan relasinya dengan konsep lain di bidang ilmu yang sama. Karena itu, perlu ditentukan genusnya dan spesinya. Misalnya, *pohon* ialah *genus pohon pisang*; *pohon pisang* ialah spesi *pohon*.

#### Asas 5. Tabel-sinopsis konsep

Penetapan batas di antara konsep-konsep hendaknya disertai oleh tabel sinopsis yakni daftar konsep berdasarkan klasifikasi, atau oleh gambar grafis yang melukiskan genealoginya.

#### Asas 6. Urutan preferensi dari ciri yang ekuivalen

Ciri khas konsep bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Yang sifatnya intrinsik atau hakiki antara lain berhubungan dengan bentuk, rupa, besar kecilnya, zatnya, atau keras lembutnya.

Yang sifatnya ekstrinsik dapat dibagi lagi atas ciri yang bertalian dengan (1) tujuannya (penerapannya, fungsinya, cakupannya, lokasinya, dan posisinya di dalam satu perangkat) serta (2) asal-usulnya (metode pembikinannya, penemunya, perekanya, pemerinya, penghasilnya, negeri asalnya, atau pembekalnya).

Biasanya, ciri-ciri itu ditentukan oleh posisi konsep yang bersangkutan di dalam sistem konsep yang merangkumnya. Namun, kadang-kadang harus dipilih di antara ciri-ciri yang ekuivalen. Dalam hal itu dianjurkan agar di dalam penentuan ciri diperhatikan urutan yang di atas: ciri intrinsik, tujuan, dan asal-usulnya.

#### Asas 7. Definisi sebagai titik tolak

Di dalam proses mencari dan memilih istilah yang tepat perlu dicapai kejelasan tentang definisi konsep yang bersangkutan. Untuk mencapai kejelasan itu perlu ditetapkan perangkat ciri instrinsik suatu konsep yang menentukan daya terapnya dan cakupan segala sesuatu yang masuk medan-terapannya. Perangkat ciri intrinsik konsep disebut intensinya, dan barang dalam medan-terapannya dinamai ekstensinya.

#### Asas 8. Konkordansi definisi

Yang dimaksudkan dengan definisi konsep ialah penentuan tempatnya di dalam sistem semua konsep yang bertalian. Rumusan definisi hendak-



nya dibandingkan dengan definisi konsep-konsep yang lain yang termasuk sistem yang sama.

#### **Asas 9. Pemakaian istilah dalam definisi**

Semua istilah khusus yang dipakai di dalam suatu definisi perlu diberi definisi juga di dalam terbitan yang sama.

Namun, hendaknya dijaga agar makna istilah yang satu jangan didefinisi oleh makna istilah yang lain yang maknanya ditafsirkan lagi dengan istilah yang satu itu. Karena itu, definisi dengan jalan rujuk silang yang melingkar perlu dihindari.

#### **Asas 10. Pembatasan cakupan definisi**

Kadang-kadang definisi hanya dapat diterapkan pada sejumlah kasus (ekstensi) yang terbatas. Dalam hal itu, daya terapnya hendaknya ditegaskan, misalnya, dengan catatan bahwa definisi tersebut hanya berlaku di bidang tertentu atau untuk terbitan tertentu.

#### **Asas 11. Kecermatan definisi**

Taraf kecermatan definisi bergantung pada corak dan maksud kamus istilah serta kalangan pemakai yang menjadi sasarannya. Misalnya, definisi suatu konsep matematik dalam buku pelajaran akan lebih cermat daripada definisinya di dalam kamus umum. Jika tidak dapat diberikan definisi yang cermat atau lengkap, konsep setidaknya tidaknya dilengkapi dengan penjelasan atau pemerian.

#### **Asas 12. Genus yang terdekat**

Genus konsep yang dipakai di dalam definisi yang berdasar ciri-ciri intrinsik (intensinya) ialah genus terdekat yang bertalian yang juga diberi definisi di dalam kamus, atau genus yang dianggap sudah dikenal secara umum.

#### **Asas 13. Definisi intensional yang tidak lengkap**

Ciri pembeda di dalam definisi yang berdasar ciri-ciri intrinsiknya hendaknya lengkap. Misalnya, definisi *obeng* = *alat tukang kayu*, tidak membedakan obeng dari palu, gergaji, atau kikir. Definisi yang tidak lengkap seperti yang tersebut di atas mudah dikenali karena kedua suku di dalam persamaan itu tidak dapat dipertukarkan.

**Asas 14. Manfaat definisi ekstensional**

Definisi yang berdasar ekstensinya tidak dapat bersifat tuntas karena mungkin spesi yang baru ditemukan atau direkakan setelah definisi tersebut ditetapkan. Namun, definisi berdasarkan ekstensinya sering memberikan gambaran yang lebih jelas daripada definisi berdasarkan intensinya. Karena itu, definisi berdasarkan ekstensinya berguna sekali untuk tujuan praktis (baik sebagai definisi maupun sebagai pelengkap definisi berdasarkan intensinya). Misalnya, makna istilah Inggris *triangle* dengan cepat dapat diterangkan dengan memberikan *segitiga* sebagai padanannya.

**Asas 15. Tipe ilustrasi dan gunanya**

Ilustrasi sering banyak manfaatnya untuk menjelaskan definisi atau menambah kecermatan pemahamannya. Bergantung pada tujuannya, jenis ilustrasi dapat berupa gambar atau diagram.

**III. Istilah****Asas 16. Ketepatan bahasa**

Bentuk istilah hendaknya sesuai dengan kaidah tata bahasa.  
(Bandingkan bab III dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*).

**Asas 17. Keringkasan istilah**

Bentuk istilah hendaknya sesingkat-singkatnya selama kejelasannya tidak terganggu.

**Asas 18. Istilah singkatan**

Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menyingkatkan sebuah kata atau komponen dalam gabungan kata dan kata majemuk. Istilah singkatan itu berupa gabungan huruf atau suku kata (akronim). Misalnya, *bus*, *radar*, *ABRI*.

Pembentukan dan pemakaian istilah singkatan sebaiknya dihindari jika bentuk lengkapnya sudah cukup singkat.

(Bandingkan bab V dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*).

### Asas 19. Transliterasi

Jika di dalam peristilahan atau penyusunan daftar istilah perlu digunakan transliterasi huruf Siril (Rusia), Arab, Ibrani, atau Yunani ke huruf Latin; hendaknya diperhatikan rekomendasi ISO yang berikut:

ISO-R 9 *International System for the transliteration of Cyrillic characters;*

ISO-R 233 *International system for the transliteration of Arabic characters;*

ISO-R 259 *Transliteration of Hebrew;* dan

ISO-R 315 *Transliteration of Greek into Latin characters.*

### Asas 20. Kecocokan istilah dengan definisi

Makna harfiah istilah turunan, misalnya, bentuk jabaran, majemuk, dan frase, serta makna istilah berdasarkan majas, misalnya, metafora, dan metonimia, harus mencerminkan ciri khas konsep yang akan diterangkan.

### Asas 21. Makna harfiah istilah-turunan dan gabungan kata

Istilah yang terdiri atas kata turunan atau gabungan kata dapat dianggap sama dengan definisi yang dipendekkan. Karena itu, istilah jenis tersebut harus mencerminkan makna yang terungkap oleh gabungan konsep yang mendasarinya. Di samping itu, hendaknya diperhatikan bahwa, karena sifat kependekannya itu, istilah tersebut tidak perlu menurut tiap komponen yang tersimpul di dalam gabungan konsep dan definisinya. Yang diperlukan hanyalah ciri-ciri yang membedakannya dari konsep lain yang bertalian. Misalnya, *suku cadang* lebih baik daripada *suku cadangan* atau *suku yang dicadangkan*; *jembatan timbang* lebih baik daripada *jembatan untuk menimbang*.

### Asas 22. Kemungkinan derivasi

Di dalam pemilihan istilah baru harus diusahakan agar bentuknya dengan mudah memungkinkan derivasi menurut kaidah tata bahasa yang lazim. Misalnya, bentuk *melit* (curious) lebih mudah dibuat derivasinya daripada *ingin tahu*; bandingkan *kemelitan*, *pemelit*, (*yang*) *termelit* dengan *keinginan tahu/keingintahuan*, *orang yang ingin tahu*, (*yang*) *paling ingin tahu*.

### Asas 23. Istilah gabungan kata yang menyesatkan

Unsur yang diterangkan dalam istilah yang berupa gabungan kata (D-M) yang tidak merujuk ke genus konsep yang harus dilambangkan sebaiknya dihindari. Misalnya, *kata akhir* sebagai padanan *stemmotivering* atau *voting-account* tidak sebaik *sandaran suara*.

### Asas 24. Istilah berdasarkan peralihan makna

Istilah baru dapat diperoleh dengan memberikan arti khusus pada kata dalam kosa kata umum atau pada istilah yang dipakai di dalam bidang ilmu lain asal saja bidang itu berjauhan sehingga tidak mungkin timbul ketaksaan atau kedwiarthian. Misalnya, *masukan* dan *kehuaran* untuk *input* dan *output*.

Istilah jenis itu, yang dipilih dengan baik, akan lebih singkat daripada istilah turunan atau istilah gabungan kata yang khusus dibentuk untuk maksud itu. Misalnya, *gulma* (*weed*) lebih baik daripada *tumbuhan pengganggu*.

### Asas 25. Istilah yang taksa (berdwiarthi)

Adanya istilah yang dapat bermakna banyak tidak mungkin dihindari. Namun, istilah yang sifatnya polisem atau homonim hanya membingungkan jika sekaligus terjadi dua hal yang berikut: (1) istilah yang sama mendukung berbagai makna yang bermiripan, dan (2) istilah-istilah itu sering muncul di dalam konteks yang sama karena dipakai dalam bidang ilmu yang sama. Dalam hal itu perlu dicari istilah yang berbeda sebagai pengganti istilah yang membingungkan. Contoh istilah yang tidak perlu menimbulkan ketaksaan ialah *bola pancang* (*bowling*) dan *tiang pancang* (*concrete pillar*) karena bidangnya berjauhan. Gejala ketaksaan timbul jika, misalnya, bentuk *alkohol* digunakan untuk (1) kelas senyawaan alkohol, (2) etil alkohol atau etanol, dan (3) minuman keras.

### Asas 26. Istilah sinonim

Sinonim menjadi beban untuk ingatan dan dapat menimbulkan kesan yang keliru bahwa ko-sinonim masing-masing melambangkan konsep yang sama atau yang berbeda-beda. Misalnya, *rambang*, *rawak*, *rawu*, *acak*, *serampang*, dan *sembarang* yang dipakai sebagai padanan *random*, *haphazard*, *casual*, dan *desultory*. Karena di dalam bahasa teknis,

langgam yang baik berpokok pada kejelasan dan tidak terutama pada variasi, pembakuan atas golongan sinonim perlu mendapat perhatian khusus.

#### **Asas 27. Istilah internasional dan asli yang bersifat sinonim**

Istilah yang dalam bentuk tulisannya bercorak internasional, banyak yang berasal dari bahasa Latin atau Yunani. Berlainan dengan anjuran yang tercantum pada asas nomor 26 di atas, baik istilah internasional maupun padanannya yang berpangkal pada bahasa Indonesia atau bahasa serumpun sebaiknya dibiarkan berdampingan sebagai sinonim. Di dalam teks yang bersifat resmi, misalnya di dalam perundang-undangan, istilah aslinya — jika ada — yang dipakai, sedangkan istilah internasional perlu dikenal dan dapat dipakai untuk komunikasi internasional. Bandingkan, misalnya, *frekuensi* dan *kekerapan*, *temperatur* dan *suhu*, *diameter* dan *garis tengah*.

#### **Asas 28. Ketaatan pada pemakaian yang sudah mapan**

Jika istilah atau konsep sudah diterima secara umum dan merata, istilah itu janganlah diubah tanpa alasan yang mendesak dan meyakinkan. Alasan yang sah ialah pelanggaran asas peristilahan atau penamaan, misalnya. Jika pengubahan itu tidak diterima, akan timbul sinonim baru atau istilah baru yang taksa. Karena itu, asas-asas dalam pedoman ini pertama-tama dimaksudkan untuk menjadi pegangan bagi pembentukan istilah baru dan bagi pemilihan istilah yang diutamakan di antara yang sudah ada.

#### **Asas 29. Perubahan makna**

Perubahan makna kata tidak mudah diterima dengan merata, kecuali jika perubahan itu menyangkut unsur kosa kata yang jarang atau tidak dikenal secara umum (Lihat bagan prosedur pembentukan istilah, bab II, 2.4, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*). Misalnya, usaha pembatasan makna *menonton* dan *penonton* sehingga tidak dipakai lagi dalam kombinasi dengan *televisi* tidak berhasil.

Jika, karena perkembangan gagasan, maka istilah keilmuan berubah, maka cakupan makna baru dari konsep yang bertautan dengan istilah itu perlu didefinisi lagi dengan cermat. Jika istilah itu tetap membingungkan setelah pengubahan definisinya itu, sebaiknya dicari istilah yang baru.

#### IV. Penyajian Konsep dan Istilah

##### Asas 30. Penyajian berklasifikasi

Penyusunan tata istilah mensyaratkan daftar kumpulan istilah dengan definisinya. Pada umumnya, daftar istilah itu hendaknya disusun dengan bersistem, artinya berdasarkan suatu klasifikasi konsep. Pertimbangannya ialah semua konsep yang dicantumkan di dalam daftar kumpulan istilah harus diberi definisi. Definisi itu akan memperbedakannya dari konsep lain yang bertalian dalam bidang yang sama.

Telaah tuntas atas peristilahan suatu bidang ilmu yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan perincian dan pencabangan bidang tersebut seharusnya mendasari daftar istilah menurut abjad yang terandalkan.

Pedoman tentang penyiapan tata istilah berdasarkan klasifikasi itu dimuat di dalam rekomendasi ISO-R 919-1969.

#### V. Pemakaian Istilah

##### Asas 31. Konteks yang menggantikan unsur istilah

Konteks istilah generik (genus) dapat menyempitkan maknanya sehingga menjadi sama dengan makna istilah spesifiknya (spesinya). Akibat itulah yang memberikan peluang kepada pemakai bahasa untuk meningkatkan istilah dalam konteks tertentu. Misalnya, salah satu jenis kendaraan (genus) di luar konteks harus disebut *kendaraan bermotor* (spesi). Di dalam ikatan kalimat seperti *Kendaraannya kehabisan bensin*, istilah *kendaraan* sebenarnya merujuk ke makna *kendaraan bermotor*.

##### Catatan:

Sumber rujukan yang disebut dalam pedoman ini ialah (1) *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, terbitan Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan (2) *Guide for the Preparation of Classified Vocabularies (Example of Method)*, ISO Recommendation R 919, 1969 (E).

**PEDOMAN ISO-R 919-1969**  
**TENTANG PENYIAPAN TATA ISTILAH BERDASARKAN**  
**KLASIFIKASI**  
**(Saduran Ringkas)**

- I. Pembatasan Masalah
- II. Pemanfaatan Sumber Informasi
- III. Penyiapan Naskah
- IV. Penyusunan Indeks Menurut Abjad
- V. Penerbitan

**I. Pembatasan masalah**

1. Bidang ilmu yang akan dicakup oleh tata istilah dibatasi lebih dahulu dengan cermat dan terperinci menurut bagian-bagiannya. Tidaklah cukup jika hanya disebut namanya saja. Perincian bidang itu akan menentukan jumlah dan corak istilah yang dimasukkan ke dalam suatu daftar dan istilah yang dikeluarkan walaupun berhubungan dengan bidang itu.
2. Pembatasan dan klasifikasi bidang ilmu dapat dipermudah dengan pemakaian satu sistem klasifikasi yang berlaku dalam bidang itu; misalnya, keluaran *International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)*, *International Union of Biochemistry*, *UNESCO*, atau terbitan seperti *Universal Decimal Classification (UDC)* dan *Nomina Anatomica*.
3. Panjang pendeknya daftar istilah dan besar kecilnya kamus istilah bergantung pada masuk tidaknya konsep yang sangat spesifik ke dalam kumpulan yang direncanakan. Taraf spesialisasinya itu ditentukan pula oleh kalangan pemakai istilah itu yang menjadi sasaran.
4. Tiap daftar istilah hendaknya memberikan gambaran yang komprehensif tentang konsep yang terdapat di dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Walaupun begitu, daftar istilah jangan melebihi jumlah seribu konsep. Jika jumlah itu dianggap tidak cukup, bidang ilmu itu

diperinci lagi menjadi dua sub-bidang atau lebih dan tata istilahnya pun disusun secara terpisah.

5. Penyiapan daftar istilah yang benar-benar lengkap mencakup semua aspek bidang ilmu yang bersangkutan biasanya makan waktu yang terlalu lama sehingga daftar itu tidak pernah selesai, atau penerbitannya tertunda-tunda sehingga sudah tidak mutakhir lagi jika keluar. Lagi pula, keperluan orang akan istilah keilmuan yang umum dan keperluan para ahli akan istilah khusus yang dipakai di dalam spesialisasinya tidak akan dapat dilayani secara seimbang jika pekerjaan itu tidak dilakukan secara bertahap.
6. Daftar istilah yang disusun menurut abjad dan kamus istilah yang dilengkapi dengan definisinya *selalu* dijabarkan dari daftar istilah yang berdasarkan klasifikasi konsep yang terdapat di dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian tercapai daftar yang komprehensif (lihat pasal 4 di atas) yang dengan seimbang menyajikan konsep-konsep menurut taraf kepentingannya. Pembentukan istilah menurut urutan huruf A, B, C, dan seterusnya di dalam suatu daftar tanpa klasifikasi sebelumnya tidak akan mencapai maksud tersebut.

## II. Pemanfaatan Sumber Informasi

1. Ada tiga macam sumber yang dapat dipakai untuk menyusun tata istilah:
  - a. bahan terbitan peristilahan seperti kamus istilah dan karangan tentang tata istilah;
  - b. bahan terbitan yang tidak khusus mengenai peristilahan; misalnya, buku pegangan, buku pelajaran, ensiklopedi teknis, katalogus niaga; dan
  - c. tabel klasifikasi, yakni sinopsis berdasarkan klasifikasi yang mengikhtisarkan konsep-konsep bidang ilmu yang bersangkutan.
2. Sumber yang paling penting ialah berbagai daftar standar dan rekomendasi internasional yang terdapat di dalam tiap jenis sumber yang tersebut di atas. Bibliografi UNESCO tentang daftar istilah dan kamus istilah di bidang ilmu murni dan terapan hendaknya dikonsultasi juga.



3. Langkah pertama dalam penyusunan daftar istilah ialah penetapan sistem klasifikasi semua konsep (sub)bidang ilmu yang akan dimasukkan. Jumlah konsep (misalnya, 300, 500, atau 1000) sudah harus ditentukan sebelumnya. Untuk keperluan itu rekomendasi ISO-R-704-1968 (E), tentang asas penamaan hendaknya dipakai.

4. Konsep yang akan dipilih untuk daftar istilah dapat digolongkan menurut klasifikasi sehingga hubungan di antara konsep yang bertalian menjadi jelas. Di dalam pemilihannya, sedapat-dapatnya dibedakan empat macam konsep: (1) konsep pokok, yang khusus bertalian dengan (sub)bidang ilmu tertentu; misalnya, dalam teknik kendaraan bermotor, konsep *mpbil*, *limusin*; (2) konsep luasan, yang masuk bidang yang lebih luas daripada bidang yang bersangkutan; misalnya, dalam teknik kendaraan bermotor, konsep *roda*; (3) konsep pinjaman, yang sering dipakai di dalam bidang yang bersangkutan, tetapi yang sebenarnya merupakan konsep pokok di bidang lain; misalnya, dalam teknik kendaraan bermotor, konsep *minyak pelumas*, *bahan bakar*; dan (4) konsep umum, yang bertalian dengan kosa kata umum.

Diusahakanlah agar di dalam daftar istilah yang bersangkutan jumlah konsep jenis (2) dan (3) dibatasi benar-benar, sedangkan konsep jenis (4) sedapat-dapatnya dihindari kecuali jika dipakai dalam arti khusus (bandingkan 'Prosedur Pembentukan Istilah', *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, II, 2.4). Saran tersebut di atas diajukan agar dihindari dua hal: (1) tumpang tindih yang terlalu banyak di antara berbagai daftar istilah, dan (2) keinginan pembentuk istilah menyusun sendiri istilah konsep pinjaman (lihat pasal 4 di atas) yang hasilnya mungkin berbeda dengan bentuk istilah konsep yang sama yang di bidang lain dianggap konsep pokok.

5. Jika daftar konsep telah disusun, tiap konsep diberi nomor urut. Penambahan konsep yang baru disisipkan di antara konsep yang sudah terdaftar. Konsep sisipan itu diberi tambahan tanda huruf (misalnya, 307a) agar penomoran yang sudah ditetapkan jangan terubah.

### III. Penyiapan Naskah

1. Tiap konsep ditulis pada satu carik naskah (*manuscript slip*). Penggarapan istilah hendaknya dimulai dengan menetapkan rumusan definisi konsep yang bersangkutan pada carik naskah. Demi kelancaran pekerjaan, rumusan tersebut bertolak dari satu rujukan atau referensi, baik yang diciptakan sendiri maupun yang tersedia di dalam salah satu sumber. Saran ini bertujuan agar cakupan makna konsep tersebut diungkapkan secara eksplisit sehingga pembentuk istilah terhindar dari bahaya salah pilih kata. Misalnya, karena terjemahan harfiah, istilah *self-suggestion* pernah disalin menjadi *saran diri*, padahal *suggestion* di sini bukan saran atau usul. Ciri-ciri definisi diberikan dalam rekomendasi ISO-180-R704 tentang asas penamaan.
2. Berdasarkan definisi yang telah dirumuskan, istilah yang akan dimasukkan ke dalam daftar atau kamus, kemudian dipilih atau diciptakan menurut prosedur pembentukan istilah di dalam buku pedoman pembentukan istilah (II, 2.4). Jika terdapat beberapa istilah sinonim yang sudah atau yang dapat dipakai, masing-masing hendaknya dibedakan menjadi (1) istilah yang diutamakan, (2) istilah yang diizinkan, (3) istilah yang diselangkan, dan (4) istilah yang dijauhkan sesuai dengan pasal IV, 4.4, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* tentang sinonim dan kesinoniman.
3. Jika di dalam daftar istilah harus dimasukkan konsep luasan atau konsep pinjaman, ataupun konsep yang terdapat di dalam kosa kata umum, maka perlu diselidiki dahulu ada tidaknya istilah dan definisi yang sudah ditetapkan oleh ahli lain yang berwenang di bidang itu. Jika ada, istilah dan definisi itulah yang sedapat-dapatnya dipertahankan sehingga terjamin suatu konkordansi. Asal saja, tentu, istilah itu sesuai dengan asas pembentukan istilah dan asas penamaan.
4. Naskah yang selesai disusun hendaknya dikirimkan kepada sejumlah ahli yang dimintai ulasannya, atau dibawa ke suatu sidang untuk dibahas bersama.
5. Setelah naskah daftar istilah atau naskah kamus dipindah dan disempurnakan, baru dibuat naskah cetaknya untuk penerbitannya.

#### IV. Penyusunan Indeks Menurut Abjad

1. Sejalan dengan penyiapan kumpulan carik naskah, pekartuan indeks sementara mengenai istilah masukan berdasarkan abjad dapat mulai disusun.
2. Jika konsep yang diolah sudah mencapai jumlah sekitar 250, maka penyusunan daftar istilah sementara menurut abjad dapat dimulai berdasarkan pekartuan indeks yang sudah terkumpul. Pekartuan indeks dan daftar sementara itu selanjutnya dikembangkan sesuai dengan laju pekerjaan.
3. Jika jumlah konsep daftar istilah sudah menjadi definitif, dibuatlah daftar final menurut abjad. Disarankan agar di dalam pengabjadan istilah Indonesia kebiasaan yang sudah teradat di bidang perkamus-an Indonesia diikuti. Yang menjadi pangkal urutan istilah ialah kata/bentuk dasarnya atau yang dianggap begitu. Pertimbangannya dalam hal ini ialah adanya istilah turunan yang dapat berawalan *ber-, meng-, di-, ter-, se-, ke-, peng-, per-*. Jika huruf pertama awalan itu menjadi pegangan pengabjadan, terjadi tiga hal yang patut dihindari: (1) daftar di bawah huruf abjad *B, (D), M, K, P, (S), (T)* mungkin menjadi terlalu panjang jika dibandingkan dengan daftar di bawah huruf lain; (2) istilah yang makna pokoknya sebenarnya didukung oleh kata/bentuk dasarnya, dan bukan oleh afiksnya, akan dicari di bawah huruf pertama awalan yang bersangkutan yang tidak mudah dipertautkan dengan konsep yang mengalasinya, atau dengan terjemahan bahasa asingnya; dan (3) perangkat istilah yang berpangkal kata/bentuk dasar yang sama mungkin tersebar di antara daftar di bawah huruf abjad yang berbeda-beda.

Misalnya, perangkat istilah *menyerap, terserapkan; (zat) penyerap, penyerapan, keterserapan, serapan, daya serap jenis, kedayaserapan*; semuanya didaftarkan di bawah huruf S sebagai berikut :

*serap*

*menyerap*  
*terserapkan*

*absorb*  
*absorbable*

<i>serapan</i>	<i>absorption</i>
<i>penyerap (zat-)</i>	<i>absorbent</i>
<i>penyerapan</i>	<i>absorption</i>
<i>keterserapan</i>	<i>absorbability</i>
<i>daya serap jenis</i>	<i>absorptivity</i>
<i>kedayaserapan</i>	<i>absorptivity</i>

Keuntungan lain yang diperoleh dengan cara tersebut di atas ialah bahwa daftar istilah Inggris—Indonesia, yang istilah asingnya lebih banyak dicirikan oleh akhirannya, tidak akan jauh berbeda dalam urutannya dengan daftar istilah Indonesia—Inggris.

## V. Penerbitan

Cara memperbanyak dan mendistribusikan daftar istilah sehingga mencapai kelompok sasaran yang paling tepat perlu dipikirkan masak-masak karena daftar istilah yang sudah dibakukan, dewasa ini, dinantikan banyak orang.

### Catatan :

1. Karangan ini merupakan makalah yang direvisi setelah diajukan pada Sidang XII Majelis Bahasa Indonesia—Malaysia, bulan November 1978, di Jakarta.
2. Bandingkanlah sebagai contoh, klasifikasi yang diusulkan oleh kelompok farmasi (Tjptasoerasa, ketua) dan kelompok ilmu kemineralan (M.M. Purbo-Hadiwidjaya, ketua), Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, sebagai kerangka acuan pembentukan istilahnya.

## Ilmu Farmasi

### I. Sains Farmasi

#### A. Farmaseutika

1. Perhitungan farmasi
2. Farmasi kuantum
3. Termodinamika farmasi
4. Larutan dan kelarutan

5. Kinetika farmasi
6. Sistem dispersi
7. Reologi
8. Biofarmasi

#### **B. Farmasi Biologi**

1. Farmakognosi
2. Fitokimia
3. Serologi dan imunologi
4. Alergologi

#### **C. Kimia Farmasi**

1. Tata nama bahan obat
2. Kimia farmasi anorganik
3. Kimia farmasi organik
4. Kimia bahan alam
5. Disain bahan obat

#### **D. Farmakologi**

1. Lintas tubuh obat
2. Farmakodinamika
3. Farmakokinetika
4. Posologi

### **II. Teknologi Farmasi**

#### **A. Farmasi Penyediaan dan Pemabrikaan**

1. Formulasi
2. Penyarian dan pemisahan bahan farmasi
3. Ilmu dan teknik meracik
  - a. Sediaan padat dan semi padat
  - b. Sediaan cair
  - c. Sediaan mata dan parenteral
  - d. Erosal
4. Pengetahuan wadah dan bahan kemas
5. Radiofarmasi

**B. Analisis Farmasi**

1. Persyaratan dan pengujian
2. Analisis obat, makanan, dan kosmetika
3. Pengujian hayati
4. Kromatografi
5. Analisis instrumen
6. Toksikologi/Farmasi kehakiman

**C. Farmasi Klinik**

1. Analisis klinik
2. Antaraksi obat
3. Alat kesehatan

**D. Administrasi Farmasi**

1. Undang-undang farmasi
2. Manajemen farmasi
3. Farmasi masyarakat
4. Farmasi pemerintahan
5. Farmasi rumah sakit
6. Farmasi industri

**Ilmu Kemineralan****I. Ilmu murni****A. Kristalografi**

1. Sistem hablur. Hukum. Teori tangkup.
2. Pertumbuhan tindi hablur. Agregat. Perkembaran.
3. Kimia hablur. Sifat kimia-morfologi. Keisomorfian dan Kepolimorfian.
4. Ketidakteraturan. Kepungan. Cacat. Tutupan. Hablur negatif.
5. Pembentukan. Pertumbuhan. Penghabluran kembali. Perwatakan. Bentuk ekahablur.
6. Pseudomorfian dan Kepseudomorfian.
7. Struktur molekul. Teori diskontinuum.

**B. Mineralogi**

1. Penentuan mineral dan berbagai sifatnya.
2. Unsur dalam keadaan bebas. Karbida. Borida. Fosfida. Nitrida.
3. Sulfida. Garam sulfo. Mineral Se dan Te yang bersesuaian.
4. Garam halogen. Halogenida dan oksihalogenida.
5. Oksida. Hidroksida. Oksisulfida.
6. Silikat. Titanat. Zirkonat Torat.
7. Garam asam-oksida lain.
8. Mineral organik.
9. Mineral menurut kriteria kristalografi, cara terjadinya, optika, dan dasar fisika lain.

**C. Geologi Ekonomi**

1. Penggolongan endapan mineral menurut asalnya
2. Penentuan dan pemberian bijih dan mineral ekonomi
3. Asal dan cara pembentukan mineral
4. Mineral bukan logam
6. Endapan mineral berkarbon
7. Permata dan setengah permata
8. Mata air mineral

**II. Ilmu Terapan/Teknologi Mineral****A. Pertambangan Umum**

1. Penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi
2. Operasi tambang dan penggalian
3. Peralatan dan kemudahan tambang
4. Pengangkutan dan penimbunan
5. Pengolahan bahan galian
6. Masalah tata lingkungan dan pemanfaatan kembali tanah pertambangan
7. Keamanan dan kesehatan tambang dan pemeliharaannya. Polisi tambang.

**B. Minyak Bumi. Gas Bumi. Panas Bumi**

1. Penyelidikan pendahuluan dan eksplorasi
2. Operasi
3. Peralatan dan kemudahan
4. Pengangkutan dan penimbunan
5. Pengilangan
6. Masalah tata lingkungan
7. Keamanan dan kesehatan dan pemeliharaannya. Polisi tambang

(Sumber: **Berita Pusat Pengembangan Teknologi Mineral**, no. 8, thn. 2, 1978).

\*\*\*

PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DAPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN



35

C.V. PETRA JAYA  
Jakarta